

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi anggaran diperkenalkan dari Kota Porto Alegre, Brazil tahun 1989. Ide dasarnya adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama memutuskan bagaimana uang publik harus dibelanjakan (Costa *et al.*, 2024). Partisipasi anggaran telah menjadi alat yang dikenal luas dan digunakan dalam tata kelola daerah secara internasional. Partisipasi anggaran juga merupakan salah satu bentuk reformasi demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan lebih dari 1500 kasus di berbagai negara (Theuwis and Kindt, 2024; Frenkiel, 2021; Uddin *et al.*, 2019; Walczak and Rutkowska, 2017; Zepic *et al.*, 2017; Baiocchi and Ganuza, 2014).

Partisipasi anggaran merupakan salah satu inovasi demokratis paling populer di seluruh dunia yang memberikan kewenangan pengambilan keputusan yang paling besar kepada masyarakat yang berpartisipasi (Theuwis and Kindt, 2024; Schneider and Busse, 2019; Cabannes and Lipietz, 2018). Masyarakat membuat keputusan. Mereka berdebat, mendiskusikan proposal, menentukan pilihan secara kolektif. Upaya kolaboratif ini mendorong keselarasan antara harapan masyarakat dengan kebijakan publik (Mattei *et al.*, 2022; OECD, 2022).

Di sisi lain, mengadopsi partisipasi anggaran menjadi penting bagi sebuah pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberi suara kepada pihak yang terdampak oleh kebijakan publik (Maravilla and Grayman, 2020; Sopanah,



Partisipasi anggaran juga merupakan salah satu instrumen partisipasi paling sukses yang memperhatikan inklusi, kesetaraan dan keterbukaan pemerintahan (Lehtonen, 2022; Sintomer *et al.*, 2008). Masyarakat diminta untuk mengambil peran aktif yang efektif dalam membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan para pemangku kepentingan dan layanan yang diberikan (Anggraeni *et al.*, 2019).

Penerapan partisipasi anggaran di negara-negara berkembang telah menjadi komponen penting dalam reformasi neoliberal yang dikenal sebagai *New Public Management* (NPM) dan yang terbaru *New Public Governance* (NPG) (Jayasinghe *et al.*, 2020; Kuruppu *et al.*, 2016). Organisasi moneter seperti Bank Dunia dan lembaga bilateral lainnya misalnya *The United States Agency for International Development* (USAID) memperkenalkan bentuk partisipasi anggaran di negara-negara berkembang dengan tujuan antara lain mendemokratisasi demokrasi, pemberantasan korupsi, dan korupsi politik/klientelisme (Jayasinghe *et al.*, 2020; Aleksandrov *et al.*, 2018; Grillos, 2017; Kuruppu *et al.*, 2016).

Beberapa dekade terakhir, partisipasi anggaran semakin mendapat pengakuan di kalangan akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan (Bartocci *et al.*, 2023; Lehtonen, 2021; Cabannes and Lipietz, 2018). Literatur yang ada saat ini menggambarkan partisipasi anggaran sebagai model pengelolaan lokal berdasarkan demokrasi yang paling dikenal dan paling sukses dan paling menarik dari banyak proses partisipasi yang telah menjamur selama tiga dekade terakhir di sebagian negara demokrasi barat (Beikverdi *et al.*, 2024).

Partisipasi anggaran adalah metode pelibatan publik yang paling populer, yang melibatkan masyarakat dalam memprioritaskan alokasi dana publik (Rocke,

balik kesuksesannya, partisipasi anggaran telah banyak mendapat kritik sebagai pendekatan yang tidak efektif tetapi sebagai proses yang



digerakkan oleh penguasa dan pihak-pihak yang lebih dominan (Maravilla and Grayman, 2020).

Hasil-hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan implementasi partisipasi tidak sesuai dengan tujuan besarnya. Negara Rusia, masyarakat memainkan peran penting dalam menangkap isu-isu yang tidak diperhatikan pemerintah dan menuntut isu-isu tersebut dimasukkan di dalam agenda terkait penganggaran ramah lingkungan. Hanya saja kepedulian pihak berwenang untuk mempertimbangkan sektor publik sebagai mitra memecahkan masalah-masalah mendesak, pembangunan yang tidak merata pada lembaga-lembaga publik dan lembaga sosial masyarakat di berbagai daerah menghambat pengembangan partisipasi masyarakat khususnya penganggaran ramah lingkungan (Vinogradova, 2022; Cabannes, 2015).

Partisipasi anggaran di Sri Lanka tidak berhasil dalam mencapai tujuan dasarnya dalam bentuk kesetaraan, keadilan dan transparansi. Partisipasi anggaran lebih menjadi alat untuk implementasi kekuasaan yang mendominasi daripada sebagai sarana untuk mendorong emansipasi politik di Sri Lanka (Kuruppu *et al.*, 2016). Kepemimpinan politik, termasuk menteri, legislator memainkan peran penting untuk menentukan tujuan anggaran (Khoo *et al.*, 2024; Uddin *et al.*, 2019). Partisipasi anggaran hanya digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada (Mattei *et al.*, 2022). Peneliti sebelumnya (Gordon *et al.*, 2017; Yang & Pandey, 2011; Ebdon & Franklin, 2004) mengidentifikasi kelemahan praktik partisipasi anggaran yaitu: kurangnya pengetahuan, persepsi warga bahwa masukan mereka tidak dihargai atau tidak diinginkan, kurangnya kepercayaan dan legitimasi, sikap apatis warga, isan waktu dan gagasan bahwa kepentingan pribadi paling penting di atas gan warga.



Pemerintah Filipina melibatkan masyarakat dalam partisipasi anggaran *bottom-up budgeting* atau penganggaran dari bawah ke atas (BUB). Proses partisipasi secara inheren bersifat politik, di mana partisipasi dikontrol dan didominasi oleh orang-orang elite politik yang mempunyai kekuasaan. Masyarakat dilibatkan dalam partisipasi anggaran dalam bentuk konsultasi, karena program yang diusulkan harus sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat merusak tatanan kehidupan sosial yang mana penerima manfaat hanya orang-orang yang terlibat dalam partisipasi dan masyarakat umum tidak menerima manfaat, sehingga proses ini hanya untuk kepentingan politik (Maravilla and Grayman, 2020).

Peneliti lain, Schneider and Busse (2019) menemukan adakalanya proposal yang diusulkan masyarakat cenderung tidak diterima. Proposal yang diterima hanya untuk tujuan politis. Alasan proposal tidak diberikan karena kurangnya ketersediaan anggaran. Di India, proses penyusunan anggaran tidak terbuka bagi warga negara. Mekanisme formal tidak ada untuk mengundang warga negara berpartisipasi dalam proses penganggaran. Terdapat sejumlah undang-undang dan kebijakan mengenai desentralisasi, proses pembuatan anggaran merupakan kegiatan birokrasi yang rahasia. Gaya penyajian dokumen negara menghalangi masyarakat untuk memahami dokumen tersebut. Legislator tidak memiliki ketrampilan dan informasi yang memungkinkan mereka terlibat dalam wacana kritis mengenai permasalahan tersebut. Akibatnya, eksekutif bertindak sebagai satu-satunya pengambil keputusan yang memutuskan anggaran prioritas. Peran masyarakat menjadi terbatas akibat kurangnya informasi (Mishra, 2014).



partisipasi anggaran di Kroasia, Polandia dan Slowakia ditemukan bahwa partisipasi anggaran memungkinkan alokasi sumber daya publik yang lebih baik

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, masalahnya terletak pada rendahnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat dan relatif rendahnya minat warga untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran. Partisipasi anggaran menimbulkan risiko tertentu terkait penyalahgunaan gagasan karena alasan politik (Džinic *et al.*, 2016).

Praktik ini dilakukan di seluruh dunia termasuk Indonesia, yang dicirikan oleh berbagai definisi dan praktik dalam konteks yang berbeda (Bartocci *et al.*, 2023). Partisipasi anggaran pada konteks Indonesia diwujudkan dalam bentuk forum musyawarah dan perencanaan dan pembangunan (Musrenbang), sejak ditetapkan pada (Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004). Masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran juga telah dijamin dalam (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014), diatur dalam pasal 354. Pasal tersebut mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah (PEMDA) mendorong partisipasi masyarakat dengan membuka ruang transparansi tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan kapasitas masyarakat melalui kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi partisipasi anggaran masih memiliki kelemahan berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya (Hadi dkk., 2022; Cahyono dan Mufidayati, 2021; Lestari dkk., 2021; Sopanah, 2012b; Damayanti and Syarifuddin, 2020; Desriadi, 2018) menemukan bahwa prosesi musrenbang bersifat formalitas atau seremonial yang diikuti oleh kelompok-kelompok tertentu saja seperti kepala desa dan aparatur desa. Masyarakat hanya terlibat dalam penyampaian usul dan an program yang diusulkan satu tahun mendatang, tidak dilibatkan dalam ilan keputusan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa



(RPJMDes) dan Rencana Kinerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dibuat berdasarkan pemikiran desa, pemerintah, kecamatan dan kabupaten tanpa keterlibatan masyarakat (Patty dkk., 2021).

Cahyono dan Mufidayati (2021) menemukan bahwa berdasarkan teori tangga partisipasi menurut Arnstein dan teori Penganggaran Wampler menunjukkan kualitas partisipasi masyarakat desa Sasakpanjang, Kabupaten Bogor ada pada level *placation* dalam *degree of tokenism*. Masyarakat sudah mulai mempunyai pengaruh terhadap kebijakan APBDes, tetapi bersifat artifisial dan belum mampu mengontrol kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Faktor-faktor yang menghambat antara lain, lemahnya institusi pemerintahan desa, ketiadaan leadership, budaya masyarakat dan praktik pendampingan desa yang perlu reorientasi karena masih administratif.

Hadi dkk. (2022) yang meneliti partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Pait Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyusun APBDes, yaitu memberikan pemikiran melalui ide atau pendapat dan kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah desa dalam menyusun APBDes. Faktor Pendukung, yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, sedangkan faktor penghambat adalah tidak semua usulan masyarakat melalui forum musyawarah diakomodir menjadi program.

Lestari dkk. (2021) melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDDes di Desa Pasi Pinang Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat hanya berperan aktif dalam musyawarah, sedangkan dalam pengawasannya masyarakat kurang berpartisipasi aktif karena menilai bahwa tugas dan fungsi pengawasan

diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desriadi (2018), dan Farid (2022) menemukan bahwa peran masyarakat hanya sebatas



pada proses pengusulan program kegiatan saja dan tidak sampai pada proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat tidak memiliki kontrol atas program yang diusulkan.

Lebih lanjut, data menunjukkan ada ratusan kepala desa di Indonesia yang terlibat dalam tindak korupsi yaitu hampir 600 orang kepala desa sejak tahun 2015-2022 dengan dana yang dikeluarkan pemerintah kurang lebih Rp470 miliar. Hal ini terjadi karena partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD maupun dalam perencanaan anggaran masih rendah (detiknews, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan program dan anggaran belum berjalan sesuai tujuannya.

Berbagai fenomena yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa mengadopsi model partisipasi anggaran seperti yang diterapkan di Porto Alegre sulit untuk berhasil tanpa melakukan modifikasi. Ada banyak faktor penghambat praktik partisipasi anggaran diantaranya tiga aktor dalam pembangunan suatu negara atau daerah yaitu: pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Ketiga aktor ini yang berperan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Masing-masing memiliki peran, tanggung jawab dan kemampuan yang diperlukan untuk suatu proses pembangunan yang dinamis dan berkelanjutan.

Faktanya, Meltzer (2021) mengemukakan konflik diantara ketiga aktor ini sering muncul karena ada perbedaan prioritas dan kapasitas antar aktor. Oleh karena itu, diperlukan praktik partisipasi anggaran yang lebih berkualitas dengan melakukan transformasi mendasar dan radikal dalam implementasi partisipasi anggaran.

Paradigma adalah seperangkat keyakinan, asumsi dan nilai-nilai yang membentuk cara pandang terhadap dunia dan memengaruhi bagaimana kita memahami dan bertindak dalam berbagai situasi (Kuhn, 1962:48).



Dalam konteks partisipasi anggaran, paradigma *stakeholder* akan menentukan apakah partisipasi yang dilakukan sesuai dengan tujuannya atau hanya partisipasi semu/partisipasi formalitas. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mendasar adalah transformasi pada aspek paradigmatis.

Fokus penelitian ini adalah merekonstruksi suatu nilai baru yang dapat mendorong perubahan dalam praktik partisipasi anggaran tingkat desa di Indonesia. Sejalan dengan Waheduzzaman and As-Saber (2015) mengemukakan bahwa memasukkan nilai budaya lokal (agama) diharapkan ada perubahan nilai/sikap, maka dipastikan partisipasi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Nilai-nilai tersebut, dapat ditelusuri pada praktik-praktik sosial yang sudah ada (kearifan lokal) dengan mengadopsi pendekatan partisipasi anggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik menyelidiki proses persidangan Gereja Protestan Maluku (GPM). GPM memiliki sejumlah nilai yang dianggap suci (*sacred*) dan tinggi (*transendental*) bagi umat Kristen di Maluku dan Maluku Utara. Hasil penyelidikan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam persidangan gereja akan dijadikan sebagai suatu nilai yang dapat mentransformasi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada level daerah. Khususnya para aktor pembangunan dan masyarakat terkait implementasi partisipasi anggaran (musyawarah desa dan musrenbang).

Studi budaya dan kearifan lokal untuk mengkaji implementasi partisipasi anggaran masih sangat kurang diteliti (Jayasinghe *et al.*, 2020; Uddin *et al.*, 2019). Gereja Protestan Maluku (GPM) merupakan salah satu bentuk dari budaya dan kearifan lokal orang Maluku. Gereja Protestan Maluku ada di Maluku dan Maluku Utara sejak zaman kolonial dan telah berkembang bersama masyarakat setempat



mbawa serta tradisi dan kebiasaan yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam proses

partisipasi anggaran gereja akan dijadikan sebagai nilai yang dapat mentransformasi paradigma. Khususnya bagi para pemangku kepentingan yang ada di desa baik itu pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali nilai-nilai religi yang terkandung dalam GPM dan kemudian nilai-nilai tersebut memperkaya teori tangga partisipasi.

GPM sebagai salah satu lembaga non profit dalam menjalankan misi ALLAH di dunia dimaknai sebagai panggilan dan misi. Tingkatan hierarki GPM dimulai dari jemaat, klasis, sinode. Tiga tingkatan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Proses berjalan bersama dalam menjalankan visi dan misi pelayanan GPM melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gereja. Bentuknya adalah persidangan yang dilakukan pada tiap aras tingkatan jemaat, klasis dan sinode. GPM menggumuli pelayanan untuk melayani jemaat dan mengerjakan keselamatan karena hormat dan takut akan ALLAH (Filipi 2:12).

Peserta persidangan adalah perwakilan dari warga gereja yang sungguh dewasa dalam iman, matang dalam pelayanan dan dengan penuh hikmat mengelola setiap hal dalam persidangan itu. Jadi persidangan bukan hal untuk adu kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang sarat dengan kepentingan untuk memimpin pekerjaan pelayanan gereja. Persidangan itu ALLAH harus diagungkan dan dimuliakan, bukan si A atau si B.

Keputusan yang dihasilkan dalam persidangan harus dipercakapkan secara terbuka, dipertimbangkan secara matang dari segala aspeknya dan dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan teologis alkitabiah dan didoakan secara sungguh-sungguh. Satu keputusan persidangan adalah keputusan r dan strategis yang tidak dibuat begitu saja, melainkan sungguh-berakar dalam kenyataan pergumulan warga jemaat dan dibuat untuk



pembangunan jemaat pula (Teloni, 2011:38). Inilah yang membuat GPM masih ada hingga saat ini, dan alasan inilah peneliti memilih GPM sebagai objek penelitian.

Selain partisipasi anggaran di Gereja Protestan Maluku, penelitian ini juga melihat pada partisipasi anggaran yang terjadi di desa Poka. Desa Poka merupakan desa yang memiliki kekayaan nilai sosial-budaya serta ikatan komunitas yang kuat. Masyarakat desa Poka ini memiliki tradisi gotong royong yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, dimana solidaritas dan kerja sama antar sesama warga sangat diutamakan (Pattikayhattu, 1977).

Hasil pengamatan awal juga menunjukkan bahwa desa Poka memiliki keunikan dibandingkan desa lain. Keunikannya adalah masyarakat desa Poka terdiri dari beragam suku dan agama. Masyarakat di desa Poka terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Budha (Profil Desa Poka, 2024), jika dibandingkan desa-desa yang lain hanya ada satu komunitas tertentu yang bersifat homogen. Selain itu, desa Poka merupakan desa Maju karena merupakan pusat pendidikan terdapat sekolah dasar hingga perguruan tinggi ada di desa ini.

Potensi lain yang dimiliki desa Poka adalah kampung tangguh Nusantara yang dicanangkan pada November 2020 (Titioka, dkk 2021). Dengan potensi sosial-budaya dan keagamaan yang kaya, desa Poka menyediakan lingkungan yang kondusif untuk menerapkan model partisipasi anggaran. Sikap saling peduli dan kebersamaan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini yang memberikan dasar untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Inilah yang mendasari desa Poka sebagai objek dari penelitian ini.



Metode partisipasi anggaran yang dilakukan di GPM, peneliti menggunakan tangga partisipasi (*Ladder of Participation*) sebagai basis teori yang relevan

untuk memetakan tingkat partisipasi anggaran pada lokus penelitian. Teori tangga partisipasi (*Ladder of Participation*) adalah konsep yang menggambarkan berbagai tingkat keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Diperkenalkan oleh Arnstein (1969) teori ini menunjukkan bahwa partisipasi warga bervariasi dari yang sangat terbatas hingga yang sangat kuat, tergantung pada seberapa besar kendali dan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Arnstein membagi tingkat partisipasi menjadi delapan anak tangga, mulai dari *Manipulation* (paling tidak partisipasi) hingga *Citizen Control* (paling partisipasi).

Dalam perkembangannya teori ini mendapat kritikan dari peneliti-peneliti lain karena dianggap terlalu kaku, tidak fleksibel, kurang penekanan pada proses dan hasil, konsep yang statis, tidak mengakui bentuk partisipasi lain (Nabatchi and Amsler 2014; Emelson, *et al.*, 2012; Quick Feldman, 2011; Cornwell, 2008; Ansell and Gash, 2007; Head, 2007; Fung, 2006; McCallum, 2006). Namun, teori tangga partisipasi sampai saat ini merupakan teori yang relevan digunakan untuk menilai tingkat keterlibatan dalam masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks partisipasi anggaran gereja, peneliti menarik makna nilai dari proses tersebut digunakan untuk mengubah paradigma *stakeholder* untuk menghasilkan model partisipasi anggaran,

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagaimana yang dijelaskan di atas peneliti menggunakan paradigma religi. Pendekatan religi menganggap agama bukan hanya sebagai sistim kepercayaan, akan tetapi sebagai kekuatan budaya yang membentuk perilaku dan pandangan hidup seseorang. Menurut Smith (2009) agama berperan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik-praktik keagamaan yang aktif membentuk pola pikir dan tindakan sosial. Agama

kan kebiasaan serta orientasi hidup yang didasarkan pada nilai-nilai



keagamaan yang dapat membimbing dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama.

Fowler. (1981) telah menyatakan bahwa kepercayaan religi tumbuh melalui beberapa tahap yang memengaruhi cara pandang individu memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Setiap tahap perkembangan iman membimbing individu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keterlibatan sosial dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Dengan begitu, paradigma religi menggabungkan aspek teologis dan sosial untuk mengarahkan komunitas untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama.

1.2 Fokus Penelitian

Implementasi partisipasi anggaran masih menjadi isu penelitian yang menarik untuk diteliti terutama di Indonesia. Praktik partisipasi anggaran seperti yang dijelaskan pada bagian pendahuluan belum diimplementasikan sesuai dengan tujuannya. Banyak faktor dan kendala yang mengakibatkan partisipasi anggaran belum dilakukan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggali nilai-nilai religi (agama) sebagai nilai pendorong praktik partisipasi anggaran.

Gereja Protestan Maluku sebagai lembaga keagamaan dalam menjalankan visi misi pelayanan melakukan perencanaan melalui persidangan baik ditingkat jemaat, klasis dan sinode melibatkan jemaat/umat. Dalam proses tersebut ada sejumlah nilai yang dianggap suci (*sacred*) dan tinggi (*transendental*) yang digunakan hingga saat ini.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan menemukan nilai-nilai religi yang n sebagai nilai-nilai yang digunakan untuk menjadi motor penggerak si anggaran. Selain itu, desa Poka memiliki potensi dalam hal sosial-



budaya dan keagamaan yang kaya, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan nilai-nilai religi yang diimplementasikan dalam partisipasi anggaran.

Nilai-nilai religi yang ditemukan akan digunakan sebagai model partisipasi anggaran berbasis nilai-nilai religi yang dapat melengkapi atau memperkaya teori tangga partisipasi. Dengan model tersebut dapat menghasilkan pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks lokal.

Berdasarkan uraian fokus penelitian, maka rumusan pertanyaan penelitian adalah: “Bagaimana konstruksi model partisipasi anggaran dengan menginternalisasi nilai-nilai religi”. Pertanyaan penelitian ini kemudian dipecah menjadi beberapa pertanyaan penelitian pendukung berikut ini.

1. Bagaimana implementasi partisipasi anggaran di Gereja Protestan Maluku (GPM)?
2. Bagaimana implementasi partisipasi anggaran desa di desa Poka?
3. Nilai apa yang terkandung dalam partisipasi anggaran di GPM dan Desa Poka?
4. Bagaimana konstruksi baru model partisipasi berbasis nilai-nilai religi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menggali implementasi partisipasi anggaran Gereja Protestan Maluku (GPM).
2. Untuk menggali implementasi partisipasi anggaran di Desa Poka.
3. Untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam partisipasi anggaran di Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Desa Poka.



4. Untuk membuat konstruksi baru model partisipasi anggaran berdasarkan nilai-nilai religi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Kegunaan secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya literatur akuntansi manajemen sektor publik dengan menambahkan perspektif religius dalam konstruksi partisipasi anggaran. Temuan ini diharapkan dapat memberikan alternatif pendekatan dalam praktik akuntansi manajemen sektor publik dan berpotensi menjadi model partisipasi anggaran yang aplikatif di tingkat desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis adalah memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan alokasi anggaran. Model ini didesain untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan hingga pengambilan keputusan bersama, sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi disajikan dalam dua belas bab. Bab satu menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta sistematika penulisan. Bab dua berisi tentang teori yang digunakan. Bab tiga membahas metode penelitian. Bab empat menjelaskan praktik partisipasi

di Gereja Protestan Maluku dan Desa Poka. Bab lima tentang Kasih dari f teologi. Bab enam tentang kontribusi. Bab tujuh tentang akuntabilitas.



Bab delapan tentang sinergi. Bab sembilan membahas inklusi dan kohesi sosial. Bab sepuluh membahas harapan dalam bentuk indeks kebahagiaan dan pembangunan yang berkelanjutan. Bab sebelas tentang model KASIH dalam partisipasi anggaran. Terakhir bab dua belas yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan dan saran penutup.



BAB II

MENAIKI TANGGA PARTISIPASI: INSPIRASI DARI PORTO ALEGRE UNTUK PARTISIPASI ANGGARAN DESA

2.1 Pengantar

Partisipasi anggaran merupakan salah satu bentuk reformasi yang telah banyak dipraktikkan oleh pemerintah daerah di berbagai negara di dunia sejak dipraktikkan di Porto Alegre pada tahun 1989 (Baiocchi and Ganuza, 2014; Uddin *et al.*, 2017). Salah satu alasan dipraktikkannya didorong dan didasarkan atas prinsip kesetaraan, akses, partisipasi masyarakat, keadilan, pendidikan dan transparansi (Pinnington, *et al.*, 2009; Barbera *et al.*, 2016).

Partisipasi anggaran bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat untuk memenuhi tuntutan masyarakat di seluruh dunia yang semakin meningkat akan transparansi dan partisipasi politik dalam urusan keuangan (Zepic *et al.*, 2017). Partisipasi anggaran adalah proses pengambilan keputusan kelompok di mana warga mendistribusikan sumber daya publik di antara serangkaian proposal investasi kota. Partisipasi anggaran sangat bermanfaat bagi banyak pihak karena: memungkinkan masyarakat membentuk lokal anggaran, pemerintah kota mendapatkan informasi yang jelas tentang prioritas sosial, hal ini membantu untuk mengintegrasikan komunitas lokal dan memotivasi mereka untuk bekerja sama (Walczak and Rutkowska, 2017).

Dampaknya juga terhadap langkah-langkah tata kelola seperti akuntabilitas, transparansi, dan daya tanggap dalam program-program pembangunan. Masyarakat cenderung merasa puas jika menjadi bagian dari keseluruhan proses tata kelola yang melibatkan segala urusan tata kelola yang



berkaitan dengan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses tata kelola membantu meningkatkan kualitas proses di berbagai program pembangunan tingkat lokal (Waheduzzaman and As-Saber, 2015).

Pentingnya partisipasi anggaran diadopsi juga oleh Indonesia dalam bentuk yang berbeda. Partisipasi anggaran desa khususnya menjadi sangat penting karena desa merupakan unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Melalui partisipasi ini, warga desa dapat secara langsung berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, tetapi juga memastikan bahwa anggaran desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Proses partisipasi anggaran desa melibatkan musyawarah desa, di mana berbagai pihak berkumpul untuk mendiskusikan dan memutuskan prioritas anggaran.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan oleh Arnstein (1969) memberikan kerangka konseptual teori tangga partisipasi untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat. Dari tingkat paling bawah, partisipasi bersifat simbolis atau manipulatif, di mana masyarakat tidak memiliki kuasa nyata dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya pada tingkat tertinggi, masyarakat memiliki kendali penuh dan secara aktif menentukan kebijakan dan keputusan.

2.2 Porto Alegre: Inspirasi Global untuk Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran di Brasil, khususnya di Porto Alegre, muncul pada akhir tahun 1980-an sebagai respons terhadap kondisi sosial dan politik yang unik.

Dengan kesenjangan pendapatan yang tinggi dan praktik korupsi yang merajalela sistem pemerintahan, partisipasi anggaran menjadi alat untuk melayani masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan



anggaran publik. Partisipasi anggaran di Porto Alegre diperkenalkan, setelah kemenangan Partai Buruh (*Partido dos Trabalhadores*, PT). Tahun 1988. PT, yang berasal dari gerakan serikat buruh berusaha untuk menerjemahkan ide-ide demokrasi akar rumput ke dalam praktik pemerintahan. Dalam konteks ini, masyarakat sipil berperan aktif dalam mendorong peningkatan kapasitas pengambilan keputusan, menciptakan kombinasi antara proses *top-down* dari pemerintah dan *bottom-up* dari masyarakat. Partisipasi anggaran di Porto Alegre telah membawa perubahan signifikan dalam alokasi sumber daya, dengan fokus pada peningkatan layanan bagi masyarakat miskin. Beberapa pencapaian utama meliputi:

- **Pembangunan Infrastruktur:** Jalan, sekolah, dan taman kanak-kanak dibangun di daerah yang sebelumnya terabaikan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
- **Akses terhadap Layanan Kesehatan:** Masyarakat, terutama yang kurang beruntung, mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur air bersih.
- **Redistribusi Sumber Daya:** Proses partisipasi anggaran memungkinkan terdistribusi sumber daya yang lebih adil, dengan investasi yang lebih besar diarahkan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan.

Partisipasi anggaran juga berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan bagi masyarakat sipil. Dalam satu dekade, semakin banyak warga yang terlibat dalam inisiatif dan asosiasi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini mengurangi praktik klientelisme yang mendominasi politik Brasil sebelumnya, dengan menggantikan negosiasi tertutup dengan proses yang lebih demokratis dan

in. Meskipun partisipasi anggaran telah menunjukkan banyak ilan, tantangan tetap ada, terutama setelah PT kehilangan kekuasaan



pada tahun 2004. Meskipun prosedur partisipasi anggaran tetap ada, cakupannya mengalami pengurangan. Namun, penguatan masyarakat sipil dan kombinasi kemauan politik yang pragmatis dari pemerintah daerah tetap menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan proses ini.

Partisipasi anggaran di Porto Alegre telah menjadi model inovatif bagi kota-kota lain, menunjukkan bahwa kombinasi antara partisipasi masyarakat dan kemauan politik dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan, pencapaian yang diraih menunjukkan potensi besar dari partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Dalam konteks yang sangat unik ini, telah ditemukan sebuah model prosedural yang dari tahun ke tahun, dianggap sumber inspirasi yang di adopsi oleh berbagai negara seperti Eropa, Amerika Selatan, Asia, Amerika Utara dan Selandia baru yaitu partisipasi anggaran. Praktik partisipasi anggaran pun disesuaikan dengan negara-negara yang mengadopsinya.

Partisipasi anggaran adalah satu mekanisme dari pemerintah daerah/kota yang mengikutsertakan masyarakat lokal kedalam proses pengambilan keputusan seputar anggaran publik (Hall, 2005). Pada prinsipnya dalam partisipasi anggaran, masyarakat yang memutuskan bagaimana anggaran publik dari pemerintah daerah akan digunakan dalam belanja publik (Naben, 2023). Tujuannya adalah divestasi atau pelepasan beberapa kekuasaan pengambilan keputusan anggaran yang berada dibawah kendali pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab terhadap alokasi anggaran. Pengambilan keputusan ini diberikan kepada masyarakat untuk mendiskusikan dan merencanakan

an anggaran publik tersebut.



Partisipasi anggaran didefinisikan sebagai proses demokrasi langsung, sukarela dan universal, sebuah proses di mana warga negara bertemu secara terbuka dan berkumpul untuk memutuskan investasi mana yang paling penting bagi mereka secara lokal dan bagi negara secara keseluruhan (Zepic *et al.*, 2017). Sintomer *et al.* (2008) mendefenisikan partisipasi anggaran adalah suatu proses di mana warga negara yang bukan bagian dari pemerintah dapat ikut serta dalam perencanaan dan alokasi anggaran publik. Untuk lebih memahami proses ini ada empat kriteria yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pembahasan anggaran/keuangan: partisipasi anggaran harus didiskusikan tentang masalah keuangan dan anggaran, karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang terbatas.
2. Tingkat pemerintah daerah: proses ini melibatkan pemerintah kota atau daerah yang memiliki kekuasaan administratif. Partisipasi lingkungan saja tidak cukup.
3. Musyawarah Publik: proses ini harus mencakup musyawarah publik dalam pertemuan atau forum tertentu. Hanya membuka pertemuan administratif atau pertemuan lembaga perwakilan biasa bukanlah penganggaran partisipatif.
4. Akuntabilitas: Hasil dari proses ini harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan memahami empat kriteria ini, kita dapat mengetahui bahwa partisipasi anggaran adalah cara untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan. Partisipasi anggaran membuka ruang terbuka untuk berpartisipasi, kerja sama dan dialog dalam merumuskan berbagai kebijakan publik. Kebijakan publik diambil harus berdasarkan pada kebutuhan riil masyarakat. Semua aktor yang terlibat

sinergi untuk memperjuangkan kepentingan bersama.



2.3 Mengenal Partisipasi Anggaran ala Indonesia

Era reformasi di Indonesia menandai adanya perbaikan signifikan dalam berbagai aspek pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembangunan yang sebelumnya terpusat pada pemerintah pusat (sentralistik) mulai bergeser menuju sistem desentralisasi, yang berfokus pada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Kebijakan desentralisasi pada era reformasi ini menjadikan masyarakat sebagai pilar utama dalam pemerintahan daerah.

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada masyarakat sebagai subjek pembangunan untuk mengatur dan menyelesaikan urusan pemerintah sesuai dengan aspirasi masyarakat sendiri. Kewenangan ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi elemen krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya desentralisasi, masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat ini merupakan implementasi nyata dari sistem pemerintahan demokrasi yang mengedepankan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Naben, 2023; Adeliya, 2017).

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, partisipasi masyarakat merupakan nilai yang dihormati. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang perencanaan pembangunan dengan semangat desentralisasi. Pemerintah mendefinisikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dan salah satu tujuan dari sistem perencanaan pembangunan



nasional tersebut adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat, perencanaan ini harus dimulai dari level terbawah pemerintahan yakni tingkat desa atau kelurahan.

Partisipasi masyarakat menjadi instrumen kontrol sosial yang digunakan masyarakat untuk memantau proses penganggaran dan partisipasi anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah (Sopanah *et al.*, 2023c). Proses perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang saling terkait dan harus seimbang. Sebagai alat manajemen, maka perencanaan harus mampu menjadi panduan strategis dalam wujudkan tujuan yang akan dicapai. Keduanya merupakan hal yang diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah yang efisien dan efektif. Hasil yang baik akan dicapai apabila keduanya diberikan perhatian yang seimbang. Langkah berikutnya penganggaran mendikte proses perencanaan dan perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana (Kementerian Keuangan RI, 2010).

Tahap perencanaan dan penganggaran dimulai dengan pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dengan siklus pengelolaan keuangan yang lainnya. Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun terdiri dari dua yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, implementasi tata kelola keuangan yang baik dapat dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat. Perencanaan desa yang dituangkan dalam RPJM dan RKP dilakukan melalui tahapan musyawarah desa (Musdes). Dalam tahapan ini,

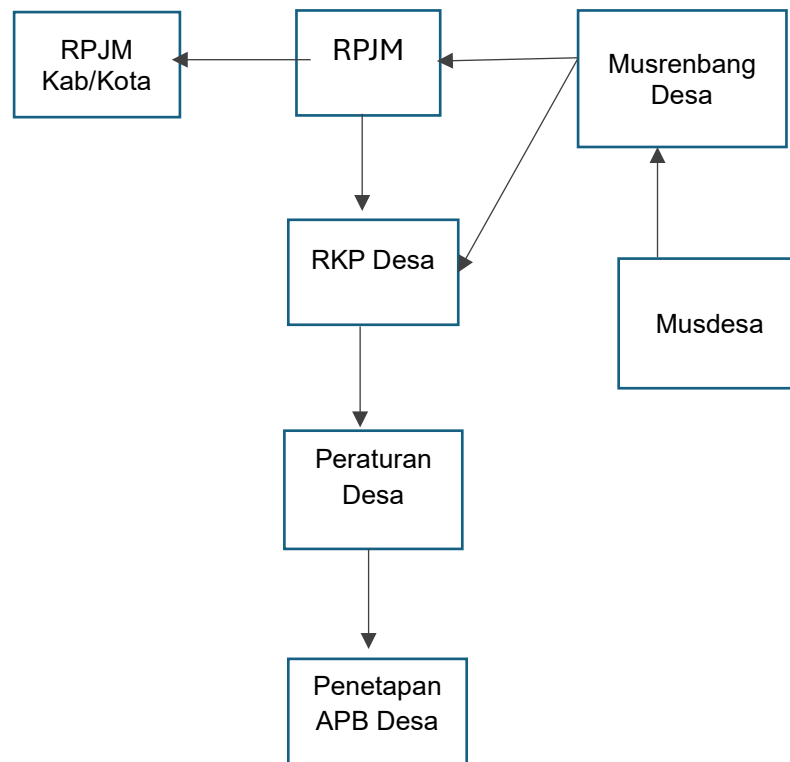


ah desa menampung aspirasi masyarakat mengenai apa saja kebutuhan cat dan yang menjadi prioritas dari kebutuhan tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan tahapan perencanaan dan penganggaran karena masyarakatlah yang paham mengenai kebutuhannya (SriRejeki, 2015). Partisipasi masyarakat sangat penting, karena hasil akhir dan tujuan dari Pembangunan desa adalah untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran juga meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah desa dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan desa. Kebutuhan desa sangat beragam akan dapat dipetakan dengan baik oleh pemerintah desa dengan menjaring aspirasi dari masyarakat. Dalam perencanaan terdapat pula unsur penganggaran.

Menurut Garrison *et al.* (2007) penganggaran adalah rencana terperinci mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama satu periode tertentu. Dalam konteks keuangan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja (APB) Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan setuju bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam pengertian tersebut maka partisipasi masyarakat menjadi syarat dalam penyusunan penganggaran atau dengan kata lain masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran. Secara skematis proses perencanaan dan penganggaran Desa ditunjukkan pada Gambar 2.3





Sumber: SriRejeki, (2015)

Gambar 2.1 Proses Perencanaan dan Penganggaran Desa

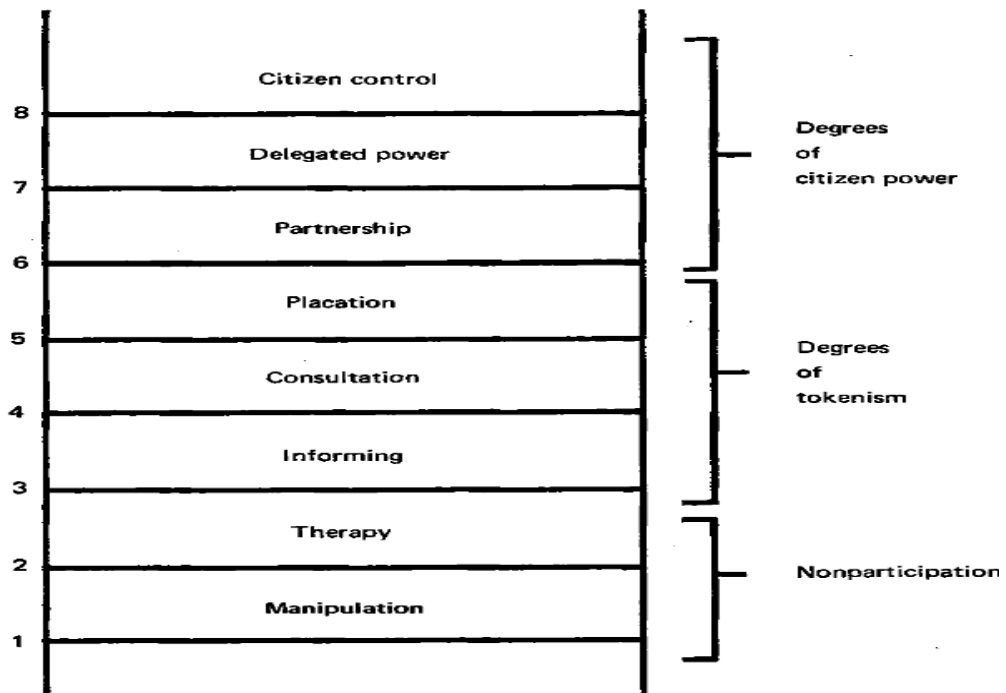
2.4 Teori Tangga Partisipasi (*A Ladder of Citizen Participation*)

Teori tangga partisipasi (*A Ladder of Citizen Participation*) yang diperkenalkan oleh Arnstein (1969). Makalahnya menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam seluruh proses kegiatan yang dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan.



Arnstein (1969) mendefinisikan strategi partisipasi yang didasarkan pada kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintah

(agency). Dengan pernyataan tersebut bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*), di mana terdapat delapan tangga partisipasi yang setiap tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda yang didasarkan pada distribusi kekuasaan.



Sumber: Arnstein, (1969)

Gambar 2.2 Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat (*Eight Rungs on a Ladder of Citizen Participation*)

Delapan Tingkatan Partisipasi terdiri dari :

1. Tingkatan pertama adalah manipulasi (*manipulation*). Tingkatan ini merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja, untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik

kipun tidak pernah terwujud.



2. Tingkatan kedua adalah terapi (*therapy*). Tingkatan ini, pemegang kekuasaan berpura-pura melibatkan masyarakat. Inisiatif dan pengambilan keputusan sepenuhnya ditangan pemegang kekuasaan.
3. Tingkatan ketiga adalah penginformasian (*Information*), pada tingkatan ini pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat tetapi hanya masih satu arah, tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk melakukan tukar pendapat ataupun diskusi.
4. Tingkatan keempat adalah konsultasi (*consultation*), pada level ini terjadi komunikasi dua arah, namun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang diutarakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
5. Tingkatan kelima penentruman (*placation*), pada level ini pemegang kekuasaan menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat untuk menjadi anggota suatu organisasi publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan.
6. Tingkatan keenam kemitraan (*partnership*), masyarakat bersama-sama pemegang kekuasaan berdiskusi untuk pengambilan keputusan atau masyarakat menjadi mitra dengan pemegang kekuasaan (pemerintah).
7. Tingkatan ketujuh pendelegasian kewenangan/kekuasaan (*delegated power*), pada level ini pemerintah memberikan kewenangan/kuasa untuk masyarakat dalam membuat keputusan tertentu.
8. Tingkatan kedelapan pengendalian masyarakat (*citizen control*), pada level ini masyarakat berpartisipasi dalam seluruh kegiatan dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Masyarakat ikut berkontribusi dalam kegiatan atau program yang dimulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi.



iga partisipasi Arnstein, maka dapat digolongkan tiga model partisipasi berikut:

1. Model Nonpartisipasi di mana suatu kondisi yang menunjukkan tidak ada partisipasi yang dilihat pada tangga pertama manipulasi (*manipulation*) dan tangga kedua terapi (*therapy*). Keadaan tidak ada partisipasi masyarakat tidak paham dan tidak mengetahui suatu tindakan sosial tertentu.
2. Model partisipasi semu atau sekedarnya (*tokenism*), model ini dapat diartikan sebagai kebijakan seadanya atau semu. Tujuannya hanya untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga program atau kegiatannya telah dilaksanakan. Model ini ada pada tangga ketiga menginformasikan (*information*), tangga keempat konsultasi (*consultation*) dan tangga kelima penentruman (*placation*).
3. Model partisipasi *citizen control*, model ini menunjukkan bahwa ada perubahan di mana masyarakat memahami, memiliki kesadaran untuk ikut terlibat melakukan, memengaruhi dan berproses dalam pengambilan keputusan. Ini ada pada tangga keenam kemitraan (*partnership*), tangga ketujuh pendelegasian wewenang/kekuasaan (*delegated power*) dan tangga kedelapan pengendalian masyarakat (*citizen control*).

Teori Partisipasi Anggaran memiliki keterbatasan, terdapat beberapa kritik yang disampaikan oleh pakar. Pertama, kritik menyangkut delapan tipologi partisipasi yang dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas ragam partisipasi publik. Hal ini juga diakui oleh Arnstein sendiri bahwa masih dimungkinkan adanya tipologi lain di antara anak tangga yang ada, baik yang memiliki perbedaan tajam maupun halus. Meskipun demikian, teori tangga partisipasi ini tetap bermanfaat sebagai titik awal yang sangat membantu sekaligus memicu perkembangan teori dan praktik partisipasi publik.



kedua, kritik yang dikemukakan oleh Burns *et al.* (1994) yang mengklaim bahwa tangga partisipasi Arnstein ini tidak cocok digunakan

dalam analisis bagi pemerintahan daerah. Tangga partisipasi tersebut terpusat pada analisis hubungan antara warga dengan program pemerintah tertentu. Hal ini dapat dipahami karena referensi Arnstein adalah tiga program kesejahteraan sosial pemerintah federal Amerika Serikat yang berkaitan dengan pembaruan perkotaan, anti kemiskinan dan kota percontohan.

Ketiga, Tritter and McCallum (2006) mengemukakan kritiknya bahwa teori tangga partisipasi terlalu sederhana dan lurus dalam menguraikan proses partisipasi, dan mengabaikan konteks sosial, politik dan budaya yang mendorong partisipasi masyarakat. Teori ini pendekatannya lebih kepada *top-down* di mana kekuasaan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dan kurang responsif dan adaptasi selama proses partisipasi.

Keempat, Collin and Ison (2009) juga mengatakan bahwa teori tangga partisipasi lebih kompleks dan tidak selalu dapat disederhanakan ke dalam urutan hierarkis. Model ini juga tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai konteks dan situasi partisipasi yang berbeda. Partisipasi juga tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir tetapi juga sebagai proses pembelajaran bersama di mana semua pihak dapat berkembang dan berubah.

Kelima, Fung (2006) menyoroti bahwa ada banyak bentuk partisipasi yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki nilai dan peran yang unik dalam proses pemerintahan, model Arnstein terlalu sederhana untuk menangkap ragam bentuk partisipasi ini. Tujuan partisipasi warga dapat bervariasi termasuk meningkatkan kualitas keputusan, membangun kepercayaan, meningkatkan legitimasi atau memberdayakan warga. Model Arnstein tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai tujuan partisipasi, karena terlalu fokus pada tan level partisipasi sebagai tujuan utama



Keenam, Cornwall (2008) juga menyoroti hal yang sama seperti tangga partisipasi struktur yang kaku tidak fleksibel kurang fleksibel dan adaptasi terhadap perubahan. Hal ini juga diungkapkan oleh Head (2007) bahwa model ini cenderung melihat partisipasi hanya dari satu perspektif yaitu kontrol warga. Tangga partisipasi menunjukkan bahwa partisipasi memiliki banyak bentuk dan makna yang berbeda tergantung pada konteks, tujuan dan pelaku yang terlibat (Cornwall, 2008; Head, 2007).

Peneliti menemukan bahwa teori tangga partisipasi tidak dapat dilihat dari satu sisi saja yaitu kontrol warga tetapi membutuhkan suatu kerja bersama-sama antara pemerintah dalam hal ini pemerintah desa, *stakeholder* serta masyarakat. Masyarakat harus melakukan kontrol terhadap proses partisipasi tetapi butuh sinergi. Sinergi tersebut terjadi bukan hanya satu orang tetapi ada interaksi sekelompok orang yang saling menerima, mendengar, berdebat dan proses untuk menghasilkan suatu kemufakatan yang menjadi keputusan bersama yang dikerjakan secara bersama-sama pula. Teori ini tidak mengakui berbagai bentuk partisipasi yang mungkin tidak sesuai dengan kategorisasi tangga. Misalnya partisipasi yang berbasis komunitas atau pertemuan-pertemuan informal sering kali diabaikan.

Teori tangga partisipasi Arnstein sebagai salah satu alat analisis untuk memahami partisipasi warga dan bukan sebagai satu-satunya cara untuk memahami partisipasi warga. Teori ini terlalu kaku dan statis tetapi harus lebih fleksibel sesuai dengan kenyataan di lapangan. Untuk itu partisipasi harus dipahami secara holistik dengan mempertimbangkan variasi dan nuansa yang ada dalam praktik-praktik partisipasi di lapangan.



2.5 Refleksi

Keberhasilan model partisipasi anggaran di Porto Alegre menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, saat model ini diadopsi di negara lain, termasuk Indonesia ada berbagai tantangan yang harus di hadapi. Tantangan tersebut meliputi perbedaan kultur politik, kapasitas institusi, serta tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat.

Salah satu pelajaran penting adalah bahwa model partisipasi yang sukses di satu tempat memerlukan adaptasi ketika diterapkan di tempat lain. Di Indonesia misalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Musyawarah Desa (Musdes) harus disesuaikan dengan struktur sosial dan politik lokal. Implementasi partisipasi anggaran di Indonesia memerlukan pendekatan yang memperhitungkan keberagaman budaya, geografis dan tingkat masyarakat yang berbeda-beda.

Keberhasilan partisipasi anggaran bergantung pada komitmen pemerintah untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Ini mencakup kesiapan untuk mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran. Disisi lain, masyarakat juga perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif.

Mekanisme pengawasan dan evaluasi sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa partisipasi anggaran berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi terus menerus terhadap proses dan hasil partisipasi anggaran dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan.

Asia, evaluasi terhadap musrenbang dan musdes dapat dilakukan untuk memastikan bahwa proses tersebut benar-benar inklusif dan memberikan manfaat



nyata bagi masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari riset-riset yang dilakukan untuk memberikan masukan dalam upaya perbaikan proses partisipasi anggaran.

Teori tangga partisipasi Arnstein yang diterapkan, dapat digunakan untuk menilai kedalaman partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran di Indonesia. Model partisipasi anggaran yang lebih tinggi, seperti yang dicapai di Porto Alegre menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kontrol yang signifikan atas keputusan anggaran yang berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Indonesia, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan memastikan partisipasi yang lebih bermakna. Evaluasi berkelanjutan dan adaptasi model partisipasi yang sesuai dengan konteks lokal dapat membantu mencapai tujuan ini dan memperkuat demokrasi di Indonesia.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Partisipasi anggaran merupakan salah satu topik penelitian dalam ranah studi kebijakan publik pada beberapa dekade terakhir, terutama dalam bidang ilmu manajemen akuntansi publik. Penelitian dengan topik ini telah diteliti dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif pada umumnya mengukur implementasi partisipasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dan kinerja daerah (Goncalves, 2014). Sebaliknya penggunaan metode kualitatif lebih mendalami praktik partisipasi anggaran dengan menyelidiki peran aktor-aktor yang terlibat langsung dalam praktik partisipasi anggaran (Goddard, 2004).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran yang lebih mendalam mengenai fenomena. Penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah, yang berarti peneliti tidak membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman pribadi. Melainkan mengamati, observasi dengan mendalam setiap informasi yang diperoleh dari informan. Baik itu informasi yang disampaikan secara verbal, non-verbal (gestur tubuh), dokumen-dokumen dan memperhatikan lingkungan dan konteks sosial yang memengaruhi informan (Creswell, 2014).

Peneliti adalah instrumen kunci dari metode penelitian kualitatif, untuk itu peneliti perlu memiliki pengetahuan, pemahaman akan fenomena yang diteliti.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap fenomena diperoleh dari kajian literatur (sebelumnya) dan menguasai teori yang sesuai dengan penelitian untuk sebagai alat analisis. Selain itu, peneliti harus memiliki kemampuan



merumuskan persoalan penelitian, analisis data dan membangun kerangka penelitian untuk memperoleh gambaran sehingga menghasilkan penelitian yang berkualitas.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti, dimana ada nilai di balik informasi yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda (Abdussamad, 2021).

3.2 Paradigma Religi

Penelitian ini menggunakan paradigma religi untuk melihat peran agama sebagai panduan nilai dan etika yang membentuk perilaku serta pandangan hidup individu maupun komunitas dalam konteks sosial (Weber, 1930). Paradigma ini, agama dianggap tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi sebagai kekuatan budaya yang mengarahkan tindakan sosial dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai spiritual.

Menurut Smith (2009) agama menyediakan kerangka moral yang aktif membentuk pola pikir dan perilaku sosial individu. Dalam konteks partisipasi masyarakat, paradigma religi dapat memperkuat komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan keadilan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap bagaimana nilai-nilai religius diterapkan dalam praktik partisipasi yang inklusif dan berorientasi pada kebaikan bersama (Fowler, 1981).



3.3 Epistemologi Kristen

Penelitian ini menggunakan pendekatan epistemologi. Epistemologi adalah kajian filosofis yang merupakan telaah kritis dan analitis tentang dasar-dasar teori pengetahuan. Sebagai cabang ilmu filsafat, epistemologi mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakikat pengetahuan manusia, darimana sumber pengetahuan, serta batasan-batasan pengetahuan manusia. Epistemologi juga bermaksud mengkritisi asumsi-asumsi dan syarat-syarat kelogisan yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan. Selain itu, memberi pertanggung jawaban yang rasional terhadap klaim kebenaran. Untuk itu, Epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif dan kritis (Sudarminta, 2002).

Dalam kaitan dengan epistemologi kristen adalah bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Yang harus bersumber dari wahyu ALLAH itu sendiri yaitu Alkitab. Alkitab bukanlah buku yang turun dari langit kepada manusia, Alkitab ditulis oleh banyak penulis berbeda dengan jangka waktu yang berbeda. Meskipun begitu, Alkitab tidak memiliki kontradiksi satu sama lain. Hal ini disebabkan karena penulisan Alkitab diinspirasi oleh Allah sendiri. Allah adalah benar, berotoritas dan sumber segala pengetahuan, maka Ia juga akan menyatakan diri-Nya didalam suatu yang benar, berotoritas dan pernyataan diri-Nya didalam sesuatu itu juga menjadi sumber pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan (Amsal 1:7a).

Alkitab merupakan solusi bagi pandangan humanistik yang diekspresikan sepanjang sejarah barat. Kekristenan menawarkan suatu cara berpikir yang berbeda dengan memakai suatu pendekatan theistik (pendekatan kepada Tuhan) tentang realitas yang diajarkan oleh Alkitab (Hoffecker, 2010). Kekristenan

, seluruh pengetahuan manusia baik terhadap realitas di dunia maupun metafisik bersumber dari Alkitab.



Alkitab memuat secara menyeluruh semua dasar dari aktivitas yang ada didunia ini dari penciptaan hingga pada akhir dunia. Juga memuat tentang kemungkinan pengetahuan manusia akan Allah tentang sifat dan karya-Nya yang dinyatakan dalam dunia. Alkitab berbicara tentang ratusan tema yang kontroversial secara harmonis dan konsisten (McDowell, 2002). Dengan mengklaim Alkitab adalah Firman ALLAH, orang Kristen memaksudkan bahwa ALLAH bukan hanya menyatakan kebenaran tertentu atau partial tentang diri-Nya saja tetapi Ia juga menginterpretasikan isi pernyataan-Nya bagi manusia sehingga manusia mampu memahaminya. (Lase,Purba,2020).

3.4 Kehadiran Peneliti

Ciri utama penelitian kualitatif adalah keterlibatan peneliti dalam proses penelitian dengan cara turun di lapangan. Peneliti berfungsi sebagai instrumen penelitian, yang meliputi fungsi pewawancara, pengumpul, penganalisis, penyajian data dan penyusun laporan penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian .

Dalam konteks tersebut, peneliti melakukan penelitian kurang lebih tujuh bulan hal ini karena peneliti turut ikut dalam proses persidangan yang dilakukan pada baik tingkat jemaat, klasis dan sinode. Kehadiran peneliti dalam proses persidangan, selain sebagai peserta, peneliti juga mengamati secara langsung proses persidangan dan melakukan wawancara dengan peserta sidang.

3.5 Lokus Penelitian



Lokus penelitian dilaksanakan di Gereja Protestan Maluku, Klasis Kota
Subjek penelitian terdiri dari dua pihak, yaitu Gereja Protestan Maluku

(GPM) dan Pemerintah Desa Poka Kota Ambon. Sementara itu, objek penelitian terdiri dari dua objek berdasarkan subjek penelitian. Objek penelitian pertama adalah partisipasi warga gereja dalam perencanaan dan penyusunan program dan anggaran Gereja Protestan Maluku, dan objek penelitian kedua adalah partisipasi anggaran dalam musyawarah desa dan musyawarah perencanaan (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Alasan pemilihan Gereja Protestan Maluku (GPM). GPM merupakan gereja yang ada hanya di provinsi Maluku dan Maluku Utara. GPM melakukan praktik penyusunan, pembahasan dan penetapan program dan anggaran pendapatan dan belanja Gereja. GPM menggunakan nilai-nilai religi dalam proses partisipasi anggaran. Nilai-nilai religi ini, yang oleh peneliti tertarik untuk melakukan penggalian lebih dalam mengenai nilai-nilai religi tersebut.

Selanjutnya, Desa Poka merupakan desa yang berada dibagian barat Pulau Ambon, yang berada di tepi teluk yang indah dan mudah dijangkau. Desa Poka dikenal dengan kerukunan antarwarga yang tinggi meskipun memiliki keberagaman etnis dan agama (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha). Dengan potensi sosial-budaya dan keagamaan yang kaya, desa Poka menyediakan lingkungan yang kondusif untuk menerapkan model partisipasi anggaran.

3.6 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian kualitatif berupa kata-kata yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan atau dari perilaku yang diamati (Taylor, 1992). Patton (2002) menguraikan secara komprehensif bahwa sumber data dari penelitian dapat berupa orang (informan), peristiwa (aktivitas), tempat (lokasi) dan (arsip).



Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung secara langsung dari observasi dan wawancara. Dan juga dari data sekunder berupa dokumen-dokumen. Pemilihan informan dalam penelitian adalah orang yang dianggap memahami secara mendalam mengenai situasi sosial objek penelitian dan mampu memberikan informasi yang diperlukan. adalah informan yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian. Informan penelitian dari GPM adalah Ketua Sinode, Sekertaris, Majelis Pekerja Sinode, Bendahara, Kepala Bagian Perencanaan Sinode, Pendeta Jemaat, dan anggota Jemaat (peserta sidang). Desa Poka adalah kepala desa Poka, sekretaris desa, masyarakat dan lembaga sosial masyarakat (LSM).

Pengumpulan data selain wawancara, peneliti juga mendapatkan data dari dokumen aturan gereja dan pengamatan langsung dalam proses persidangan baik tingkat jemaat, klasis dan Sinode. Peneliti tidak ikut menyaksikan langsung musdes dan musrenbang, namun data terkait proses musdes dan musrenbang yang diperoleh dari responden, dokumen dan dokumentasi dianggap memadai untuk menjadi temuan penelitian.

3.7 Analisis Data

Analisa data dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Tahapan analisis data meliputi deskripsi temuan, pemaknaan dan konstruksi.

3.7.1 Deskripsi Fakta Lapangan



Kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah dan susun hal-hal pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. yang dilakukan diantaranya: pertama, mencari, mengumpulkan data

mengenai praktik partisipasi anggaran di GPM dan desa Poka. Hal ini mencakup wawancara dengan pemimpin gereja, anggota jemaat, pemerintah desa, masyarakat dan lembaga sosial masyarakat untuk memahami bagaimana nilai-nilai religi diimplementasikan dalam setiap konteks. Fakta-fakta ini memberikan gambaran awal mengenai bagaimana partisipasi anggaran berjalan dan apakah terdapat indikasi nilai-nilai religius yang tercermin dalam praktik tersebut.

3.7.2 Pemaknaan

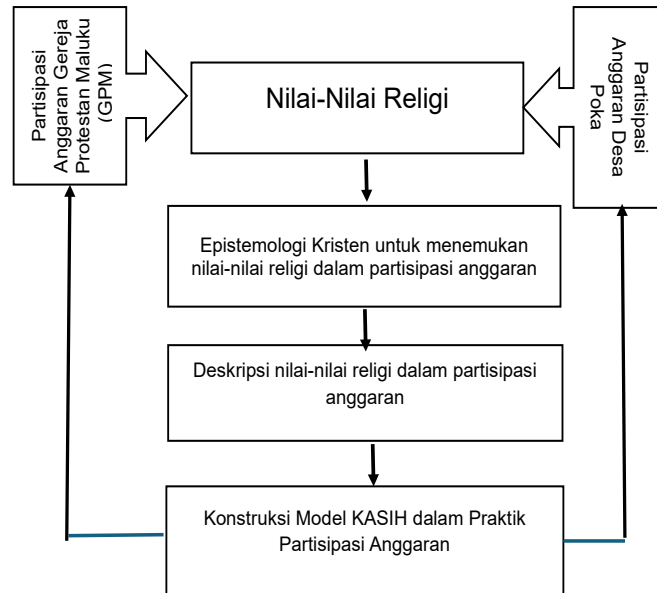
Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan epistemologi Kristen untuk menemukan nilai-nilai religius yang melekat dalam partisipasi anggaran. Tahap ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Alkitabiah, seperti Kasih terwujud dalam praktik anggaran gereja dan desa.

3.7.3 Kontruksi

Hasil akhir dari analisis ini adalah konstruksi Model KASIH dalam praktik partisipasi anggaran yang dilakukan di Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Desa Poka. Model ini mengintegrasikan konsep-konsep partisipasi anggaran dengan nilai-nilai religius yang ditemukan melalui epistemologi Kristen. Fakta-fakta ini memberikan gambaran model KASIH diwujudkan melalui kontribusi, akuntabilitas, sinergi, inklusi dan harapan berperan dalam partisipasi anggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka analisis yang dilakukan seperti pada gambar 3.1.





Gambar 3.1 Kerangka Analisis



BAB IV

MENELUSURI PRAKTIK PARTISIPASI ANGGARAN DALAM KONTEKS KEAGAMAAN DAN KOMUNITAS LOKAL: GEREJA PROTESTAN MALUKU (GPM) dan DESA POKA

4.1 Pengantar

Partisipasi anggaran merupakan bagian penting dalam suatu organisasi baik organisasi sektor swasta maupun publik (Lannai dan Amin, 2020). Tahapan penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun (Rahim *et al.*, 2020; Sayuti *et al.*, 2018).

Bab ini akan membahas praktik partisipasi anggaran dari lembaga keagamaan dan komunitas lokal. Gereja Protestan Maluku yang disingkat GPM yang menggambarkan lembaga keagamaan dan Masyarakat Desa Poka yang mewakili komunitas lokal. GPM yang lahir dari pemerintahan Hindia Belanda tanggal 6 September 1935, kini berusia 88 tahun, bukan lagi usia yang muda. Jika dalam kategori manusia, GPM ada dalam kategori usia indah (usinda) (Johan Saimima, 2015). Gereja Protestan Maluku (GPM), merupakan salah satu dari enam organisasi keagamaan Kristen terbesar di Indonesia.

Gereja sebagai salah satu lembaga keagamaan yang juga merupakan organisasi sektor publik yang melakukan kegiatan spiritual keagamaan dan keimanan (Patty *et al.*, 2021) menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam menjalankan aktivitas operasinya. Terlebih lagi cara gereja untuk mendapatkan dana adalah unik yaitu tergantung dari kerelaan jemaat/umat dalam memberikan persembahan dan kolekte-kolekte lainnya. GPM

an penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja GPM pertahun pada node, Klasis dan Jumaat yang ditetapkan oleh persidangan gereja pada



masing-masing jenjang, dan hal ini termuat dalam Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku N0.69 Tahun 2016.

Desa Poka merupakan desa yang terletak di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku Indonesia. Desa Poka berada di bawah Jembatan Merah Putih (JMP) yang merupakan ikon kota Ambon, Desa Poka yang oleh pemerintah pusat menjadi salah satu dari 10 desa di Indonesia yang menjadi “*Smart Fisheries Village Poka*”. Selain itu desa Poka juga merupakan desa konflik kerusuhan tahun 1998, dan saat ini desa Poka sangat mengalami kemajuan, dengan begitu banyak program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Poka bersama masyarakat. Masyarakat desa Poka memiliki keunikan dari struktur masyarakat yang heterogen, semua suku dan agama dan budaya ada di desa Poka. Mengingat kota Ambon merupakan ibu kota provinsi Maluku salah satu daerah di timur Indonesia yang memiliki banyak keunikan dan budaya yang cukup kaya. Realitas multikultural Maluku merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Desa Poka sekalipun bukan merupakan desa adat, akan tetapi merupakan masyarakat Maluku yang memiliki nilai-nilai budaya.

4.2 Mengenal Partisipasi Anggaran ala Gereja Protestan Maluku (GPM)

4.2.1 Praktik Partisipasi Anggaran GPM

Struktur organisasi kelembagaan GPM mewujudkan dirinya dalam tiga tingkatan yaitu jemaat, klasis dan sinode. Jemaat, Klasis, dan Sinode merupakan perwujudan GPM sebagai satu gereja yang utuh dan lengkap (Pola Organisasi dan Kelembagaan GPM, 2016). Organisasi GPM memiliki pola *bottom up* dari jemaat, n sinode. Jemaat merupakan fokus pelayanan pelayanan gereja sebab merupakan fokus utama dari perjuangan untuk mendirikan tanda-tanda



Kerajaan Allah. Jemaat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri melainkan berada dalam suatu gerak berjalan bersama dalam (*synhodos*) klasis dan satu sinode.

Peneliti turut dalam proses persidangan yang dilakukan pada tingkat jemaat, klasis dan sinode. Dari hasil pengamatan, dokumen dan wawancara maka praktik partisipasi anggaran dapat digambarkan pada tabel 4.1 dibawah ini



Tabel.4.1 Proses Penyusunan Anggaran Pada Setiap Aras GPM

No.	TINGKATAN ARAS GEREJA	AKTIVITAS KEGIATAN	KETERLIBATAN UMAT	DOKUMEN PERENCANAAN
1	2	3	4	5
1	JEMAAT	1. Penyusunan rancangan APBJ Rutin tanpa program	• Bendahara • PHMJ • Seksi Pengendali Keuangan Gereja	• Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya • Standarisasi Harga
		2. Pembahasan rancangan yang telah disusun bersama badan majelis jemaat	Badan Majelis Jemaat (Pendeta, Penatua, Diaken)	• Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya • Standarisasi Harga
		3. Penyusunan anggaran program	• Majelis Seksi, Sub Seksi • Tim Litbang Jemaat	• Dokumen Renstra • Standarisasi Harga
		4. Pembahasan anggaran program	• Badan Majelis Jemaat (Pendeta, Penatua, Diaken) • Tim Litbang Jemaat, • Komisi, Sub Komisi, • Badan Pembantu Pelayanan	• Dokumen Renstra • Standarisasi Harga
		5. Finalisasi Rancangan APBJ (Rutin&Program) yang telah dibahas untuk dibawa ke pra sidang	• Badan Majelis Jemaat (Pendeta, Penatua, Diaken)	• Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya • Standarisasi Harga • Dokumen Renstra
		6. Pra Sidang (Membahas rancangan APBJ, Program, Rekomendasi)	• Peserta Biasa : Majelis jemaat dan anggota Sidi Gereja melalui sektor pelayanan yang dipilih dengan ketentuan tiap sektor 7 (tujuh) orang peserta, dan memperhatikan keterwakilan unsur laki-laki dan Perempuan. • Peserta Luar Biasa : Penasehat yaitu Majelis Pekerja Klasik dan Perutusan Badan-Badan Pembantu Pelayanan dan Angkatan Muda GPM serta undangan yang dianggap perlu oleh Majelis Jemaat	• Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya • Standarisasi Harga • Dokumen Renstra



No.	TINGKATAN ARAS GEREJA	AKTIVITAS KEGIATAN	KETERLIBATAN UMAT	DOKUMEN PERENCANAAN
1	2	3	4	5
		7. Sidang Jemaat	• Peserta Biasa : Majelis jemaat dan anggota Sidi Gereja melalui sektor pelayanan yang dipilih dengan ketentuan tiap sektor 7 (tujuh) orang peserta, dan memperhatikan keterwakilan unsur laki-laki dan Perempuan. • Peserta Luar Biasa : Penasehat yaitu Majelis Pekerja Klasik dan Perutusan Badan-Badan Pembantu Pelayanan dan Angkatan Muda GPM serta undangan yang dianggap perlu oleh Majelis Jemaat	• Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya • Standarisasi Harga • Dokumen Renstra
2	KLASIS	• Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja klasis (Rutin)	• Ketua Klasik • Bendahara • MPK	• Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya • Standarisasi Harga
		• Sekertaris bidang bersama Badan-badan pembantu pelayanan menyusun program kerja dengan melakukan koordinasi dengan Balitbang Klasik	• Sekbid • Badan-badan Pembantu Pelayanan	• Standarisasi Harga • Dokumen Renstra
		• Pleno internal anggaran pendapatan belanja klasik dan program	• Majelis Pekerja Klasik • Bendahara • Sekbid • Kepala	• Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya • Standarisasi Harga • Dokumen RENSTRA
		• Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Klasik pada rapat teknik konsultasi akhir tahun	• Majelis Pekerja Klasik • Bendahara • Kepala Bidang • Kepala Sub Bidang • Pendeta Seklasik	• Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya • Standarisasi Harga • Dokumen RENSTRA
		• Finalisasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja klasik untuk dibawa ke Pra sidang	• Majelis Pekerja Klasik • Bendahara • Kepala Bidang	• Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya • Standarisasi Harga



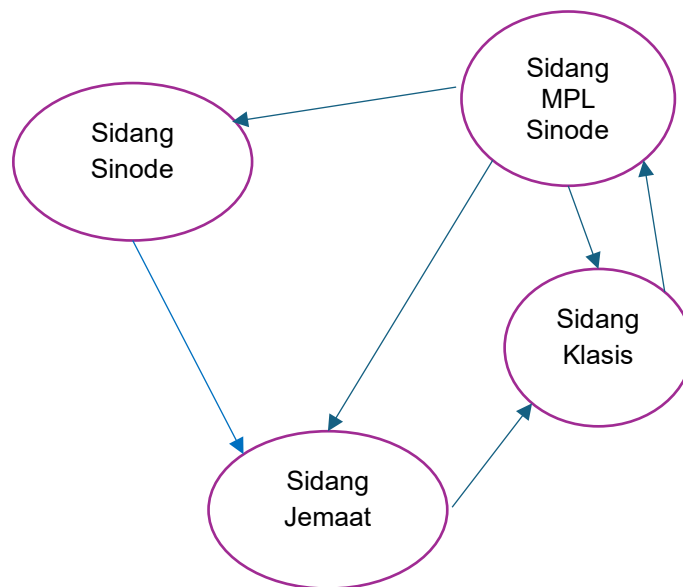
No.	TINGKATAN ARAS GEREJA	AKTIVITAS KEGIATAN	KETERLIBATAN UMAT	DOKUMEN PERENCANAAN
1	2	3	4	5
		Pra Sidang membahas anggaran, program, kebijakan	- Kepala Sub Bidang - Unsur Majelis Pekerja Klasis - Unsur utusan jemaat (masing-masing jemaat mengirimkan 5 (lima) orang utusannya) - Unsur peserta luar biasa (unsur staf MPK and Badan Pembantu Pelayanan) - Unsur pendeta yang ada di klasis tersebut.	- Dokumen RENSTRA - Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya - Standarisasi Harga - Dokumen RENSTRA
		Sidang Klasik : Mengevaluasi program dan keuangan selama 1 tahun, membahas dan menetapkan program, keuangan dan kebijakan	- Unsur Majelis Pekerja Klasis - Unsur utusan jemaat (masing-masing jemaat mengirimkan 5 (lima) orang utusannya) - Unsur peserta luar biasa (unsur staf MPK and Badan Pembantu Pelayanan) - Unsur pendeta yang ada di klasis tersebut.	- Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya - Standarisasi Harga - Dokumen RENSTRA
3	SINODE	Masing-masing departemen dan non departemen, bagian membuat program disertai rincian keuangan dengan berkonsultasi dengan Balitbang	Departemen Non Departemen Badan-Badan Pembantu Pelayanan (umat yang diwakilkan untuk membantu pelayanan)	- Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya - Standarisasi Harga - Dokumen RENSTRA
		Pleno di Sinode untuk mendengar anggaran program dan keuangan dari masing-masing departemen, non departemen dan bagian (pembahasan terjadwal)	MPH Departemen (PTPU, POS, PIPK, PPK) Non Departemen (Keuangan, Infrastruktur, Personalia, Sektum dan Administrasi, Media Center) Bagian	- Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya - Standarisasi Harga - Dokumen RENSTRA



No.	TINGKATAN ARAS GEREJA	AKTIVITAS KEGIATAN	KETERLIBATAN UMAT	DOKUMEN PERENCANAAN
1	2	3	4	5
		Hasil Pleno diberikan kepada bagian keuangan untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja sinode	Keuangan Bendahara MPH	- Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya - Standarisasi Harga - Dokumen RENSTRA
		Setelah disusun maka dilakukan rapat internal untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja akan dibawa ke sidang MPL	MPH Keuangan Bendahara Departemen Non Departemen	- Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya - Standarisasi Harga - Dokumen RENSTRA
		Sidang MPL untuk mengevaluasi keuangan dan program sebelumnya dan membahas dan menetapkan program, keuangan dan rekomendasi	- Peserta Biasa : Unsur MPH Sinode, Ketua Klasis, Unsur Jemaat-jemat melalui klasis dengan ketentuan 7 (tujuh) orang anggota terdiri dari 4 (empat) orang Penatua atau Diaken dan 2 (dua) Pendeta atau Pengijil, satu orang peserta biasa sidang MPL dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan Perempuan. - Peserta Luar Biasa : Majelis Pertimbangan MPH Sinode GPM, Staf MPH Sinode, Wakil/Utusan GPM pada Badan/Lembaga Oikumenis, Ketua Badan Pembantu di tingkat Sinode, Rektor dan Para Dekan dilingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), para undangan lainnya yang dianggap perlu oleh MPH Sinode	- Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya - Standarisasi Harga - Dokumen RENSTRA
		Sidang Sinode	Pesertanya sama dengan sidang MPL	- Laporan Realsasi APBJ tahun sebelumnya - Standarisasi Harga - Dokumen RENSTRA



Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa persidangan jemaat dilakukan pada bulan Januari-Maret tahun berjalan itu sidang Klasis pada bulan April-Mei dan Sidang MPL dilakukan pada akhir tahun berjalan Oktober-November. Sidang Sinode dilakukan setiap 5 (lima) tahun terakhir.



Sumber: Dokumen Gereja PIP RIP (2015)

Gambar 4.1 Tingkatan Persidangan GPM



Bagian ini peneliti akan membahas proses partisipasi anggaran berdasarkan tabel diatas yang dimulai dari peserta, proses dan hasil. Peserta yang sidang baik yang dilakukan oleh jemaat,klasis dan MPL dan Sinode melalui suatu proses pembahasan jika itu di jemaat maka akan dibahas pada rapat bakopel, klasis akan dibahas di rapat majelis jemaat dan pada aras di sinode akan dibahas pada sidang klasis dengan memilih utusan-utusan dari jemaat. Kepesertaan sidang baik tingkat jemaat, klasis dan sinode diatur dalam peraturan pokok Jemaat, klasis dan sinode dan peraturan persidangan yaitu:

Peserta sidang jemaat dihadiri oleh:

- a. Peserta Biasa: Majelis jemaat dan anggota Sidi Gereja melalui sektor pelayanan yang dipilih dengan ketentuan tiap sektor 7 (tujuh) orang peserta, dan memperhatikan keterwakilan unsur laki-laki dan Perempuan.
- b. Peserta Luar Biasa: Penasehat yaitu Majelis Pekerja Klasis dan Perutusan Badan-Badan Pembantu Pelayanan dan Angkatan Muda GPM serta undangan yang dianggap perlu oleh Majelis Jemaat

Peserta sidang klasis dihadiri oleh:

- a. Unsur Majelis Pekerja Klasis
- b. Unsur utusan jemaat (masing -masing jemaat mengirimkan 5 (lima) orang utusannya)
- c. Unsur peserta luar biasa (unsur staf MPK and Badan Pembantu Pelayanan)
- d. Unsur pendeta yang ada di klasis tersebut.

Peserta sidang MPL dan Sidang Sinode:

- a. Peserta Biasa: Unsur MPH Sinode, Ketua Klasis, Unsur Jemaat-jemaat melalui klasis dengan ketentuan 7 (tujuh) orang anggota terdiri dari 4 (empat) orang Penatua atau Diaken dan 2 (dua) Pendeta atau Pengijil, satu



orang peserta biasa sidang MPL dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan Perempuan.

- b. Peserta Luar Biasa: Majelis Pertimbangan MPH Sinode GPM, Staf MPH Sinode, Wakil/Utusan GPM pada Badan/Lembaga Oikumenis, Ketua Badan Pembantu di tingkat Sinode, Rektor dan Para Dekan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), para undangan lainnya yang dianggap perlu oleh MPH Sinode.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan menyebutkan bahwa:

“...perencanaan anggaran pada sidang-sidang yang dilakukan baik ditingkat jemaat, klasis maupun sinode, itu dilibatkan bukan hanya pendetanya tetapi warga jemaat yang ikut dalam persidangan sama-sama memberi kontribusi pikiran untuk merancang anggaran, warga jemaat dilibatkan sesuai dengan ketentuan gereja...”
(Manuskrip: 01)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan:

“...beta (saya) sebelum menjadi majelis beta juga ada dalam posisi sebagai umat. Kita sebagai penatua dan diaken adalah madataris dari umat, jadi beta kira itu sudah mewakili keterwakilan umat dengan kehadiran beta disini merupakan keterwakilan umat. Katong (kita) disini karena katong dipilih oleh umat dan umat mempercayakan katong untuk melaksanakannya jadi itu sudah terwakili...”
(Manuskrip: 12)

“...gereja melibatkan umat dalam perencanaan gereja banyak pikiran, konsep dan juga manusianya, ada yang mewakili perempuan, laki-laki, pengasuh, keterwakilan ini membahas mengenai, kelompok perempuan, laki-laki dan anak dan masalah-masalah keumatan dan proses keterwakilan umat lewat peserta persidangan itu pun melalui proses rapat pada bakopel untuk perutusan peserta jika dari jemaat dan untuk sidang klasis maka melalui rapat badan majelis, dan untuk tingkat sinode melalui sidang klasis, karena semua peserta persidangan baik dilakukan di jemaat, klasis dan sinode ada pengesahan peserta sidang...”
(Manuskrip: 05)

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan umat secara langsung dalam persidangan pada tiap tingkatan gereja berpartisipasi aktif pada ruang terbuka seperti pada persidangan yang dilakukan baik di jemaat, klasis dan sinode.

Dikatakan berpartisipasi aktif karena peserta persidangan yang hadir untuk memenuhi aturan persidangan tetapi ikut berproses dalam memberikan pikiran,

dan ide, saran untuk berdiskusi dalam merancang dan menetapkan dan anggaran. Jadwal persidangan menunjukkan proses persidangan



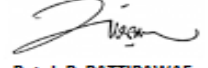
yang terjadi. Sebelum persidangan ada dilakukan pra sidang untuk membantu proses persidangan agar tidak memakan waktu dan anggaran.

 Sidang Ke 42 Jemaat GPM Silo Gedung Gereja Silo, 21 Januari 2024 Tema : "Bertakwalah Tuhan Rahmat Tuhan Telah Datang dan Kerjalah Kaselamatanmu (Lukas 4:18-19, Yesaya 61 : 1-2 & Filipi 2 : 12-13)"		
RANCANGAN ACARA PERSIDANGAN XLII JEMAAT GPM SILO Ambon, 21 Januari 2024		
WAKTU	ACARA	PENANGGUNG JAWAB
Minggu, 21 Januari 2024		
09.00 – 11.30	PEMBUKAAN ➤ Ritual (Kebaktian Pembukaan) ➤ Seremonial	Panitia dan Majelis Jemaat
11.30 – 12.30	Istirahat dan Makan Siang	Panitia
12.30 – 14.00	➤ Pengesahan Peserta ➤ Pembacaan Tata Tertib ➤ Pengesahan Jadwal Acara ➤ Pembacaan <i>Eksekutif Summary</i> Laporan Umum Pelayanan dan Keuangan Jemaat GPM Silo Tahun 2023 ➤ Tanggapan umum terhadap pandangan sektor – sektor pelayanan	Majelis Jemaat
14.00 – 14.30	➤ Pembagian dan Pengantar Komisi	Majelis Jemaat
14.30 – 15.30	➤ Sidang – Sidang Komisi	Pimpinan Komisi
15.30 – 16.30	➤ Pleno Hasil Komisi Program	MJ & Pimp. Komisi
16.30 – 17.00	Istirahat dan Snack Sore	Panitia
17.00 – 18.00	➤ Pleno Hasil Komisi Anggaran	MJ & Pimp. Komisi
18.00 – 19.00	➤ Pleno Hasil Komisi Umum dan Rekomendasi	MJ & Pimp. Komisi
19.00 – 20.00	PENUTUPAN ➤ Resepsi Penutupan ➤ Kebaktian Jamuan Kasih.	Majelis Jemaat
20.00 – 21.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia

PERSIDANGAN KE-42 JEMAAT GPM SILO


Pdt. D. PICAULY
Ketua


Majelis Jemaat GPM Silo


Pnt. J. P. PATTIPAWAE
Sekretaris

8 Sub Tema : "Bersama-sama Meningkatkan Kualitas Hidup Sebagai Wujud Bertumbuhnya Keluarga Allah "

Sumber: Jemaat GPM Silo (2024)

Gambar 4.2. Jadwal Persidangan Jemaat, 2024



RANCANGAN JADWAL ACARA
PERSIDANGAN KE-48 KLASIS GPM KOTA AMBON
TAHUN 2024

HARI/TANGGAL	WAKTU	ACARA	PENANGGUNG JAWAB
MINGGU, 3 MARET 2024	08.00-09.30	Ibadah Pembukaan	MPK dan Panitia
	09.30-11.00	Resepsi Pembukaan	MPK dan Panitia
	11.00-11.30	Istirahat dan Snack	Panitia
	11.30-13.30	• Pengesahan Peserta Persidangan • Pembacaan Tata tertib Persidangan • Pengesahan Jadwal Acara Sidang • Pembahasan Laporan Umum Pelayanan dan Keuangan KKA	Pimpinan Sidang
	13.30-14.00	Istirahat dan Makan Siang	Panitia
	14.00-14.10	Pengantar dan Pembagian Komisi • Program • Anggaran • Umum	Pimpinan Sidang
	14.10-15.00	Sidang-Sidang Komisi	Pimpinan Komisi
	15.00-15.20	Istirahat dan Snack Sore	Panitia
	15.20-16.30	Pleno Komisi	Pimpinan Sidang dan Pimpinan Komisi
	16.30-18.00	Penutupan Sidang dan Kebaktian	MPK dan Panitia
	18.00-	Istirahat (Peserta Pulang)	Panitia

Sumber: dokumen klasis, 2024

Gambar 4.3 Jadwal Persidangan Klasis

ANGGOTA PGI RANCANGAN JADWAL SIDANG KE-44 MAJELIS PEKERJA LENGKAP SINODE GPM							
Waktu	Hari dan Tanggal						
	Minggu, 29 Oktober 2023	Senin, 30 Oktober 2023	Selasa, 31 Oktober 2023	Rabu, 01 November 2023	Kamis, 02 November 2023	Jumat, 03 November 2023	Sabtu, 04 November 2023
08.30-09.00		Ibadah pagi	Ibadah pagi (PK)	Ibadah pagi	Ibadah pagi	Ibadah pagi	Ibadah pagi
09.00-09.30		Snack		Snack	Snack	Snack	Snack
09.30-10.00		Studi meeting I Pemula adl dan bermata, peran penyelenggara, pengawas dan partisipasi masyarakat.					
10.00-10.30			Snack				
10.30-11.30			Penyampaian laporan aman dan keuangan 2023	Sidang Komisi	Lanjutan Sidang Komisi	Pleno III	Pleno VI
11.30-13.00		Studi meeting II Strategi pengantar keragaman pangan nasional di daerah Maluku dan Maluku utara					
13.00-14.00		Makan siang	Makan siang	Makan siang	Makan siang	Makan siang	Makan siang
14.00-16.30		Studi meeting III Penjelasan sub tema	Pembahasan laporan aman dan keuangan 2023	Lanjutan Sidang Komisi	Pleno I	Pleno IV	Pleno VII
16.30-17.00		Snack	Snack	Snack	Snack	Snack	Snack
17.00-18.30		Pembukaan sidang: Peserta peserta MPL 44	Lanjutan pembahasan laporan aman dan keuangan 2023	Lanjutan Sidang Komisi	Pleno II	Pleno V	Pleno VIII
18.30-19.30	Ibadah dan resepsi pembukaan	Pembacaan tata tertib Persetapan jadwal acara sidang	Pembagian komisi				
19.30-20.00		Ibadah malam	Ibadah malam	Ibadah malam	Ibadah malam	Ibadah malam	Pemutupan Sidang Sidang
20.00-21.00	Jumatan Makan Malam	Makan malam	Makan malam	Makan malam	Makan malam	Makan malam	Ibadah dan Resepsi penutupan
21.00-							Makan Malam

Sumber: dokumen sinode (2024)

nbar 4.4 Majelis Pekerja Lengkap Sinode 2024



Selain dokumen gereja hasil wawancara dengan informan mengatakan bahwa:

“...Merancang program pelayanan bersama yang dikomandai lewat PIP dan RIP sambil jemaat-jemaat itu dalam klasis juga menggumuli program bersama ditingkat klasis, yang efeknya juga ke jemaat-jemaat yang katakanlah lemah di klasis itu . Selain itu dengan konsep kemitraan, jemaat dipusat ekonomi misalnya membantu dipasar dalam pengembangan jemaat ekonomi produsen atau jemaat pusat pendidikan membantu anak2nya sekolah, kuliah dengan program orang tua asuh, tapi sekarang dengan sekolah model YPPK, dalam pengertian itu bahwa kalo ada keberpihakan anggaran terhadap hal ini tidak bisa diputuskan umum atau terpusat untuk seluruh gereja. Paling tidak sinode hanya menetapkan standar belanja dan jemaat menyesuaikan dengan anggaran stempat. Karena itu sidang jemaat, sidang klasis, MPL, sidang sinode itu memang wadahnya semua keputusan gereja ini diambil yang salah satunya keputusan mengenai anggaran. Dalam hal itu perencanaan anggaran ditingkat jemaat tidak bisa mengabaikan partisipasi dari warga jemaat dari , sektor dan unit pelayanan. Kepersetaan mereka dalam sidang jemaat itu bukti bahwa gereja mengakomodasi partisipasi seluruh warga gereja untuk membicarakan apa yang menjadi penting bagi pelayanan gereja yang harus ditopang oleh ketersediaan anggaran atau uang gereja. Darimana uang itu didapati juga dari partisipasi jemaat. Untuk itu ada 3 komponen pokok dalam pelayanan GPM yang menentukan pelayanan bisa berjalan maksimal. 1 Dukungan kelembagaan : gereja menyusun pola organisasi secara rapih untuk menanggulangi semua hal yang berkaitan amanat pelayanan gpm karena itu kita punya pola organisasi juga ada jabatan pelayanan pendeta, majelis jemaat dengan struktur pelayanan itu bentuk dukungan pelayanan 2. Dukungan Financial atau uang gereja yang mesti dipersiapkan untuk membelanjakan program atau pelayanan gereja. 3. Partisipasi warga gereja baik dalam bentuk financial, baik ke dalam kelembagaan gereja maupun bentuk lain, ini 3 faktor penopang utk pelayanan gereja...”(Manuskrip: 02)

Informasi informan menunjukkan bahwa persidangan yang dilakukan baik di jemaat, klasis, dan sinode dengan melibatkan jemaat merupakan salah satu bentuk partisipasi warga jemaat, bukan itu saja untuk membiayai program dan pelayanan gereja, dananya itu juga bersumber dari umat/jemaat artinya sumber pembiayaan gereja bersumber dari umat itu sendiri. Proses pembahasan program didasarkan Renstra, yang merupakan turunan dari PIP-RIP, atas dasar itu maka program disusun dengan juga memasukkan rincian anggaran dari suatu program dengan standarisasi harga yang telah dikeluarkan oleh Sinode yang menjadi penyusunan anggaran, Informasi anggaran secara transparan diberikan t persidangan sehingga peserta sidang mengetahui hal tersebut dan tidak



yang tersembunyi tidak ada yang namanya anggaran glondongan karena semua itu dibuatkan rincian jumlah dari suatu anggaran yang direncanakan.

Saat pembahasan tidak menutup kemungkinan untuk peserta mengusulkan program yang tidak ada Renstra tetapi oleh peserta persidangan melihat hal itu penting untuk dimasukkan dalam anggaran. Antara lain: bantuan pendidikan untuk SD, SMP, SMA, bantuan untuk orang sakit dan duka, bantuan untuk orang miskin (janda, duda, anak yatim piatu yang tidak memiliki penghasilan) yang oleh gereja dinamakan bantuan karikatif, hal ini memang terjadi sehingga dapat dijelaskan karena peneliti ikut terlibat langsung dalam proses tersebut. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja berbeda dengan pemerintah. Jika pemerintah sudah ada dananya maka untuk gereja tidak dananya. Untuk itu dalam penyusunan anggaran menggunakan rasionalisasi dan realiasi anggaran dan pendapatan tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang informan:

“...kita berbeda dengan negara. Negara menyusun anggaran uangnya sudah ada, sementara kita memprediksi uang untuk itu kita perlu melihat historis (kolekte kebaktian, unit, wadah). Kemudian menyusun APBG dengan menggunakan rasionalisasi anggaran. Panduannya dengan ada standarisasi, seperti makan, transport berdasarkan standarisasi. Standarisasi dibuat untuk mencegah pelampauan anggaran, itu sebenarnya asumsinya jangan sampe terjadinya pemborosan anggaran. Jangan sampe jemaat yang kuat menyusun anggaran melampaui standarisasi, sehingga tidak merasa uangnya banya lalu bisa dipake standar-standar gereja yang sudah ditentukan yaiu prinsip ekologi yaitu kita harus hemat, tidak boros...” (Manuskrip: 01)

Prinsip-prinsip penyusunan anggaran seperti transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas serta taat asas juga harus diperhatikan (Sopannah, 2010a). GPM dalam penyusunan anggaran juga menggunakan asas keuangan yang tercantum dalam peraturan keuangan tahun 2007 yaitu: tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk warga

Prinsip-prinsip anggaran seperti transparansi dan akuntabilitas, disiplin



anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas serta taat azas juga harus diperhatikan (Sopanah, 2012b).

Jadwal persidangan terlihat bahwa peserta persidangan terlibat mulai dari awal perencanaan di komisi-komisi (komisi anggaran, komisi program dan komisi rekomendasi) sampai dengan pengambilan keputusan yaitu pada pleno komisi. Masing-masing komisi mempertanggungjawaban hasil kerja komisi, jika semua setuju maka akan diambil keputusan. Dan keputusan tersebut menjadi hasil keputusan sidang yang akan dilakukan oleh gereja bersama umat.

GPM melakukan berproses berjalan bersama, dengan melibatkan warga gereja untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja gereja. Hal ini membawa dampak keterlibatan warga gereja dalam bentuk dukungan dana. Serta ikut membantu pemerintah dalam pelaksanaan program-programnya. Ini diungkapkan oleh dua orang informan:

“...Misalnya ada program 10 program dengan dana 40 juta tetapi yang ada mampu didanai hanya 20 juta , maka ada selisih 20 juta jika seksi, dan badan pembantu mengatakan 20 juta ini akan kami cari dananya atau akan kami biayai maka itu tidak akan menjadi masalah. Karena 10 program akan dimasukkan dan anggaran 40 juta dengan catatan 20 juta akan dibantu oleh seksi, sub seksi dan badan pembantu...” (Manuskrip: 01)

“...jika program gereja itu untuk bantuan ekonomi, Kesehatan, pendidikan itu bentuk partisipasi gereja terhadap Masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Kemarin kita Gereja mendapat penghargaan dari Asosiasi Pelayanan Kesehatan Indonesia, beritanya ada ada di web gereja , karena gereja langsung berpartisipasi kepada Kesehatan Masyarakat, aids , malaria, demam berdarah dengan anggaran yang ada disinode ada 200 juta lebih jika dikumpulakn dari jemaat-jemaat dan klasis maka ada milyaran rupiah yang kita kasih untuk Kesehatan...” (Manuskrip: 02)

Anggaran merupakan salah satu instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh publik (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, anggaran harus diinformasikan kepada

aitannya dengan gereja adalah jemaat diberikan ruang untuk memberikan dan masukan terhadap anggaran yang dibuat. Jika jemaat dilibatkan,



hal ini akan meningkatkan rasa kepercayaan umat, karena umat mengetahui bahwa program yang diputuskan untuk kepentingan mereka. Ketika gereja kekurangan dana, umat bisa bergotong-royong untuk mencari kekurangan dana atau berbagi sumber daya. Dengan kata lain ada kontribusi yang diberikan oleh umat secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. Lagi-lagi prinsip berjalan bersama sudah menjadi gaya hidup jemaat. Selain itu, program-program yang dihasilkan dibidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan kepada umat, selaku gereja juga ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. GPM melakukan hal tersebut sehingga oleh pemerintah, lewat Asosiasi Dinas Kesehatan, diberikan penghargaan.



Sumber: Media Center GPM (2023)

Gambar 4.5 GPM Menerima Penghargaan Dari Asosiasi Kesehatan

4.2.2 Menyingkap Nilai-Nilai Injili Dalam Partisipasi Anggaran GPM

Gereja Protestan Maluku dalam Tata Gereja Bab 1, Pasal 1 menyebutkan bahwa Gereja Protestan Maluku merupakan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tubuh Kristus, buah karya Roh /ang melaksanakan misinya dalam pengharapan akan kedatangan Allah di bumi. Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam menjalankan misi



pelayanannya menganut asas atau prinsip *synhodos* yaitu berjalan bersama-sama, sebagai persekutuan yang berkumpul dan bersama-sama mengumuli masalah-masalah pelayanan gereja dalam persidangan. Sesudah itu bersama-sama merancang dan menyepakati apa yang harus dikerjakan dalam pelayanan gereja. Berjalan bersama-sama terus tidak berhenti atau dengan kata lain berkelanjutan. Berkelanjutan dimaknai sebagai bersama-sama sampai kedatangan Tuhan. Hal tersebut juga didasarkan hasil wawancara dengan Ketua Sinode:

*“...masalah di suatu jemaat di Maluku Utara itu adalah masalah seluruh satu GPM begitu sebaliknya juga begitu masalah yang terjadi di jemaat akan menjadi masalah sinodal secara keseluruhan, pengumpulan di tingkat sinode adalah juga pengumpulan jemaat-jemaat secara keseluruhan itu yang kita maksudkan secara *synhodos* berjalan bersama sebagai gereja. Intinya Setiap jemaat GPM harus mengalami pertumbuhan dari waktu-waktu, walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda, memang ada yang bertumbuh cepat sekali seperti di kota, ada yang bertumbuhnya tidak lambat sedang, ada memang yang bertumbuhnya lambat tetapi Gereja sadar akan hal tersebut, sehingga gereja mendorong jemaat-jemaat untuk bertumbuh bersama...” (Manuskrip: 01)*

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum Sinode mengatakan:

*“... Gereja itu *Synhodos*: artinya berjalan bersama-sama dan berkelanjutan. Artinya berjalan bersama sampai dengan akhir sampai Tuhan datang. Berjalan bersama itu bukan berhenti pada suatu waktu, tetapi terus berjalan bersama-sama sampai Tuhan Datang. Ibu Ge bisa lihat di katong punya sub tema itu ada kata bersama-sama dan harus tercermin dalam anggaran. Karena itu yang tadi saya bilang bahwa hakekat gereja yaitu Persekutuan, berjalan bersama tidak boleh ada yang tertinggal. Visi kita : Berakar dalam Tri-Tunggal, bertumbuh bersama, untuk merawat dan membela kehidupan. Disitu aspeknya bertumbuh bersama. Gereja semua jemaat harus bertumbuh bersama dalam banyak aspek yaitu : iman, pendidikan, Kesehatan ekonomi dan bidang lainnya dan tidak boleh ada yang diabaikan dan didasarkan atas KASIH ALLAH...” (Manuskrip:03)*

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan diatas, maka peneliti menemukan nilai kebersamaan, mengajak jemaat hidup dalam kesatuan hati dan pikiran, terutama dalam konteks pelayanan gereja dan persekutuan untuk tumbuh bersama dengan atas dasar KASIH. Dengan demikian, pesan ini menggaris



pentingnya kebersamaan dan kerja sama, kontribusi dan kolaborasi dalam mewujudkan tujuan gereja. Sehati berarti memiliki komitmen dan

dedikasi yang sama terhadap visi dan misi gereja, sementara berpikir menunjukkan pentingnya kesamaan pemahaman dan tujuan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan gereja. Partisipasi anggaran GPM berarti setiap anggota jemaat diharapkan untuk berperan aktif dan memberikan dukungan baik secara financial maupun dalam bentuk partisipasi lainnya untuk mendukung kelangsungan dan perkembangan pelayanan gereja.

Ha ini juga ditegaskan oleh informan dengan memberikan contoh berjalan bersama-sama:

‘...GPM juga memiliki ajaran Synhodos yaitu berjalan sama-sama tidak boleh ada dibelakang, ini merupakan bentuk berjalan bersama karena jika tidak begitu maka para pendeta akan menikmati gaji yang beragam, pendeta jemaat kota saja akan menikmati gaji tiap bulan lancar sementara di desa tidak menikmati gaji, dengan dana 30% yang dibahas dan diputuskan bersama maka sampai dengan hari ini untuk pendeta GPM semuanya menikmati gaji yang sama. Untuk mencapai kesejahteraan umat dan pelayanan...’ (Manuskrip: 01).

Dengan demikian, pesan ini menggarisbawahi pentingnya kebersamaan dan kerja sama dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan berdampak. Semua anggota jemaat diajak untuk bersatu dalam satu hati dan pikiran, serta aktif berkontribusi dalam mendukung anggaran dan program-program gereja, sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih baik. Untuk itu, partisipasi umatlah yang menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan amanat panggilan dan pengutusan GPM.

Bentuk dari berjalan bersama-sama yang dilakukan GPM yaitu diberikan ruang terbuka dalam proses penyusunan anggaran dan pendapatan gereja. Proses penganggaran yang melibatkan masyarakat akan membantu menciptakan hubungan yang mencegah warga kecewa dalam mengalokasikan sumber daya. Keterlibatan umat bukan sekedar formalitas, akan tetapi umat berpartisipasi aktif

oses penyusunan anggaran dengan memberikan pendapat, ide dan itu ologis seperti yang dikatakan oleh salah satu informan:



“...di mana semua punya hak yang sama, tidak hanya pendeta yang punya hak diatas lalu majelis jemaat dan anggota jemaat dibawah tidak semuanya sama dihadapan Tuhan jadi tidak ada yang bilang kaki lebih penting, atau tangan lebih penting, bisa dilihat pada tubuh kristus...” (Manuskrip: 01)

Dalam proses berpartisipasi semua peserta yang mewakili umat mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat, ide. Tidak hanya pendeta saja atau majelis, semua peserta diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, ide, informasi. Karena semua orang sama di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan. Tidak ada yang lebih penting dari satu yang lain. Yang dalam Kitab Injil 1 Korintus 12:12-31 yang berbicara dengan Banyak Anggota Tetapi Satu Tubuh.

“...Sebab, sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu, sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus...”

Injil Korintus ini mengajarkan bahwa tubuh mempunyai banyak anggota, sekalipun banyak tetapi merupakan satu tubuh, maka tidak boleh ada anggota tubuh yang merasa paling penting, paling menonjol. Jika dikaitkan dengan partisipasi anggaran, proses keterlibatan umat pada ruang-ruang terbuka memungkinkan setiap orang berhak untuk berbicara mengemukakan pendapat dan pikiran siapa pun orang tanpa memandang status sosial, jabatan dan kedudukan semua sama di hadapan Tuhan. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada aktor penguasa, jika sudah masuk di gereja maka semua sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Baik itu, jabatan-jabatan gerejawi maupun jabatan-jabatan di pemerintahan dan status sosial lainnya tidak ditempatkan dalam tinggi rendah. Tidak ada jabatan atau status sosial yang tinggi dan yang rendah semuanya adalah hamba dan pelayan-pelayan Kristus.





Dokumen Panitia (2024)

Gambar 4.6 Persidangan membahas program dan anggaran gereja ditingkat Jemaat, Klasis, di Kota Ambon.

Berjalan bersama dalam penyusunan anggaran dan pendapatan gereja dalam hal ini umat dan pelayanan ada dalam sebuah forum terbuka yaitu persidangan baik ditingkat jemaat, klasis dan sinode itu merupakan bentuk akuntabilitas. Seperti yang dikatakan oleh informan berikut ini:

“ketika dia masuk kedalam sidang gereja utk menetapkan anggaran itu bentuk ..akuntabilitas, itu bentuk pengelolaan gereja yang akuntabel, transparan, jujur dan takut Tuhan dalam asas pengelolaan keuangan itu ada didalam peraturan pokok perbendaharaan. Jadi akuntabilitas sdh terbentuk dari situ, mengapa gereja melibatkan warga gereja bukan hanya pimpinan gereja yang memutuskan anggaran harus warga gereja, harus peserta sidang karena gereja mengelola uang yang merupakan KASIH karunia ALLAH dengan asas akuntabilitas, transparansi, bertanggungjawab, jujur dan takut Tuhan...” (Manuskrip: 01)

Hal ini, menunjukkan bahwa berjalan bersama umat dan pelayanan dalam wujud persidangan, harus juga didasari dengan prinsip Etis Injili yaitu Takut Tuhan. Prinsip ini yang harus menjadi gaya hidup umat dan pelayanan dalam menyusun dan merancang APBG, karena itu merupakan wujud pemberitaan firman Tuhan.



... yang dikatakan oleh informan:

...Penyusunan APBG dan pengelolaan keuangan harus ada prinsip takut akan Tuhan atau istilah yang digunakan dalam regulasi yaitu prinsip etis injili, artinya baik yang katong lakukukan dari perencanaan sampai dengan

pertanggungjawaban itu adalah wujud dari pembritaatan firman Tuhan, jika kalo katong pake salah berarti katong mempermalukan Tuhan.. (Manuskrip: 01).

Takut Tuhan diimplementasikan dalam menyusun dan merancang program, anggaran dan pendapatan belanja, tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kepentingan umat dan kesejahteraan umum yang menjadi prioritas utama. Penyusunan anggaran juga harus ada dasar efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditentukan, tidak melakukan *mark-up* anggaran untuk kepentingan pribadi.

Hal yang sering dilupakan manusia adalah bahwa pertanggungjawabannya bukan kepada manusia saja, tetapi kepada ALLAH. Bentuk pertanggungjawabannya bukan hanya vertikal tetapi juga horizontal. Dengan kata lain, seluruh kerja dan perbuatan harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas dan transparansi kepada manusia dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tercantum dalam Kitab Injil Roma 14 : 12 yang berbunyi :

“...Demikianlah setiap orang diantara kita akan memberi pertanggungjawaban dirinya sendiri kepada Allah...”

Saling mendengar, memberi masukan, melibatkan banyak pendapat/ide dalam diskusi dan menciptakan konsensus serta menghasilkan program dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan umat. Hal ini menunjukkan nilai-nilai kontribusi, akuntabilitas, sinergi, inklusitas dan harapan yang dipraktikkan dalam partisipasi anggaran Gereja Protestan Maluku.

4.3 Potret Partisipasi Anggaran di Desa Poka

4.3.1 Remuk Warga



Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa selain musdes dan ang yang dilakukan, ada remuk warga yang dilakukan pada tingkat RT (etangga). Dimana semua warga dikumpulkan lalu dibahas hal-hal atau

masalah-masalah yang terjadi di tingkat RT yang dipimpin oleh Ketua RT. Hasil remuk warga itu akan dibawa ke tingkat musdes untuk diusulkan. Selain membahas masalah-masalah yang terjadi, Ketua RT juga menjelaskan kepada warganya jika ada program yang diusulkan tidak berjalan. Berbeda dengan penjelasan Kepala Desa dan Sekretaris yang menjelaskan bahwa sebelum adanya RPJMDes, maka harus dilakukan remuk warga yang dibuktikan melalui berita acara. Karena sekarang, Desa Poka telah memiliki RPJMDes tahun 2022-2027 sehingga tidak perlu dilakukan remuk warga. Proses penyusunan RPJMDes pun melibatkan masyarakat. Remuk warga dilakukan atas prakarsa dari Ketua RT yang mengumpulkan warga untuk membahas kebutuhan warga setempat. Hal ini didasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu ketua RT dan wakil ketua PKK, dan ini dikonfirmasi oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

“...biasanya penyusunan perencanaan itu berasal dari remuk RT saat tidak ada RPJMdes. Karena sudah ada RPJM maka tidak ada lagi remuk RT. Karena yang bisa menyusun RPJM Des yaitu Kadis Defenitif. Waktu saya dilantik langsung di buat RPJM dua lansung RPJMDes...” (Manuskrip: 06)

“...Iya ibu karena sebelum ke Musdes, biasanya RT mengumpulkan masyarakat untuk membahas kebutuhan warga yang RT akan dibawa ke Musdes...” (Manuskrip: 08)

“...katong (kita) kumpul lia (lihat) katong punk lingkungan di RT, apa saja yang menjadi keluhan dari warga lalu nanti katong usul ka musdes, sebelum ka musdes katong kumpul dolo ibu, jadi ini katong RT z bisa apa-apa musti deng (dengan) warga sama-sama...” (Manuskrip: 09)

Pengakuan dari ketiga informan ini mengandung makna bahwa perencanaan dengan melibatkan banyak orang untuk duduk bersama membahas program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat. Praktiknya ini sesuai dengan Kitab Suci Amsal 15:22 yang bunyinya:

“...Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak...”



menekankan pentingnya berkonsultasi dan mendengar pendapat banyak orang. Desa Poka melakukan hal tersebut, berkumpul bersama membahas,

memberikan usul, saran yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ketua RT tidak menggunakan kekuasaannya untuk memutuskan sendiri kebutuhan warganya, akan tetapi melibatkan banyak orang. Dengan melibatkan banyak orang atau warga maka akan ada banyak masukan, ide, pendapat, akan menghasilkan satu kesepakatan dalam bentuk program yang dibawa ke musrenbang. Program yang telah dihasilkan berdasarkan keputusan bersama akan dikerjakan bersama-sama warga.

4.3.2 Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai bentuk Partisipasi Anggaran

Anggaran merupakan alat perencanaan yang harus memberikan pedoman dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga harus memuat rencana kegiatan secara substansial dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Hal ini juga sangat penting untuk dilakukan oleh desa, yaitu menyiapkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat desa (Kurniasih *et al.*, 2020). Untuk itu desa, perlu menyusun program dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, terutama Pasal 54 menyebutkan bahwa:

“...Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggara pemerintahan desa...”

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, terutama pasal 81 yang mengatur lebih lanjut mengenai musyawarah desa. Musyawarah desa (Musdes)



... forum atau pertemuan yang diadakan ditingkat desa dengan tujuan membahas berbagai isu yang berkaitan dengan pembangunan desa serta

mengambil keputusan bersama-sama. Masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi aktif memberikan pendapat/ide, di mana akan menghasilkan keputusan yang lebih akurat karena usulan langsung dari masyarakat. Musyawarah desa biasanya dilakukan pada bulan September-Oktober tahun berjalan.

Desa Poka melakukan musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan untuk tahun ini dilakukan pada bulan Oktober 2024. Musdes dilakukan dengan membuat surat undangan kepada masyarakat dan pihak luar dalam hal ini lembaga-lembaga LSM untuk menghadiri musdes. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yang terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua RT, Ketua PKK, Lembaga LSM.

“..yang terlibat dalam musdes: pemerintah desa, keterwakilan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, anak, pelaku usaha, kelompok rentan (disabilitas) dan juga lembaga sosial dalam hal ini Yayasan Sagu Salempeng...” (Manuskrip: 07)

“...yang terlibat dalam musdes: pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok pemberdayaan, perempuan, tokoh pendidikan, tokoh agama, dan disabilitas...” (Manuskrip: 08)

“...yang terlibat dalam musdes: biasanya semua stakeholder yang terlibat, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, dari LSM: Yayasan Sagu Salempeng, Arika Mahina, Unsur PPK, PAUD, Bumdes...” (Manuskrip: 08)

“...unsur masyarakat RT perangkat desa, kelompok rentan, tokoh masyarakat, tokoh agama...” (Manuskrip: 09)

“...kami LSM diundang untuk mengikuti Musdes, selain kami Yayasan Sagu Salempeng ada juga pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, anak, kelompok pemberdayaan...” (Manuskrip: 010)





Sumber : dokumentasi Yayasan Sagu Salempeng (2024)

Gambar 4.7 Proses Musyawarah Desa di Desa Poka

Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah desa Poka melibatkan semua unsur masyarakat yang mewakili masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan program desa. Artinya pemerintah dan masyarakat harus bekerja bersama-sama tidak berjalan terpisah, karena pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat, pemerintah tidak dapat mencapai pembangunan yang optimal (Damayanti & Syarifuddin, 2020). Semua unsur yang ada di dalam masyarakat, semua diundang untuk ikut dalam musyawarah desa Poka, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu informan:

“..Kami mendapat undangan untuk ikut musdes, biasanya dua hari sebelum kegiatan. Undangan itu diberikan kepada semua stakeholder yang ada desa. Contohnya undangan ke PKK, jika saya berhalangan hadir maka saya akan menunjuk anggota PKK lain untuk mengikutinya...” (Manuskrip: 08)

Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang informan:



“...Kami diundang melalui undangan yang diberikan dan kami hadir sebagai yayasan yang ikut berproses dengan desa Poka...” (Manuskrip: 010)



Bahwa proses keterlibatan masyarakat, tidak didasarkan atas kemauan pemerintah desa, tidak asal ikut berpartisipasi melainkan atas dasar surat yang ditunjukkan kepada *stakeholder* untuk mengikutinya. Dalam hal ikut berpartisipasi, masyarakat tidak hanya datang, duduk, diam, dengar dan pulang. Akan tetapi, masyarakat ikut memberikan ide, pendapat, masyarakat ikut berdiskusi, terjadi komunikasi dua arah.

“...ya, semua berbicara, karena masing-masing melihat kepentingan baik dari kelompok rentan maupun dari RT,RW, Perempuan, mereka melihat apa yang harus mereka masukkan. Mereka berinteraksi dan memberikan alasan-alasan mengapa program itu diusulkan. Program disusun secara bersama-sama dan dikawal bersama-sama, karena desa kita tidak mencetus program sendiri tapi ada partisipasi masyarakat dalam melihat kebutuhan di desa...” (Manuskrip: 06)

“...Kita semua dibagi didalam kelompok dan disetiap kelompok harus ada perwakilan bapak-bapak, ibu-ibu, RT, RW, disabilitas itu harus sama rata, lalu kita diberikan waktu kira-kira 30 menit dengan didampingi oleh pendamping desa untuk membahas draft program-program dan anggaran yang sudah di buat, setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan dengan membuka kesempatan untuk kelompok lain menanggapi, mengoreksi, mengecek, hasil semua draft program ada di masing kelompok hanya saja masing-masing kelompok bertugas untuk mempresentasikan satu outcome... untuk ditanggapi, diberikan masukan, komentar. Semua program dan anggaran satu tahun berjalan sudah dibuat oleh pemerintah desa, masyarakat datang untuk memberikan masukan dan menanggapi, mengomentari. Setelah semua setuju, dibentuk tim 11, Tim RKP, itu mereka mengikuti musdes, mereka bertugas untuk melihat semua RKP yang sudah dibuat turun lagi ke masyarakat untuk melihat kebutuhan yang mana yang menjadi prioritas, untuk tahun berjalan maka TIM ini yang akan membawanya ke Musrenbang...” (Manuskrip: 011)

Hasil dari musdes, akan ditindak lanjuti oleh Tim RKP (Rencana Kerja Pemerintah), anggotanya adalah masyarakat yang ikut terlibat dalam musdes. Tim ini akan turun lapangan untuk melihat program-program yang telah diusulkan pada saat musdes. Tim akan membuat perengkingan berdasarkan skala prioritas. Setelah itu, hasil kerja Tim RKP akan dibawa ke musrenbang. Selain draf yang sudah dibuat berdasarkan RPJMDes, ada masukkan-masukkan masyarakat yang

pada saat musdes, program tersebut akan dimasukkan sebagai



rekomendasi. TIM RKP akan meninjau langsung jika itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka program tersebut akan dimasukkan.

“...ada dari salah satu RT, yang mengusulkan program pembuatan jalan setapak ditempatnya dan itu ditampung direkomendasi yang ditinjau oleh TIM RKP untuk melihat prioritasnya...”(Manuskrip: 011)

Dan ketika dikonfirmasi pada Ketua RT yang juga merupakan informan mengatakan:

“..kami mengusulkan untuk pembuatan jalan setapak di lingkungan kami, dan itu dimasukkan sebagai rekomendasi, Tim RKP kemarin turun untuk melakukan peninjauan dan itu dimasukkan dalam anggaran tahun 2024. Kami melakukan remuk warga untuk mengajukan program pembuatan jalan setapak, kami RT tidak bisa memutuskan sendiri harus bersama masyarakat..” (Manuskrip: 09)

Pada saat musdes pagu anggaran telah diturunkan, berapa pagu dana desa, jika pagu dana desa belum turun maka kita menggunakan pagu anggaran tahun kemarin. Ketika ada perubahan maka akan diadakan rapat khusus penambahan program. Dan jika ada program yang tidak jalan karena keterbatasan anggaran, maka sebagai pemimpin harus dapat menjelaskan dengan baik sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, agar masyarakat mau berpartisipasi. Hal ini disampaikan oleh seorang informan:

“... jadi biasa desa sudah mendapat nilai pagunya, pemerintah sudah menurunkan Dana desa berapa, dan ADD berapa. Cuma jika pagunya belum turun, maka digunakan pagu anggaran tahun ini dulu. Jika nanti ada perubahan kenaikan maka akan diadakan musyawarah khusus terkait penambahan program itu...” (Manuskrip: 06)

Partisipasi masyarakat dalam menyusun program dan anggaran, merupakan hak masyarakat agar kegiatan desa dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (Damayanti & Syarifuddin, 2020). Desa Poka dalam partisipasi menyusun program dan anggaran memiliki unsur inklusivitas dengan melibatkan perempuan, dan kelompok rentan seperti disabilitas. Partisipasi

yang inklusif di mana masyarakat terlibat untuk menyusun, membahas dan memutuskan program dan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



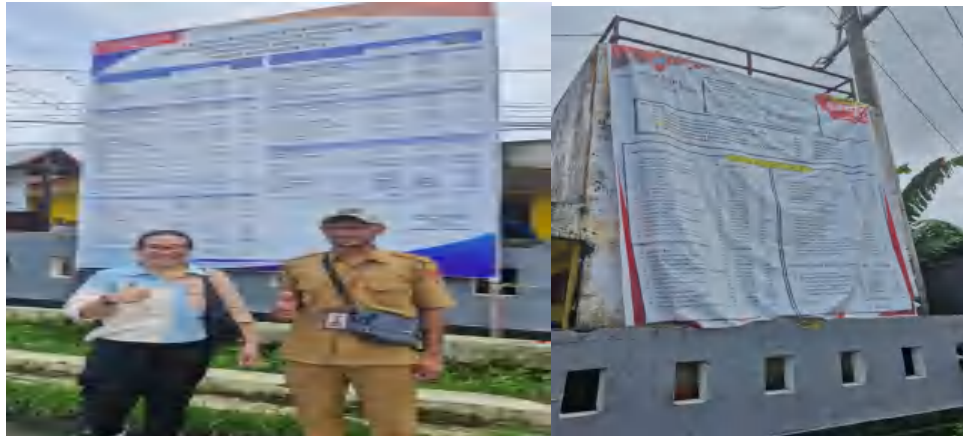
Proses musdes sebagai bentuk partisipasi masyarakat, proses pembahasan yang dibagi dalam kelompok-kelompok, di mana semua orang di dalam kelompok memberikan komentar, ide, pendapat. Bahkan ketika kelompok harus presentasi, ruang untuk berdiskusi pun dibuka. Usulan-usulan program yang diusulkan akan ditampung dalam rekomendasi dan TIM RKP akan melakukan survei apakah program sesuai dengan kebutuhan serta bersifat mendesak atau tidak. Setelah Tim RKP melakukan peninjauan di lokasi, melakukan pengecekan harga dan merampungkan hasil musyawarah desa kemudian membuat perengkingan, maka hasil kerja tersebut akan dibawa ke Musrenbang. Musrenbang dilakukan di desa Poka pada akhir tahun yaitu bulan Desember. TIM RKP akan mempresentasikan hasil kerja kepada peserta Musrenbang yang juga peserta Musdes. Ketika berproses pada Musrenbang dan semua peserta setuju maka ditetapkan RKP dan APBDes. Hasil Musrenbang yang telah ditetapkan akan dibawa ke kecamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan:

“...penyusunan program itu sampai pada TIM RKP, di mana tugas tim itu turun melihat, verifikasi kembali apakah program-program yang dimasukkan pada saat musdes. Tim itu akan membuat perengkingan. Setelah membuat perengkingan akan dibuat musrenbang. Tim itu akan menyampaikan kembali apa yang TIM sudah buat untuk dibahas kembali. Semua setuju lalu ditetapkan dan setelah itu akan dibawa ke kecamatan...” (Manuskrip: 06)

Hal senada juga disampaikan oleh informan:

“...Musrenbang tidak lagi membahas seperti musdes tetapi Tim RKP mempresentasikan hasil kerja, dibahas bersama hasil kerja Tim RKP semua setuju lalu ditetapkan...” (Manuskrip: 08)





Sumber: dokumen pribadi (2024)

Gambar 4.8 Baliho Anggaran dan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Poka

Praktik partisipasi anggaran melalui penyusunan program dan anggaran melalui beberapa tahap. Tahap musdes membahas program dan anggaran, setelah itu TIM RKP bekerja berdasarkan hasil musdes, melakukan survei dan melakukan perengkingan. Proses akhir di tingkat desa yaitu musrenbang. Tahapan-tahapan tersebut melibatkan masyarakat. Proses partisipasi di desa Poka sebagaimana tertuang dalam undang-undang tentang desa membawa perubahan dalam implementasinya. Pernyataan informan salah seorang informan:

“...ibu katong di desa Poka ini banyak kegiatan deng katong semua masyarakat terlibat karena ini for katong to ibu, untuk katong punk kepentingan jadi katong harus bersama-sama pemerintah, kaya beta RT, beta z bisa bergerak sendiri tanpa masyarakat, begitu juga dengan pemerintah desa ibu, z bisa bergerak kalo z deng katong sama-sama dan katong didesa poka biking akang ibu...” (Manuskrip: 09).

Tidak hanya undang-undang yang membentuk partisipasi masyarakat tetapi nilai kesadaran dari masyarakat dan pemerintah dalam hal ini perangkat desa, untuk bekerja bersama-sama demi kepentingan bersama. Nilai ini yang ditemukan di Desa Poka, bahwa keterlibatan masyarakat karena masyarakat dan pemerintah



alan bersama-sama dalam menyusun program dan anggaran desa. Atau
ata lain terjadinya sinergitas, di mana pemerintah mengajak masyarakat

untuk itu terlibat dalam proses input, proses dan output, dan masyarakat juga aktif untuk memberikan kontribusi dan dukungan sehingga mencapai hasil yang sesuai dengan kepentingan masyarakat yang akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Pemerintah tidak sendiri memainkan peran dalam pembangunan akan tetapi masyarakat juga turut berperan. Peran kedua belah pihak harus dapat menjalankannya secara maksimal dan bekerja sama. Dan masalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran menjadi salah satu penyebab gagalnya partisipasi anggaran atau dengan kata lain inklusi merupakan sesuatu yang penting dalam partisipasi (Damayanti and Syarifuddin, 2020).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, konsep yang ideal adalah pembangunan yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat dengan pendekatan lokalitas, dalam hal ini masyarakat desa. Inklusi dalam partisipasi dimaknai secara beragam dalam banyak kelompok. Menurut Fredericks dan Eccles (2006) dalam Damayanti dan Syarifuddin (2020), terdapat beberapa pengertian partisipasi seperti: partisipasi sebagai bagian dari upaya bersama yang dilakukan secara bahu-membahu dalam membangun masa depan bersama. Partisipasi bukan hanya ikut serta dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan saja, namun partisipasi adalah suatu kontribusi dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan pemikiran tentang keadilan sosial.

Praktik partisipasi anggaran Desa Poka dengan melibatkan semua *stakeholder* yang ada di desa, kehadiran mereka tidak hanya datang, duduk, diam, dengar dan pulang tetapi ada proses yang dilakukan dengan menyusun dan merancang program dan anggaran, bahkan warga ikut dalam pengambilan

n. Pemerintah desa Poka mempraktikkan nilai-nilai sinergi dan inklusi



yang ada dalam kitab Injil 1 Korintus 12:12 dan Galatia 3:28 yang berbunyi demikian:

"...Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus..."

"...Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus..."

Sebagaimana tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dibutuhkan sinergi antara pemerintah desa, dan masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja tanpa masyarakat karena akan menghasilkan kemiskinan dan ketertinggalan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah desa. Bukan hanya masyarakat yang dilibatkan tetapi juga pihak lain, seperti lembaga sosial masyarakat yang bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat perempuan, laki-laki, maupun disabilitas.

4.4 Refleksi

Partisipasi anggaran merupakan bagian penting dalam suatu organisasi baik organisasi sektor swasta maupun publik (Lannai & Amin, 2020). Praktik partisipasi anggaran yang dilakukan baik di GPM dan desa Poka, peneliti menemukan nilai KASIH sebagai dasar seluruh proses partisipasi anggaran. Kasih diimplementasi dalam bentuk kontribusi, akuntabilitas, sinergi, inklusi, dan harapan diimplementasikan dalam proses tersebut.



Tabel 4.2 Temuan Model Partisipasi Anggaran

Temuan	Kesimpulan	Kutipan wawancara Gereja	Kutipan Wawancara Desa
Kontribusi:	Masyarakat dan jemaat berkontribusi materi, non materi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan semangat Kasih dan kerelaan.	<i>"...Untuk itu ada 3 komponen pokok dalam pelayanan GPM yang menentukan pelayanan bisa berjalan maksimal. 1 Dukungan kelembagaan: gereja 2. Dukungan Financial atau uang gereja yang mesti dipersiapkan untuk membelanjakan program atau pelayanan gereja. 3. Partisipasi warga gereja baik dalam bentuk financial, baik ke dalam kelembagaan gereja maupun bentuk lain, ini 3 faktor penopang utk pelayanan gereja..." (2.Korintus 9-7,Lukas 6;35)</i>	<i>"...partisipasi masyarakat sangat antusias, ini dilihat ketika kami memberikan undangan, masyarakat selalu hadir. Bukan hanya hadir tetapi juga memberikan pandangan, pendapat, saran. Ini semua pandangan, pendapat itu akan kami keola sebagai pemerintah desa untuk kemajuan desa kami..."</i>
Akuntabilitas:	Keterbukaan dan transparansi jemaat dalam mengikuti persidangan, dimana jemaat dilibatkan dalam proses persidangan/Musdes /Mesrenbang	<i>"...ketika dia masuk ke dalam sidang gereja untuk menetapkan anggaran itu bentuk akuntabilitas, itu bentuk pengelolaan gereja yang akuntabel, transparan, jujur, dan takut Tuhan..." (Lukas 16:10,Roma 14:12, Lukas 16:10, Roma 13;7)</i>	<i>"...Kita semua dibagi didalam kelompok dan disetiap kelompok harus ada perwakilan bapak-bapak, ibu-ibu, RT, RW, disabilitas itu harus sama rata..."</i>
Sinergi:	Kalaborasi yang erat antara gereja dan jemaat, pemerintah desa dan lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.	<i>"...Persidangan ditingkat jemaat,klasis dan sinode dilakukan dengan melibatkan jemaat sebagai perwakilan dalam proses pembahasan dan anggaran, sehingga ada pertukaran ide dan saran yang berkontribusi pada keputusan bersama..." (1 Korintus 12-14-27, Roma 12:4-5)</i>	<i>"...ibu katong di desa Poka ini banyak kegiatan deng katong semua masyarakat terlibat bersama-sama pemerintah, sendiri tanpa masyarakat, begitu juga dengan pemerintah desa..."</i>
	Seluruh elemen baik yang ada digereja maupun di desa untuk ikut berpartisipasi dalam proses	<i>"...persidangan jemaat ditingkat jemaat, klasis, dan sinode melibatkan Perempuan, laki-laki, pengasuh, dan</i>	<i>"...Pemerintah desa, keterwakilan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat,</i>



Temuan	Kesimpulan	Kutipan wawancara Gereja	Kutipan Wawancara Desa
	pengambilan keputusan dan proses kegiatan tanpa ada diskriminasi	<i>kelompok rentan sehingga semua pihak dapat menyampaikan pendapat dan ide...” (Yakobus 2-2-4, Lukas 14:13-14)</i>	<i>pemuda, anak, pelaku usaha, kelompok rentan (disabilitas) dan juga lembaga sosial dalam hal ini Yayasan Sagu Salempeng...”</i>
Harapan:	Mekanisme partisipasi yang dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan dan Pembangunan berkelanjutan baik digereja maupun didesa	<i>“...Visi kita:berakar dalam Tri-Tunggal, bertumbuh bersama untuk merawat dan membela kehidupan. Semua jemaat harus bertumbuh bersama dalam banyak aspek yaitu iman, pendidikan, Kesehatan, ekonomi dan bidang lainnya. Tidak boleh ada yang diabaikan didasarkan atas kasih Allah..”. (Yeremia 29:11, Mazmur 33:5).</i>	<i>“...Program kita tidak mencetus program sendiri tapi ada partisipasi masyarakat dalam melihat kebutuhan didesa...”</i>

Sumber: Hasil Penelitian (2024)

Penjelasan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai kontribusi, akuntabilitas, sinergi, inklusi dan harapan merupakan hasil yang terwujud nyata dari parktik partisipasi anggaran di GPM dan desa Poka dalam penelitian ini. Model KASIH akan digambarkan secara utuh pada bab-bab selanjutnya sebagai kerangka kerja yang memungkinkan partisipasi anggaran dilakukan dengan penuh KASIH. Setiap nilai KASIH akan memperlihatkan bagaimana kontribusi, akuntabilitas, sinergi, inklusi dan harapan saling berkaitan dalam membentuk proses anggaran.



BAB V

KASIH: PRESPEKTIF TEOLOGI

5.1 Pengantar

Kasih merupakan tema utama yang bukan saja menjadi inti iman Kristen, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun hubungan antara manusia, Tuhan, dan sesama. Dari sudut pandang teologis, cinta bukan sekadar emosi atau tindakan manusia, tetapi cerminan Kemahakuasaan Allah, tetapi Allah juga dekat dan terlibat dalam kehidupan manusia. Alkitab menegaskan bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4:8 berarti bahwa kasih adalah hakikat keberadaan Tuhan dan dasar semua pekerjaan-Nya di dunia. Pemahaman teologis tentang cinta tidak terbatas pada hubungan pribadi tetapi juga mencakup aspek komunitas dan tanggung jawab sosial. Cinta membutuhkan pengorbanan yang tulus, seperti yang ditunjukkan oleh kehidupan dan karya Yesus. Melalui salib, kasih Allah ditunjukkan bukan hanya sebagai tindakan pengampunan, tetapi juga sebagai panggilan untuk memperbaiki setiap dimensi kehidupan manusia.

Dalam pembahasan ini, kasih akan dikaji dari sudut pandang teologis dengan menggunakan landasan Alkitab, khususnya melalui Matius 22:34-40, Markus 12:30-31, Lukas 10:27, di mana Yesus menekankan dua perintah, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hatimu dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka, teologi Cinta ini bukan hanya sebuah prinsip pribadi, tetapi juga sebuah pedoman untuk menciptakan hubungan yang adil, inklusif dan penuh harapan dalam konteks pribadi, kelompok dan gereja. Melalui pengantar ini, marilah kita menelusuri lebih dalam bagaimana cinta dipahami secara teologis.



5.2 KASIH: PERSPEKTIF ALKITAB

Agama Kristen mengajarkan ajaran KASIH yang tidak hanya sekedar mencakup nilai sempati dan moralitas saja, akan tetapi memiliki nilai teologisnya. Ajaran ini ada karakter Tuhan yang mengajarkan, membimbing manusia untuk bagaimana berinteraksi dengan Tuhan. Dalam Kekristenan KASIH merupakan hal yang paling mendasar dan KASIH merupakan hal yang harus dijalankan (Suratman & Sugiono, 2023).

Ajaran Tuhan Yesus Kristus mengenai Ajaran Kasih yang terdapat dalam Matius 22:34-40, Markus 12:30-31, Lukas 10:27 berbunyi demikian:

"..Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu..."

Ayat ini menunjukkan perintah untuk manusia dalam merespons kasih Tuhan Kasih Allah kepada manusia merupakan suatu bentuk emosi yang Allah Miliki (Suratman & Sugiono, 2023). Mengasihi sesama manusia adalah salah satu cara untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Tindakan kasih terhadap sesama merupakan perwujudan nyata dari cinta kita kepada-Nya. Hal ini sejalan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan, seperti yang tertera dalam Imamat 19:18.

Dasar dari kasih kepada sesama adalah kasih Allah kepada umat pilihan-Nya. Dalam keadaan lemah dan tak berdaya, terutama ketika menghadapi penderitaan selama perbudakan di Mesir, Allah selalu mengasihi, menolong, memelihara, melindungi, menebus, dan membebaskan mereka, sebagaimana tercatat dalam Keluaran 20:2. Dengan demikian, mengasihi sesama adalah

kita terhadap kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita. Kasih Allah sal, tanpa batasan siapa dan berapa banyak orangnya, dan bagi mereka



yang berpegang pada perintah-perintah Allah, mengasihi sesama menjadi sebuah keharusan (lihat Keluaran 20:6).

Ayat ini juga menekankan bahwa cinta kepada Tuhan harus mencakup setiap aspek keberadaan manusia, hati, pusat, emosi dan kehendak, jiwa, kehidupan dan wujud batin, akal, pikiran dan pemahaman. Perintah ini bukan hanya sekedar syarat moral tetapi juga merupakan panggilan untuk mengarahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan sebagai sumber kasih dan kehidupan. Kecintaan manusia terhadap Tuhan bukanlah suatu hal yang muncul secara alamiah melainkan merupakan respons terhadap cinta Tuhan yang telah diungkapkan sebelumnya.

Perintah ini juga menekankan bahwa kasih kepada orang lain harus mencakup belas kasihan dan kepedulian yang sama yang kita miliki terhadap diri kita sendiri. Artinya, kita harus memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, kasih sayang, dan kebaikan yang sama sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan cara yang sama. Ini bukan hanya masalah moral. suatu perintah, tetapi panggilan untuk menciptakan hubungan saling mendukung dan kasih sayang antara orang-orang dalam komunitas.

Mengasihi orang lain juga tidak dapat dipisahkan dari hubungan kita dengan Tuhan. 1 Yohanes 4:20 mengatakan, "Jika seseorang berkata: 'Aku mengasihi Allah,' dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia adalah pendusta. 'Jika seseorang dapat melihat saudaranya, bagaimana mungkin ia mengasihi Allah, yang tidak dapat dilihatnya? ayat ini menekankan bahwa kasih kepada sesama merupakan bukti kasih kita kepada Allah. Jadi setiap kali kita mengasihi sesama, kita juga

inkan kasih Allah. Tuhan adalah pribadi yang pertama kali mengasihi kita. rjukkan hubungan yang erat antara cinta vertikal kepada Tuhan dan cinta



horizontal kepada sesama. Cinta yang datang dari Tuhan tidak terbatas dan lengkap. Pengorbanan harus dilakukan melalui kita untuk orang lain, terlepas dari siapa mereka, apa latar belakang mereka, atau apa yang mereka lakukan untuk kita.

Dalam 1 Yohanes 4:19, rasul Yohanes menulis Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah terhadap manusia diungkapkan melalui penciptaan, kepedulian dan khususnya penebusan melalui Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus di kayu salib merupakan bukti kasih Allah yang tak bersyarat, yang memanggil umat manusia untuk menyikapinya dengan kasih yang tulus dan penuh pengabdian. Cinta kepada Tuhan juga mempunyai dimensi konkret berupa ibadah dan pengabdian. Ibadah bukan sekedar ritual tetapi juga ungkapan cinta kasih yang muncul dari hati yang bersyukur dan hormat kepada Tuhan.

Dalam Roma 12:1, Paulus mendesak orang-orang percaya untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Inilah yang disebut ibadah yang sejati. Kasih kepada Tuhan ditunjukkan melalui kesetiaan hidup dalam menjalankan kehendak-Nya, mengagungkan nama-Nya, dan turut serta dalam pelayanan kepada sesama. Selain itu, cinta kepada Tuhan mencakup ketaatan. Yesus berkata: “Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menaati perintah-perintah-Ku. Yohanes 14:15 Oleh karena itu, menaati perintah Allah bukanlah suatu beban melainkan suatu ungkapan kasih yang mendalam. Orang yang mengasihi Tuhan melihat perintah-perintah-Nya bukan hanya sebagai kewajiban tetapi juga sebagai kesempatan untuk menyenangkan Dia, dan memperdalam hubungan mereka dengan-Nya.

Seluruh kehidupan manusia diarahkan pada cinta kepada Tuhan, sehingga

h hubungan yang dinamis antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Cinta jadi kekuatan transformatif, mengubah hati, membentuk karakter, dan



mendorong manusia untuk mencintai sesamanya dengan cara yang sama. Cara Tuhan mencintai dunia. Oleh karena itu, cinta kepada Tuhan bukan sekedar perintah tetapi juga landasan hidup yang diberkati dan penuh makna.

Injil Perjanjian Baru merupakan bukti wujud kasih ALLAH yang diberikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Tujuannya adalah memberikan kebebasan dan hidup yang kekal bagi manusia Yohanes. 3:16 yang berbunyi:

“..Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini sehingga IA memberikan AnakNya yang Tunggal Supaya Barang Siapa yang percaya kepadaNya akan memperoleh hidup yang kekal...”

Yohanes 3:16 menggambarkan kasih Allah sebagai suatu pengorbanan yang luar biasa. Kasih ini diwujudkan melalui pemberian Anak-Nya yang Tunggal untuk keselamatan dunia. Ini menunjukkan bahwa kasih sejati bukan sekedar emosi atau konsep abstrak, melainkan suatu tindakan nyata yang mengutamakan kesejahteraan orang lain. Hal yang terpenting adalah Allah menampilkan bahwa kasih sejati selalu melibatkan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar.

Kasih Allah bersifat universal, menjangkau seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang, status sosial, atau budaya. Hal ini terlihat dalam ungkapan "bagi dunia ini," yang menegaskan bahwa kasih Allah tidak terbatas pada kelompok tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, model kasih ini menjadi teladan bagi kita untuk mencintai dan menghargai setiap individu tanpa diskriminasi. Kasih yang universal mengajarkan prinsip inklusif, yakni menerima dan melibatkan semua orang dalam hubungan sosial yang harmonis.

Ayat ini juga mengungkapkan tujuan mulia dari kasih Allah: memberikan hidup yang kekal. Dengan kata lain, Kasih ini tidak hanya untuk memenuhi

n sementara, tetapi juga memberikan dampak yang abadi. Kasih yang selalu membawa harapan dan memulihkan hidup. Dalam konteks



kemanusiaan, hal ini menginspirasi kita untuk saling mengasihi dengan tujuan membangun kehidupan yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat.

Kasih Allah memanggil kita untuk memberikan respons berupa iman kepada-Nya. Ungkapan "barang siapa yang percaya kepada-Nya" menunjukkan bahwa kasih bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi mengundang kita untuk merespons dengan kepercayaan. Respons ini tidak hanya tampak dalam iman secara spiritual, tetapi juga melalui tindakan kasih kepada sesama. Dengan demikian, kasih Allah menjadi teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang saling memberi, menerima, dan menghormati, serta menciptakan kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah. Selain itu, 1 Korintus 13:4-7 mengatakan bahwa:

"...kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain..."

Kasih, seperti yang dijelaskan dalam 1 Korintus 13:4-7, memiliki makna yang sangat dalam sebagai fondasi untuk membangun hubungan yang harmonis dan penuh kebajikan. Ayat tersebut menekankan bahwa kasih sejati adalah kesabaran yang tak berujung dan kebaikan yang tulus. Kesabaran berarti kemampuan untuk menerima kelemahan orang lain tanpa terburu-buru menghakimi, sedangkan kebaikan mengacu pada tindakan nyata yang mendukung kesejahteraan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian, kasih berfungsi sebagai dasar untuk membangun relasi yang penuh pengertian dan keikhlasan.

Lebih lanjut, Kasih sejati juga terbebas dari egoisme dan kesombongan.

Sikap ini tercermin dalam tindakan yang tidak mementingkan kepentingan diri

tidak memperbesar diri, dan tidak menunjukkan kesombongan. Kasih yang

mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati, dimana seseorang



mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Dengan menghindari sikap egois dan sombong, kasih menciptakan suasana saling menghormati yang mempererat hubungan dalam berbagai konteks, baik di tingkat pribadi maupun sosial.

Kasih juga mengajarkan tentang pengendalian diri dan pengampunan. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kasih tidak mudah marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hal ini berarti kasih membantu individu untuk mengendalikan emosi negatif, seperti amarah, dan mendorong mereka untuk memberikan pengampunan kepada sesama. Sikap ini tidak hanya menciptakan kedamaian dalam hubungan antar manusia, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kasih Kristiani yang menjadikan pengampunan sebagai ungkapan cinta sejati.

Kasih yang dibahas dalam Alkitab berbeda dengan kasih manusia pada umumnya. Dalam bahasa Yunani, cinta rohani disebut *agape*, yang merujuk pada cinta tanpa syarat, penuh pengorbanan, dan tanpa pamrih. Kasih *agape* merefleksikan sifat Allah, yang mengorbankan Putra tunggal-Nya untuk menebus dosa umat manusia. Yohanes 3:16 menjelaskan cinta ini berbeda dengan bentuk cinta lainnya seperti cinta *Eros* (kasih romantis), *Philia* (kasih persahabatan), dan *Storge* (kasih keluarga). Sementara cinta *Eros*, cinta *Philia*, dan cinta *Storge* sering kali bersifat emosional dan bergantung pada balasan, cinta *agape* melampaui kebutuhan pribadi dan tidak bergantung pada respons penerima (Lewis, 1960).

Dengan demikian, cinta dari sudut pandang teologis tidak hanya menjadi dasar hubungan antara Tuhan dan manusia, tetapi juga menjadi kompas kehidupan dalam hubungannya dengan sesama. Allah memanggil umat-Nya untuk hidup dalam kasih, meniru kasih Ilahi-Nya yang tidak bersyarat dan mengampuni.

Secara keseluruhan, makna kasih dalam ayat ini menunjukkan bahwa kasih bukan sekadar perasaan, melainkan merupakan tindakan nyata yang



melibatkan kesabaran, kebaikan, kerendahan hati, dan pengampunan. Kasih yang seperti ini sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan antarpribadi maupun dalam komunitas. Kasih yang tulus tercermin dalam perkataan, berbagi dan perbuatan dengan pengetahuan serta karunia. Tanpa KASIH, segala perbuatan ini akan sia-sia, meskipun terlihat luar biasa.

5.2. KASIH sebagai Dasar Hubungan Hidup Bermasyarakat

Kasih adalah landasan yang mempersatukan umat Tuhan dalam kehidupan bersama sebagai suatu komunitas yang beriman kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 12:14-27, Paulus menggambarkan Gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota dengan fungsi dan peran berbeda-beda, namun semuanya bersatu karena kasih. Cinta mengikat segalanya. Meski setiap individu unik dan berbeda-beda, namun mereka dipersatukan demi satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan dan saling mengabdikan. . Kasih menjadikan Gereja bukan sekadar organisasi, melainkan komunitas yang hidup dan berkembang secara harmonis, masing-masing berkontribusi sesuai talenta yang diterima. Dengan kasih, setiap anggota tubuh Kristus saling menghormati, mendukung dan membangun karena memahami bahwa keberadaan satu sama lain adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna.

Kasih menjadi pengikat persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat, sebagaimana diajarkan dalam Kolose 3:14 yang menyatakan: “*...Diatas semuanya itu: kenakanlah Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan..*”

Ketika ada perbedaan, perselisihan, pertengkaran maka Cinta bertindak sebagai kekuatan yang mengatasi hal tersebut. Tanpa kasih sayang, hubungan dalam



kat akan terkotak-kotak dan terpecah belah. Cinta menciptakan an dan persatuan serta memberikan ruang bagi setiap orang untuk

bertumbuh dalam kasih Tuhan. Ini adalah panggilan bagi Gereja untuk selalu hidup dalam kasih untuk menyempurnakan hubungan antar anggotanya, mendorong mereka untuk saling memaafkan, saling membangun dan saling mendukung dalam perjalanan iman.

Cinta juga mendorong Gereja untuk membangun komunitas yang inklusif dan adil di mana setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi atau budaya, diperlakukan setara. Dalam Lukas 14:13-14 demikian bunyinya: *“...Tetapi, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta...”*

Yesus mengajarkan tentang pentingnya menyambut orang-orang yang terpinggirkan. Seperti masyarakat miskin dan penyandang disabilitas. Kasih memotivasi umat Tuhan untuk menyambut mereka yang terpinggirkan dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, cinta kasih tidak hanya menjadi landasan kehidupan bermasyarakat tetapi mendorong gereja melayani dunia dengan cinta. Dengan cinta inklusif, mengundang orang-orang dari semua lapisan masyarakat untuk merasakan kasih Tuhan yang tak terbatas.

Dalam komunitas yang dibangun atas dasar cinta kasih, terdapat prinsip keadilan yang mengharuskan setiap anggotanya dihargai dan diperlakukan setara. Cinta mengikat hubungan masyarakat yang mendorong masyarakat untuk saling memperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi. Cinta ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi tetapi juga membentuk struktur dan kebijakan komunitas adil yang mendukung kesejahteraan semua anggotanya. Gereja sebagai komunitas harus menjadi teladan dalam menerapkan prinsip keadilan,

lindungi hak-hak kaum marginal dan memastikan tidak ada seorang pun yang merasa ditinggalkan atau dirugikan. Kasih adalah fondasi hubungan



masyarakat dan juga mengajarkan kita bagaimana hidup damai dengan orang lain. menghormati satu sama lain. dan cinta dalam segala situasi. Cinta menuntut kita untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan mengesampingkan keegoisan yang dapat merusak perdamaian dalam masyarakat. Dalam Kasih, setiap anggota masyarakat dipanggil untuk hidup sebagai satu tubuh, saling memberi dan menerima, saling menguatkan satu sama lain dalam iman dan pelayanan. Inilah gambaran ideal gereja yang tidak hanya berkumpul tetapi hidup sebagai tubuh Kristus yang sejati, saling mendukung dan mengasihi dalam segala hal akan tetapi menunjukkan bukti kasih Tuhan di dunia ini.

5.4 Harapan dan Janji dalam Kasih

Kasih memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pengharapan Kristiani. Dalam 1 Korintus 13:13, Paulus menulis, *"...Demikianlah tinggal tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih; tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih..."*

Kasih merupakan dasar harapan yang kokoh bagi orang Kristen, karena kasih Allah yang tak pernah gagal mendatangkan keyakinan dan kedamaian bahkan di tengah kesulitan hidup. Cinta ini tidak hanya diungkapkan dalam hubungan kita dengan orang lain tetapi juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Harapan Kristen didasarkan pada kebenaran bahwa Allah mengasihi umat-Nya. Dengan kasih-Nya yang kekal dan melalui kasih-Nya, kita memiliki harapan untuk masa depan yang dipenuhi dengan kebaikan, kedamaian, dan keamanan. Kasih adalah dasar untuk menatap masa depan, karena kasih Allah memberi kita keyakinan bahwa Dia akan selalu hadir dalam hidup kita. dan merawat kami.



Yeremia 29:11 menggambarkan pengharapan yang diberikan oleh Allah mat-Nya,

“...Karena Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan...”

Janji ini menunjukkan bahwa dalam kasih-Nya, Allah memiliki rencana yang baik bagi umat-Nya, rencana yang penuh dengan harapan. Sekalipun kita mungkin mengalami kesakitan dan kesulitan dalam perjalanan hidup kita, kasih Tuhan adalah sumber harapan yang tak tergoyahkan. Rencana Tuhan bagi manusia memiliki rencana untuk perdamaian dan kasih-Nya akan selalu membimbing kita ke masa depan yang dipenuhi dengan berkat penyembuhan dan pembaruan. Cinta ini memberi keyakinan bahwa di balik setiap tantangan dalam hidup, ada janji dari Tuhan yang menuntun kita menuju penyembuhan dan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan.

Masa depan yang dipenuhi kasih merupakan janji yang terkait erat dengan Kerajaan Tuhan. Ketika Yesus mengajar tentang Kerajaan Allah, Dia menggambarkan suatu keadaan di mana Kasih, kedamaian, dan kebenaran akan berkuasa. Di Kerajaan Tuhan, cinta akan menang atas segala bentuk kebencian dan ketidakadilan. Ini adalah visi tentang masa depan yang penuh dengan kedamaian sejati, di mana semua makhluk akan hidup dalam harmoni dengan Tuhan dan sesama manusia.

5.4 Refleksi

Dari sudut pandang teologi Kristen, Kasih tidak dipahami sekadar sebagai emosi atau tindakan, tetapi sebagai inti hubungan antara Tuhan dan umat-Nya. Dalam Alkitab, Kasih dimulai dengan kasih Allah yang dalam dan tanpa syarat bagi umat-Nya, melalui pekerjaan-Nya di dalam Kristus, yang merupakan dasar kehidupan kekal. Seperti yang tertulis dalam Matius 22:37-39, perintah adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal



budimu dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih ini bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga sebuah respons terhadap cinta Allah, yang telah terlebih dahulu mengasihi manusia (1Yohanes 4:9).

Kasih terhadap sesama yang tercermin dalam ajaran Kristus adalah cerminan kasih kepada Tuhan. Tidak hanya emosional tetapi juga diekspresikan melalui tindakan praktis dalam kehidupan sehari-hari, melintasi batas-batas sosial, budaya dan agama. Prinsip kasih ini menyerukan agar manusia memperlakukan orang lain secara adil dan penuh toleransi, sebagaimana tercermin dalam Lukas 14:13-14, menyerukan kita untuk mengasihi tanpa diskriminasi dan memberi dengan cuma-cuma. Sebagai anggota tubuh Kristus, Gereja harus hidup dalam kasih, membangun kesatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 12:14-27. Kasih adalah ikatan yang memperkuat hubungan di antara anggota tubuh Kristus, menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, serta memberi ruang bagi semua orang. partisipasi dalam kehidupan gereja dan masyarakat Kolose 3:4 menekankan bahwa kasih adalah ikatan yang mempersatukan kita sebagai satu di dalam Kristus

Pada akhirnya, Kasih mendatangkan pengharapan yang tidak pernah berakhir kegagalan Seperti tertulis dalam 1 Korintus 13:13 ketiga hal ini ialah iman, pengharapan dan kasih; tetapi yang terbesar di antaranya adalah cinta. Kasih adalah dasar harapan Kristen yang mengarahkan kita menuju masa depan yang dipenuhi dengan janji-janji Allah, termasuk harapan kehidupan kekal di Kerajaan Allah. Kasih yang tak pernah gagal ini, yang diungkapkan dalam 1 Korintus 13:8, menjadi pengharapan kita yang pasti di dalam Tuhan. Karena itu, Kasih bukan saja merupakan asas dasar kehidupan beriman, tetapi juga hakikat hidup bersama

omunitas Kristiani. Kasih menghubungkan manusia dengan Tuhan, dan alam semesta.



BAB VI

KONTRIBUSI SUKARELA DALAM PARTISIPASI ANGGARAN: MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN DAN MEMPERERAT PERSATUAN

6.1 Pengantar

Organisasi sektor publik seperti gereja, khususnya kontribusi secara sukarela dalam konteks partisipasi anggaran tidak hanya mencerminkan nilai-nilai luhur dalam hubungan sosial dan kemanusiaan, akan tetapi sebagai salah satu mekanisme utama dalam mempererat partisipasi jemaat dalam pengelolaan anggaran gereja. Nilai yang mendasari kontribusi adalah KASIH, yang merupakan bentuk dari sebuah pengorbanan yang tak bersyarat. KASIH memberikan suatu dorongan kepada komunitas/jemaat untuk memberikan kontribusi tanpa unsur paksaan, baik berupa materi, waktu, tenaga maupun perhatian. Dalam konteks ini kontribusi merupakan bentuk komitmen bersama tidak hanya individu yang memperkuat partisipasi dalam proses penganggaran gereja khususnya Gereja Protestan Maluku (GPM).

Partisipasi anggaran berbasis kontribusi selain menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan gereja, tetapi juga menunjukkan partisipasi aktif warga jemaat dalam merencanakan anggaran dan alokasi anggaran yang mendukung visi misi GPM. Hal ini menggambarkan bagaimana nilai KASIH diwujudkan dalam keputusan-keputusan anggaran, di mana kontribusi yang diberikan merupakan bentuk dukungan jemaat dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Lebih jauh, kontribusi yang didasari atas KASIH dapat menciptakan dan menumbuhkan serta mempererat persatuan di antara anggota jemaat, karena kontribusi yang diberikan merupakan bagian dari upaya bersama mencapai bersama. Untuk itu kontribusi perlu dikelola dan diintegrasikan dalam



anggaran gereja secara sehingga jemaat dapat melihatnya, maka rasa persatuan, rasa memiliki, solidaritas akan cenderung meningkat dan dapat mengatasi perbedaan yang ada di antara anggota jemaat. Dengan demikian, kontribusi sukarela tidak hanya sebagai sumber pendanaan, tetapi sebagai sarana untuk memperkuat keterlibatan dan persatuan dalam proses pengelolaan anggaran yang mencerminkan nilai-nilai KASIH.

Bab ini akan membahas secara mendalam bagaimana kontribusi sukarela, sebagai salah satu wujud KASIH mendukung partisipasi anggaran yang mempererat kepercayaan dan persatuan warga jemaat. Pembahasan bab ini akan menjelaskan bagaimana kontribusi sukarela dapat terintegrasi secara efektif dalam proses penganggaran, menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat anggota jemaat untuk menjalankan pelayanan gereja.

6.2 Memberi dengan hati: Sukarela Menjadi Dasar Kontribusi

Sukarela menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu dengan kemauan sendiri, dengan rela hati dan tanpa paksaan atau kewajiban. Ada dorongan yang kuat dari dalam berupa niat baik dan keinginan untuk memberikan sesuatu. Dalam konteks ajaran Kristen, konsep sukarela memiliki makna yang mendalam. Di mana tindakan sukarela ini sering dipandang sebagai perwujudan KASIH, pengorbanan dan ketaatan kepada ajaran Kristus. Sukarela tidak hanya mencerminkan tindakan fisik, tetapi juga merupakan cerminan hati yang tulus dan iman yang mendalam. Dan hal ini Kristus lakukan untuk manusia, dengan mengorbankan nyawanya disiksa dan mati untuk menebus dosa manusia tidak ada KASIH yang lebih besar daripada KASIH seorang yang memberikan

a untuk sahabat-sahabatnya (Yohanes 15:13). Bentuk KASIH yang



sempurna yang diberikan Tuhan kepada manusia di mana Allah memberikan anakNya mati untuk menebus dosa-dosa manusia.

Dalam banyak ajaran gereja, sukarela dianggap sebagai tindakan yang sangat dihargai karena menunjukkan ketulusan hati dan komitmen kepada sesama manusia. Dalam kita Injil 2 Korintus 9:7 berbunyi:

“...Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita...”

Alkitab menekankan pentingnya pemberian yang dilakukan dengan sukacita dan kerelaan hati. Memberi secara sukarela menunjukkan bahwa pemberian itu tidak didorong oleh kewajiban atau rasa bersalah, melainkan oleh dorongan hati yang tulus, ikhlas dan penuh KASIH. Ketika seseorang memberi dengan sukarela, dia melakukannya karena dia ingin melakukannya, bukan karena dia harus melakukannya. Ini berarti bahwa tindakan memberi seharusnya bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi juga tentang sikap hati dan motivasi dibalik pemberian tersebut. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita karena tindakan tersebut mencerminkan KASIH dan kemurahan hati Allah sendiri.

Bentuk sukarela dalam penelitian ini adalah kontribusi dalam bentuk material dan non material. Bentuk material seperti : pemberian dalam bentuk uang dan bahan atau barang. Bentuk non material seperti: kontribusi dalam bentuk waktu, tenaga, pikiran/ide, doa, konseling dan pendampingan. Gereja dalam hal ini GPM memperoleh dukungan dari partisipasi jemaat dalam bentuk kolekte kebaktian, persembahan syukur, pengumpulan, persepuluhan, sumbangan. Kontribusi material ini digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pelayanan dan operasional gereja. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu informan:



.misalnya ada program 10 program dengan dana 40 juta tetapi yang ada mampu danai hanya 20 juta , maka ada selisih 20 jutat, maka peserta persidangan secara 'karela mengatakan akan kami biayai kekurangan tersebut maka itu tidak akan enjadi masalah...” (Manuskrip: 01)

Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa jemaat akan membantu pelayanan gereja dengan bantuan dana sehingga program pelayanan bisa berjalan dengan baik. Dalam bentuk non material yaitu waktu, tenaga, pikiran yang diberikan untuk melayani pelayanan di gereja maupun menjadi pengurus atau pelayan.

Kontribusi material maupun non material berupa uang dan barang, makna teologisnya dimaknai sebagai KASIH karunia ALLAH. Ini berdasarkan hasil wawancara:

"saya dudukkan teologisnya dulu. Semua perbendaharaan gereja baik uang maupun barang, bergerak maupun tidak bergerak, itu dipahami oleh gereja sebagai bentuk "KASIH karunia Allah". Jadi gereja memahami bahwa gereja mendapat itu dalam bentuk penerimaan kolekte, hibah. Gereja melihat itu bahwa gereja ada untuk misi yang melaksanakan amanat pelayanan yang tertuang dalam aturan gereja Bab IV Pasal 8, yaitu:

- a. *Pekabaran Injil di dalam dan di luar gereja*
- b. *Ibadah Jemaat, Pemberitaan Firman Allah, dan Pelayanan Sakramen Kudus (Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus);*
- c. *Pendidikan, pelayanan KASIH, keadilan dan perdamaian;*
- d. *Pembinaan kemandirian di bidang Teologi, Daya dan Dana;*
- e. *Pelayanan penggembalaan dan Disiplin Gereja (pastoralia);*
- f. *Sekolah Minggu/Tunas Pekabaran Injil dan Katekisasi;*
- g. *Pendidikan Agama Kristen dari Pendidikan Usia Dini sampai Perguruan Tinggi;*
- h. *Pembinaan umat di dalam keluarga-keluarga jemaat di antara kelompok kategorial, fungsional, profesional dan sektoral;*
- i. *Pemberdayaan (Pengembangan) ekonomi umat;*
- j. *Pelesatarian lingkungan hidup;*

Anggaran yang bersumber dari jemaat merupakan kontribusi jemaat yang menjadi kekuatan utama pelaksanaan amanat panggilan dan pengutusan GPM pada setiap aras bergereja. Dan hal ini terbukti dengan kontribusi yang diberikan oleh jemaat berupa uang dan barang membuat GPM masih eksis hingga saat ini. Bentuk lainnya adalah kontribusi pikiran, waktu, ide adalah ketika persidangan dilakukan dapat dilihat pada jadwal persidangan di Bab 4, menunjukkan bahwa

sidang harus menyiapkan waktu khusus karena persidangan sangat waktu dan pikiran. Dikatakan menyita waktu karena persidangan



dilakukan satu hari full yang membutuhkan kontribusi pikiran dan ide secara serius. Pembahasan program dan pelayanan selain belanja rutin. Diantaranya: Pembinaan anak remaja dan katekisasi, pembinaan pemuda, pembinaan kemitraan laki-laki dan perempuan, pembinaan warga gereja senior, pembinaan keluarga, pembinaan warga gereja profesi, pembinaan peribadahan dan musik gereja, pembinaan pastoral dan konseling, pemberitaan injil, pelayanan hukum dan advokasi, pelayanan pendidikan, pelayanan Kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan sosial, politik dan budaya umat, pembinaan Kerja sama antar umat beragama dan aliran kepercayaan, lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan, bencana alam dan sosial, pengembangan staf, pembinaan sistim dan manajemen keuangan gereja, pembinaan sumber-sumber keuangan gereja, pembinaan infrastruktur, pembinaan aparatur pelayanan, penelitian dan perencanaan dan pengembangan, pengendalian program, pengelolaan hubungan kerja sama, pengelolaan informasi, dokumentasi dan publikasi, komunikasi pelayanan.

Peserta persidangan akan memberikan kontribusinya untuk program dan anggaran dari bidang pelayanan diatas selain pengeluaran rutin. Dengan kontribusi pikiran dari peserta maka akan menghasilkan program dan anggaran yang akuntabel dan transparan yang sesuai dengan kebutuhan umat. Manfaat dari kontribusi sukarela tidak hanya terlihat pada pelaksanaan program-program gereja, tetapi juga pada penyusunan dan implementasi anggaran yang lebih efektif. Dengan adanya kontribusi yang berkelanjutan dari jemaat, penyusunan anggaran lebih akurat dan responsive terhadap kebutuhan jemaat. Selain itu, kontribusi non material seperti waktu dan tenaga mendorong efesiensi dalam penggunaan anggaran, sehingga dana yang tersedia dapat dialokasikan

optimal untuk kegiatan pelayanan.



Dalam konteks partisipasi di desa Poka, kontribusi masyarakat dalam bentuk material dan non material. Bentuk material dalam bentuk barang atau bahan ketika ada perbaikan saluran air di lingkungan maka masyarakat akan membantu menurut kerelaan hati, satu keluarga memberikan satu semen, satu keluarga memberikan batu, di mana intinya mereka mau membantu agar lingkungan tempat tinggal mereka menjadi nyaman. Pemberian hasil panen kepada tetangga atau kenalan di desa Poka. Bentuk lainnya kontribusi dengan ikut terlibat dalam proses Bentuk non material seperti remuk warga, Musdes dan Musrenbang, di mana warga desa secara sukarela berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bagi komunitas. Ini mencerminkan komitmen warga terlibat dalam proses Pembangunan desa. Kerja bakti di mana, setiap bulan ada gerakan kerja bakti di sekitar Pantai desa poka (GAROPA) di mana masyarakat terlibat dan juga menyediakan tenaga ketika ada program di lingkungan mereka, maka warga di sekitar lingkungan akan turut membantu seperti memasang umbul-umbul atau pun membersihkan lingkungan tempat kegiatan dijalankan.

6.3 Merajut Kepercayaan dan Persatuan: Peran Penerima Kontribusi Dalam Komunitas

Salah satu elemen penting untuk membangun dan memperkuat interaksi sosial antar anggota yaitu penerimaan kontribusi. Kontribusi yang diterima berupa uang, barang, tenaga, waktu yang diberikan individu kepada komunitas atau kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya membentuk partisipasi, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap dinamika sosial dalam komunitas terutama dalam hal kepercayaan dan persatuan. Kepercayaan adalah dasar fundamental dari sosial dalam suatu masyarakat (Weipert-Fenner et al., 2024).



Dalam konteks partisipasi anggaran, masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam proses tersebut, ketika masyarakat aktif memberikan kontribusi baik dalam bentuk ide, pikiran dan kontribusinya diterima dengan baik, maka ini dapat memperkuat masyarakat terhadap sistim dan pengambilan tersebut. Masyarakat merasa bahwa mereka dihargai dan diakui apalagi ketika kelompok masyarakat yang terpinggirkan diperhatikan kepentingannya. Ini mengakibatkan mereka akan meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam proses selanjutnya. Hal ini pun terjadi di desa Poka, Pemerintah Desa Poka membuka ruang-ruang publik, dan ketika aspirasi masyarakat didengar, maka ketika waktu mendatang masyarakat diundang mereka akan ikut berpartisipasi. Hal lain ketika program yang diusulkan oleh masyarakat tidak dapat direalisasi maka Pemerintah Desa dalam forum-forum formal akan memberitahukan kepada masyarakat alasan mengapa program tersebut tidak dijalankan akibat keterbatasan anggaran. Tata kelola pemerintah yang transparan akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam konteks partisipasi anggaran di GPM, kepercayaan masyarakat lebih kepada Gereja dibandingkan dengan pemerintah. Hal ini dibuktikan ketika lonceng gereja berbunyi untuk warga gereja berkumpul, warga gereja akan datang beramai-ramai datang ke gereja untuk membahas program dan anggaran gereja. Akan tetapi jika toleng-toleng (kentongan) berbunyi untuk mengundang warga desa datang membahas program dan anggaran desa, antusias warga sangat rendah. Dengan demikian, pemerintah desa akan mempergunakan moment persidangan gereja juga untuk membahas program dan anggaran desa. Hal ini berdasarkan informasi dari salah satu informan:



*ta punya pengalaman di jemaat tertentu, desa tertentu membawa APBnya untuk
va di sidang jemaat karena biasanya kepala desa mengundang masyarakat
membahas APBDes jarang orang hadir, tetapi kalo membahas anggaran gereja*

orang hadir karena itu daripada susah-susah cari moment maka digunakan moment persidangan ...”(Manuskrip: 04)

Ini juga menjelaskan bahwa ketika tata kelola gereja yang transparan maka akan meningkatkan kepercayaan umat terhadap gereja dan juga sebaliknya. Kepercayaan menjadi simbol dari interaksi sosial maka juga akan memperkuat persatuan diantara komunitas. Keterlibatan komunitas dalam kegiatan atau program membutuhkan kontribusi kolektif, masyarakat seringkali harus bekerja sama meskipun mungkin ada perbedaan dalam latar belakang, pandangan atau kepentingan pribadi. Melalui kontribusi, maka masyarakat dapat menemukan kesamaan tujuan dan nilai yang membantu mengurangi perbedaan dan meningkatkan persatuan. Kolaborasi dalam program dengan keterlibatan masyarakat secara bersama-sama menciptakan ikatan yang lebih kuat antar anggota komunitas. Hal ini dapat dilihat dari program GAROPA (Gerakan Bersih Pantai Poka).

6.4 Refleksi

Kontribusi dalam komunitas, ketika dipandang sebagai wujud KASIH, memiliki dampak yang mendalam dalam memperkuat ikatan sosial dan membangun fondasi yang kokoh bagi kerja sama dan persatuan. Nilai sukarela yang mendasari tindakan kontribusi mencerminkan komitmen tulus anggota komunitas untuk berpartisipasi demi kebaikan bersama, tanpa mengharapkan imbalan. Tindakan-tindakan sukarela ini, yang dipandu oleh KASIH, membentuk dan memperkuat kepercayaan antar anggota komunitas.

Kepercayaan yang terbangun dari kontribusi yang tulus menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Hal ini memungkinkan terjalinnya kerja sama yang lebih erat dan efektif dalam



mencapai tujuan bersama. Selain itu, KASIH yang terwujud dalam kontribusi juga memiliki kekuatan untuk mengatasi perbedaan, menggabungkan beragam latar belakang, dan membentuk persatuan yang kokoh di dalam komunitas.

Dengan demikian, kontribusi yang dilandasi oleh KASIH tidak hanya sekedar memberikan manfaat material, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun komunitas yang lebih kuat, solid, dan harmonis. Nilai-nilai KASIH, sukarela, kepercayaan, dan persatuan yang dihidupkan melalui kontribusi ini menjadi dasar yang esensial bagi terciptanya komunitas yang sehat dan sejahtera.



BAB VII

AKUNTABILITAS: PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TUHAN DAN SESAMA MANUSIA

7.1 Pengantar

Transparansi anggaran dan keterlibatan telah menjadi pilar akuntabilitas (Carlitz, 2013). Transparansi dan keterlibatan publik menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu aspek terpentingnya adalah akuntabilitas dalam penganggaran. Penganggaran yang akuntabel tidak hanya memastikan bahwa dana publik digunakan dengan benar dan efisien, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Model partisipasi anggaran merupakan pendekatan yang mengutamakan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dalam proses penganggaran. Melalui model ini akuntabilitas dapat diimplementasikan dengan baik karena adanya pengawasan yang lebih luas dan beragam.

Dalam bab ini, akan dibahas beberapa jenis akuntabilitas yang menjadi fokus dalam model partisipasi anggaran yaitu: akuntabilitas spiritual, akuntabilitas horizontal, akuntabilitas vertikal, akuntabilitas sosial. Pemahaman yang mendalam dari praktik akuntabilitas ini, membantu kita melihat bagaimana model partisipasi anggaran dapat berfungsi secara efektif dan efisien yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, responsif dan bertanggungjawab.



7.2 Akuntabilitas Spiritual

Pengertian akuntabilitas secara tradisional menurut Roberts dan Scapens (1985) adalah suatu hubungan yang meliputi pemberian dan penerimaan dari suatu sebab yang dapat diterima secara akal sehat. Pengertian ini mengasumsikan bahwa setiap individu, kelompok kecil atau organisasi harus mempunyai kepastian hukum yang menjadi dasar untuk tindakan yang diambil. Robert (1996) menggarisbawahi bahwa akuntabilitas mempunyai aspek sosial yang menjadi instrumen dari nilai moral. Dengan pemahaman demikian, maka akuntabilitas tidak terbatas pada pertanggungjawaban akan sesuatu yang diserahkan antara dua pihak tetapi menyangkut aspek moral yang selalu diperjuangkan dalam suatu organisasi. Disamping itu, akuntabilitas juga menyangkut keadaan pertanggungjawaban seseorang terhadap yang sifatnya transeden dengan Yang Maha Kuasa yang disebut spiritual. Di mana Kitab Injil Roma 14:12 dan Lukas 16 : 10-12 yang berbunyi demikian:

"..Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah..."

"..Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam Mamon yang tidak jujur siapakah yang dapat mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartanya sendiri kepadamu.."

Hal ini memberikan makna bahwa apa pun yang kita kerjakan harus dipertanggungjawabkan sesungguhnya bukan kepada manusia saja tetapi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hubungan antara manusia dan Tuhan merupakan

1 pribadi (transeden) yang dipraktikkan dalam bentuk akuntabilitas
Dan unsur utama yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk



mewujudkan akuntabilitas yang menjadi dasar utama dalam ajaran Kristus yaitu kesetiaan dan kejujuran. Akuntabilitas spiritual harus menjadi gaya hidup seperti yang dikatakan oleh salah satu informan:

“...Spiritual yang menggerakkan orang untuk berjalan bersama. Spiritualitas beda dengan pengetahuan agama. Pengetahuan agama hanya sebatas tahu kalo harus jujur, tidak boleh mencuri. Tetapi jika menjadi spiritualitas agama maka akan menjadi gaya hidup, orang akan mempraktekkan itu dalam kehidupan...” (Manuskrip: 03)

Spiritual tidak hanya sebatas pengetahuan tetapi harus dipraktikkan jika tidak boleh mencuri ya kita praktikkan tidak boleh mencuri, jangan kita tahu tidak boleh mencuri tapi kita praktiknya kita mencuri. Gereja Protestan Maluku sebagai organisasi nirlaba bukan untuk mencari keuntungan. Sumber pendapatan GPM diterima dari jemaat yakni: persembahan dari ibadah, pengucapan syukur, pergumulan, persepuluhan, sumbangan. Jumlah persembahan yang diterima dari jemaat cukup besar. Penerimaan gereja yang besar tanpa adanya pertanggungjawaban akan menjadi penyebab penyalahgunaan keuangan gereja (Kedoh & Sulindawati, 2022). GPM sebagai gereja melakukan transparansi dan akuntabilitas atas penerimaan yang diterima, karena Uang menurut GPM sebagai “KASIH Karunia Allah”. Warga GPM ada yang memiliki pandangan secara teologis bahwa jika uang yang diberikan kepada Tuhan itu tidak perlu diingat-ingat lagi. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan:

“... ada satu sikap warga gereja bahwa ketika kita sudah memberikan uang ke gereja maka tidak perlu tanya-tanya itu merupakan pemahaman teologi tetapi gereja justru melakukan hal lebih dari itu mengelola keuangan gereja mengelola keuangan gereja secara terbuka dan jujur maka itu ada sidang jemaat, ada tim verifikasi dan warta jemaat yang tiap hari minngu. Laporan keuangan gereja dilaporkan kepada umat setiap hari minggu lewat warta jemaat. Ini bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kepada umat...” (Manuskrip: 02)

GPM melakukan apa yang lebih dari itu, uang gereja diverifikasi oleh tim Verifikasi yang dibentuk untuk oleh masing-masing tingkatan jemaat, klasis dan sinode.

dilakukan setiap semester, dan hasilnya dilaporkan pada saat
jan. Hasil dari Tim Verifikasi melakukan persidangan pada tiap aras



tingkatan baik itu di jemaat, klasis dan sinode sebagai bentuk pertanggungjawaban GPM baik terhadap manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selain itu bentuk akuntabilitas Gereja Protestan Maluku melibatkan warga gereja dalam memutuskan anggaran, merupakan bentuk nyata dari akuntabilitas.

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu informan:

“..mengapa gereja melibatkan warga gereja bukan hanya pimpinan gereja yang memutuskan anggaran harus warga gereja, harus peserta sidang karena gereja mengelola uang dengan asas akuntabilitas, transparansi, bertanggungjawab, jujur dan takut Tuhan..” (Manuskrip.; 02)

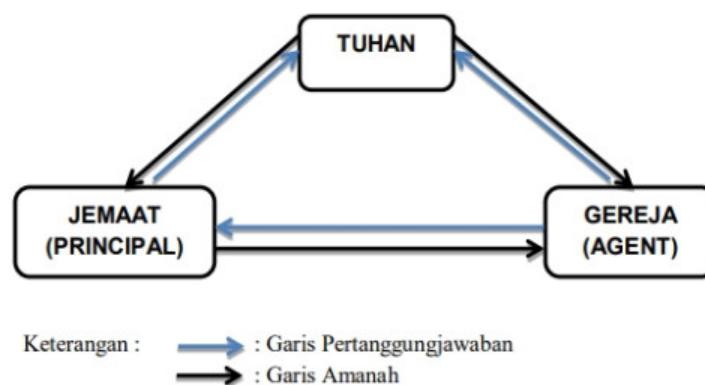
Manfaatnya warga gereja mengetahui dana yang digunakan dengan transparan bentuknya berupa laporan pertanggungjawaban program dan keuangan periode berjalan menjadi agenda dalam persidangan dapat dilihat pada jadwal persidangan. Agenda pertanggungjawaban menjadi sesi pertama sebelum pembahasan program dan anggaran. Dari pengamatan peneliti yang ikut serta dalam proses persidangan baik ditingkat jemaat, klasis dan sinode, laporan pertanggungjawaban program pelayanan dan keuangan telah dibagikan satu minggu sebelum persidangan dan masing-masing wakil keputusan akan memberikan tanggapan atas laporan tersebut dengan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban tersebut. Jika semua peserta sidang setuju, palu sidang diketuk, hal itu menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban diterima.

Persidangan dilakukan di dalam gedung gereja yang didahului dengan kebaktian. Gedung Gereja dan kebaktian pembukaan sidang menunjukkan kesakralan dan kesucian umat Kristiani. Dengan melakukan persidangan di dalam ruang gereja dan kebaktian pembukaan sidang hal ini menunjukkan bahwa persidangan yang dilakukan dimaknai sebagai wujud pertanggungjawaban

Tuhan Yang Maha Kuasa. Wujud akuntabilitas spiritual juga bahwa gerejawi dalam merancang, menyusun dan memutuskan program



dan anggaran harus didasarkan atas keimanan, penghayatan, rasa tulus dan kejujuran kepada Tuhan. Wiryoputro (2002), mengungkapkan tiga hal yang mendasari manusia dalam melakukan setiap aktivitasnya, yaitu: pertama, taat kepada perintah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Abraham (Kejadian 12:1-4), Kedua, harus menjadi berkat atau bermanfaat bagi orang lain (Yohanes 5:36), Ketiga, memiliki rasa tanggung jawab seperti yang dilakukan Tuhan (Yohanes 3:15-17).



Sumber : Gah (2020)

Gambar 7.1 Akuntabilitas Gereja

7.3 Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban pihak gereja kepada jemaatnya (Kedoh & Sulindawati, 2022). Bentuk pertanggungjawaban kepada jemaatnya berupa warta keuangan yang dikeluarkan setiap minggu kepada umat. Dengan warta keuangan yang diterbitkan setiap minggu, jemaat akan mengetahui kondisi keuangan gereja. Penerimaan dan pengeluaran yang diterima dari aktivitas pelayanan selama seminggu oleh Bendahara dilaporkan

umat. Berikut contoh warta keuangan yang dilaporkan.



The image displays three side-by-side spreadsheets from a church's financial records for 2024. Each spreadsheet has columns for 'No', 'Uraian', 'Jumlah', and 'Total'. The first spreadsheet, titled 'REKAPITULASI PENGANTARAN', lists offerings like 'Pengantaran Tetap', 'Pengantaran Rutin', and 'Pengantaran Khusus'. The second spreadsheet, also titled 'REKAPITULASI PENGANTARAN', lists offerings like 'Pengantaran Rutin', 'Pengantaran Khusus', and 'Pengantaran Lain-lain'. The third spreadsheet, titled 'REKAPITULASI PENGANTARAN', lists offerings like 'Pengantaran Rutin', 'Pengantaran Khusus', and 'Pengantaran Lain-lain'. Each spreadsheet shows a detailed breakdown of the church's income from offerings.

Sumber: dokumen gereja (2024)

Gambar 7.2 Warta Keuangan Jemaat

Selain di Gereja, Pemerintah Desa juga melakukan akuntabilitas di mana masyarakat menjadi pusat (control) dari sebuah pembangunan. Hal ini sejalan dengan dengan *Teori Democratic Citizenship* dari Denhart and Denhart (2003) yang memandang warga negara bukan sebagai entitas dan objek dari sistim hukum yang diatur dan dikendalikan oleh hak dan kewajiban legal, akan tetapi harus menempatkan masyarakat sebagai aktor pembangunan aktif untuk menjamin hak warga negara membuat pilihan sesuai dengan kepentingannya. Dengan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan dan anggaran kegiatan, mulai remuk warga, musyawarah desa hingga musrenbang akan memberikan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi kepada setiap warga desa dan kan masyarakat yang sejahtera (Hasniati, 2016). Pada waktu Musdes untuk TIM Sembilan. Tim ini bertugas salah satunya melakukan



pengecekan harga di toko-toko terhadap nilai anggaran yang masuk pada program. Karena itu nilai rupiah yang masuk dalam anggaran itu sudah melalui pengecekan keakuratannya.

“..mereka yang turun melakukan pengecekan terhadap program yang diusulkan. Contohnya kemarin kita mau buat program Air Minum di RT, TIM RKP akan turun lapangan untuk melakukan survey di lokasi bahkan melakukan pengecekan di took-toko untuk harga barang..” (Manuskrip: 08)

Keterbukaan pemerintah desa Poka dalam hal penggunaan dana desa dibuat dalam bentuk baliho yang dipasang pada depan kantor desa sehingga masyarakat umum dapat mengetahui penggunaan dana desa. Selain itu pemerintah desa Poka, jika ada perubahan anggaran akan membuat rapat untuk mengundang Ketua RT, RW, PKK, BPD untuk memberitahukan perubahan tersebut disertai dengan alasan-alasannya kepada masyarakat. Seperti informasi yang diberikan dari salah satu informan:

“...jadi disitu masyarakat juga mengutarakan kekecewaan, masyarakat akan bersungut jika programnya tidak jalan. Kenapa tidak Ya tidak jalan tergantung anggaran. Kalo anggaran dana desa aitu 100 % oke, kalo Alokasi dana desa ADD dari pemeritnah kota jadi tidak pernah 100 % berjalan. Kalo dana desa itu dari pusat...”(Manuskrip: 06)

Keterbukaan informasi kepada masyarakat, maka respon masyarakat pasti ada. Ada yang menyatakan kekecewaan jika ada program yang tidak berjalan. Disini menunjukkan keterbukaan informasi akan mendapat reaksi, tetapi hal itu sangat baik karena masyarakat dapat mengetahui tentang anggaran. Selain itu, dibutuhkan ketrampilan pimpinan untuk dapat menjelaskan dengan baik, menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti dan mau ikut berpartisipasi Hamzah (2015) dalam Sri Rejeki (2015). Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:



“...a kita sebagai pemimpin bisa menyampaikan segala sesuatu dengan baik, bisa sam maka masyarakat akan ikut berpartisipasi...” (Manuskrip:06)

Setelah itu Ketua RT, RW akan memberitahukan kepada masyarakat. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan:

“... ketua RT akan mengumpulkan warga dan memberitahukan kenapa usulan warga tidak dipenuhi, ada warga yang bertanya dan nngotot, tapi semua itu tergantung ketua RT menjelaskan dengan baik kepada warganya...” (Manuskrip: 08)

7.4 Refleksi

Akuntabilitas dalam partisipasi anggaran tidak hanya didasarkan pada prinsip administratif dan teknis saja, namun juga mencerminkan tanggung jawab moral yang mendalam. Dari sudut pandang yang lebih luas, akuntabilitas dalam konteks ini, merupakan wujud nyata dari kepercayaan yang diberikan masyarakat dan Tuhan kepada kita, yang berarti akuntabilitas tidak hanya kepada individu tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ketika kita berbicara tentang akuntabilitas, kita berbicara tentang transparansi, kejujuran dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada kita. Dalam konteks keuangan, tanggung jawab ini mencakup penggunaan dana publik secara bijaksana dan tepat serta mempertimbangkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Namun selain itu, dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan, kita diminta untuk mencerminkan nilai-nilai spiritual, di mana semua pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat, namun merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan.

Sebagai umat beriman, kita diajarkan bahwa setiap keimanan yang kita lakukan merupakan wujud KASIH Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Oleh karena itu, anggaran yang disusun dan dilaksanakan harus menunjukkan rasa cinta, keadilan, dan perhatian terhadap masyarakat yang paling tidak mampu. Dalam hal ini, akuntabilitas alat untuk memastikan bahwa setiap rupee dibelanjakan untuk tujuan



yang lebih tinggi, yaitu untuk melayani masyarakat dan memberikan pelayanan kepada mereka yang paling membutuhkan.

Selain itu, tanggung jawab kita kepada Tuhan dengan partisipasi anggaran menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini bersifat spiritual. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penatalayanan yang baik, tidak hanya untuk harta benda atau nilai-nilai kita, namun juga untuk kebaikan orang lain yang dapat memengaruhi keputusan kita. Di sini akuntabilitas sangat penting, karena kita menunjukkan melalui keterbukaan dan transparansi bahwa kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap sesama manusia, namun juga mendengarkan panggilan moral dan spiritual kita untuk melakukan keadilan, keadilan dan cinta KASIH. Pada akhirnya, kita diingatkan untuk bertanggungjawab dalam partisipasi anggaran. Anggaran bukanlah hanya soal angka atau laporan, namun tentang ketaatan kita untuk berbuat baik dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama dimana segala tindakan menunjukkan keimanan dan komitmen untuk menciptakan kehidupan dunia yang lebih baik.



BAB VIII

SINERGI: BERGANDENG TANGAN DALAM KASIH

8.1 Pengantar

Tujuan dari upaya Pembangunan negara adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warganya melalui perencanaan, perancangan program dan anggaran yang tepat (Ranjan Mishra, 2014). Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup, maka daerah-daerah dan desa di seluruh Indonesia dikuncurkan program dana desa dengan alokasi anggaran triliunan rupiah. Dana desa ini untuk memberdayakan masyarakat desa, agar desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. (Faizal,Nain, 2018).

Perencanaan, perancangan program dan anggaran harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat desa, karena itu keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut sangat penting. Partisipasi anggaran dengan melibatkan masyarakat akan membawa kepada peningkatan kualitas hidup. Pembahasan pada bab ini akan membahas keterlibatan stakeholder dalam penyusunan program dan anggaran.

Belajar dari praktek partisipasi anggaran Gereja Protestan Maluku dan Pemerintah Desa Poka penelitian ini menemukan nilai sinergi. Bab ini akan membahas kekuatan sinergi dari alam semesta dan nilai sinergi dalam bentuk Masohi sebagai kearifan lokal masyarakat Maluku.



8.2 Menyatukan Kekuatan: Rahasia Dibalik Sinergi Alam Semesta

Sinergi adalah konsep di mana berbagai elemen bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih besar dibandingkan jika bekerja sendiri-sendiri. Dalam konteks alam semesta, sinergi merupakan prinsip dasar yang mengatur peran berbagai sektor dan kekuatan di dunia untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni. Pertama, penyatuan alam semesta terlihat pada interaksi gravitasi yang mengatur pergerakan planet, bintang, dan galaksi. Gravitasi memastikan bahwa planet-planet menahan bintang, galaksi, dan alam semesta pada tempatnya. Selain itu, benda-benda gelap bekerja sama dengan energi gelap, dua elemen yang menguasai dunia. Materi gelap membantu mengikat galaksi-galaksi, dan energi gelap mempercepat perluasan alam semesta. Interaksi antara kedua elemen ini mewakili kombinasi yang kompleks namun perlu untuk menjaga struktur dan dinamika dunia (Holling, 1973).

Dalam skala yang lebih kecil, sinergi terjadi pada proses pembentukan bintang dan galaksi. Awan gas dan debu runtuh akibat pengaruh gravitasi, membentuk bintang-bintang baru. Bintang-bintang ini bekerja sama dalam sistem besar untuk membentuk galaksi. Pada saat yang sama, fusi nuklir terjadi di inti bintang, inti atom bergabung satu sama lain dan energi dilepaskan. Energi ini tidak hanya mendukung bintang-bintang untuk terus bersinar, tetapi juga menyediakan panas dan cahaya yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di planet seperti bumi. Bumi sendiri adalah contoh bagus dari sinergi alam semesta. Letaknya di tata surya sangat ideal untuk menunjang kehidupan karena berada di tempatnya dan berinteraksi dengan matahari dan bulan. Di Bumi, ekosistem menunjukkan

n yang kompleks, di mana organisme bergantung satu sama lain dalam makanan dan siklus biologis untuk menjaga keseimbangan ekologi.



Dalam skala yang lebih besar, fusi juga terlihat dalam pembentukan galaksi dan gugus galaksi, di mana galaksi-galaksi tersebut terikat bersama oleh energi untuk membentuk struktur besar yang dikenal sebagai jaringan kosmik. Jaringan ini menunjukkan konektivitas yang luas di seluruh dunia, mencerminkan integrasi dalam skala global.

Sinergi dalam hidup tidak hanya menjadi landasan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan segala sesuatu, tetapi juga menjadi motivasi yang besar bagi manusia. Misalnya, konsep sinergi dapat diterapkan pada strategi teknis dan keberlanjutan guna menciptakan sistem yang lebih baik dan ramah lingkungan (Capra, 1996). Secara keseluruhan, sinergi di alam semesta adalah contoh sempurna dari bagaimana berbagai elemen dan kekuatan dapat bekerja bersama untuk menciptakan harmoni dan keteraturan yang luar biasa. Memahami dan menerapkan konsep sinergi ini dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu manusia untuk hidup lebih harmonis dengan alam dan dengan sesama.

Sinergi dengan alam semesta merupakan sebuah konsep yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan hukum dan kekuatan alam semesta yang lebih besar. Penerapan prinsip-prinsip ini mempunyai banyak manfaat penting bagi individu, masyarakat, dan lingkungan secara keseluruhan. Manfaat-manfaat ini mencakup keseimbangan ekologi, kemakmuran, kesejahteraan manusia, teknologi baru, pertumbuhan dan kesejahteraan spiritual, dan sebagainya. Manfaat-manfaat ini mencakup keseimbangan ekologi, kemakmuran, kesejahteraan manusia, teknologi baru, pertumbuhan dan kesejahteraan spiritual, dan sebagainya (Berry, 1999). Dengan menggunakan prinsip-prinsip pemersatu ini, masyarakat tidak hanya dapat menciptakan dunia

il dan harmonis, namun juga menemukan kedalaman hubungan mereka.



Kerja sama ini adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang seimbang, bermakna, dan berkelanjutan di planet yang kita cintai.

8.3 Sinergi dalam Partisipasi Anggaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Sinergi yaitu kegiatan atau operasi gabungan. Kanter (1989) sinergi adalah interaksi dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing unit jika melakukannya sendiri-sendiri. Covey (1989) menggunakan istilah sinergi dalam suatu hubungan komunikasi yang terbentuk dari integrasi antara semangat kerja sama bertaraf tinggi dan hubungan saling percaya. Sinergi ini merupakan proses kreatif yang dibangun secara bersama atas dasar rasa saling percaya dan semangat kerja sama yang sangat tinggi. Hampden-Turner (1990) menyatakan bahwa aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas, yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru.

Bennis dan Biederman (1997), mengartikan kerja sama yang sinergistik bila kerja sama itu bersifat kolaboratif dan disebutnya sebagai *creative collaboration* dengan komitmen yang kuat untuk kepentingan organisasi. Dari konsep yang dipaparkan, perlu suatu usaha manajerial untuk memperoleh sinergi. Sinergi terjadi melalui suatu dinamika yang menyangkut sekelompok orang yang berinteraksi dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu sinergi terwujud dari perpaduan perilaku para anggota kelompok yang berinteraksi di antara sesama mereka. Hasil itu diperoleh dari suatu pertemuan dialogis, saling keterbukaan, menerima pendapat orang, tidak merasa terancam secara intelektual maupun

atas gagasan orang lain. Sinergi dapat disimpulkan merupakan interaksi yang terjadi akibat adanya suatu pertemuan tatap muka yang secara



bersama-sama menghasilkan aksi atas dasar rasa saling percaya, saling keterbukaan dan komitmen untuk menghasilkan keputusan bersama.



Maluku sebagai wilayah kepulauan, dimana Desa Poka memiliki potensi besar untuk mengelola sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu keunggulan usaha masyarakat. Pemerintah Desa Poka melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah kota Ambon, Kementerian Perikanan dan Kelautan melalui Badan Penyuluhan dan Perikanan memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang ada desa Poka. Hasilnya adalah desa Poka menjadi salah satu dari 10 desa di seluruh Indonesia sebagai pilot project *Smart Fisheries Village* (SFV). Hal ini diungkapkan dari salah satu informan dan Pejabat Kota Ambon yang kutipan dari berita online RRI:

"...kampung perikanan cerdas desa, itu terkait dengan ikan kue, ikan bubar, mutiara dan lobster. Mutiara Kerjasama dengan BP3 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Cuma ada 10 di Indonesia. Salah satunya ada di desa Poka. Jadi itu bukan hanya pengembangan untuk pelaku usaha perikanan, tetapi kawasan itu akan dibuat pemberdayaan, ekonomi kreatif. Ini juga MoU dengan pemerintah kota ada beberapa OPD yang terlibat.."

"...Harapannya sinergitas ini akan berdampak luas bagi masyarakat di Kota Ambon, "harapnya..."

Selain itu Pemerintah desa Poka memiliki program Garopa: Gerakan Bersih Pantai Poka yang dilaksanakan satu bulan dua kali. Dimana masyarakat terlibat bersama membersihkan pantai Poka.

"...kita juga punya kegiatan Garopa gerakan bersih Pantai, Poka dilakukan satu bulan 2 kali. Keterlibatan masyarakat sangat tinggi.." (Manuskrip: 06)

Selain dengan pemerintah kota dan dinas-dinas terkait, Pemerintah desa Poka juga melakukan kolaborasi dengan lembaga sosial masyarakat yaitu Yayasan Sagu



ng. Yayasan Sagu Salempeng bersama pemerintah Desa Poka dalam hal tanggap bencana, pelatihan hidroponik dengan memanfaatkan halaman

rumah. Pemerintah Desa Poka melakukan kerja sama, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga sosial masyarakat tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

7.4 Budaya Masohi Orang Maluku Sebagai Bentuk Sinergi

Untuk memperkuat sinergi juga dibutuhkan solidaritas. Solidaritas dapat dimaknai sebagai perasaan saling percaya, menjadi terdorong untuk bertanggungjawab dan memperhatikan kepentingan bersama (Setyowati, 2021). Tindakan mementingkan diri sendiri dan kelompok sudah harus dihilangkan. Solidaritas sosial menurut Emili Durkheim (Ritzeer, 2008) merupakan suatu gejala moral. Bagi bangsa Indonesia, solidaritas sosial merupakan kekuatan sebagai bangsa yang majemuk. Solidaritas sosial dapat dikelola baik pada level masyarakat maupun pemerintah. Berfungsinya kelompok-kelompok sosial menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berekspresi, sehingga menumbuhkan emansipasi dan solidaritas di kalangan masyarakat.

Berbicara mengenai solidaritas sosial, di Maluku dikenal dengan *Masohi*. *Masohi* merupakan nilai kebudayaan orang Maluku yang terus dilestarikan. Istilah *Masohi* berasal dari Kabupaten Maluku Tengah, merupakan suatu bentuk kerja sama secara spontan, sehingga suatu beban hidup menjadi risiko sepenanggungan bersama. Hal ini diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat seperti dicontohkan dalam kasus membangun rumah baru, membangun gedung gereja dan masjid, membangun baileo (rumah adat) dan lain sebagainya. Agar tetap hidup dan di kenang sepanjang masa, maka kata *Masohi* tersebut dipakai oleh mantan Presiden Indonesia Ir. Soekarno untuk menamakan

Kabupaten Maluku Tengah dengan sebutan nama *Masohi* pada tanggal ber 1957.





Sumber : Teras Maluku (2017)

Gambar 8.1 Umat Islam di Ambon Bantu Renovasi Gereja

Masohi bukan hanya dipraktikkan dibidang ekonomi dan mata pencaharian saja, melainkan juga meliputi bidang-bidang kemasyarakatan. Sebagai contoh: seorang anggota kelompok turut menyumbang makanan atau membantu mengangkat bahan bangunan seperti kayu dari hutan sampai ke rumah, serta membantu dengan sukarela dalam hal mengerjakan rumah. Kegiatan Masohi dapat diikuti oleh kaum wanita, dalam hal ini kaum wanita mempunyai peranan untuk menyiapkan makanan guna keberlangsungan kegiatan tersebut. Kadang kala orang yang datang untuk melakukan Masohi lebih banyak dari jumlah pekerjaan yang tersedia, karena didasari oleh rasa sukarela dan spontanitas dari anggota masyarakat tersebut (Huwae, 2011). Bentuk-bentuk dari Masohi ditemukan di desa Poka berdasarkan informasi dari salah satu informan:

“...jika ada mau buat satu kegiatan, disatu wilayah maka kita akan melakukan koordinasi, maka sudah masyarakat datang sudah turut bekerja seperti kerjabakti, pasang umbul-umbul...”(Manuskrip: 06)



Ada juga informan yang mengatakan bahwa:

“...disini warga kalo katong mau buat apa-apa di katong lingkungan tinggal bilang saja ibu, katong baku bantu rame-rame, rumah ini kasih semen satu, rumah lain satu semen, ada yang kasih roti lalu sudah ibu katong biking akan jalan ini ibu...”
(Manuskrip: 09)

“...ibu di dalam anggaran itu tidak ada anggaran untuk biaya angkut barang, dan itu tidak boleh ada ibu. Masyarakat yang angkut barang-barang material bawa naik ka tempat lokasi kerja karena katong punk tempat kerja itu jauh dari jalan ibu, masyarakat yang angka barang-barang kerja tu ibu...”(Manuskrip: 07)

Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap sesama masih ada terbukti pada masyarakat Desa Poka yang penduduknya heterogen. Nilai-nilai harus dilestarikan dan dipupuk terus dengan diberikan ruang terbuka untuk masyarakat berkumpul. Kristus juga mengajarkan hal solidaritas sosial sebagaimana termuat dalam Kitab Injil Matius 25:35-40 yang bunyinya:

“... Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan, ketika Aku haus, kamu memberi Aku Minum, ketika Aku adalah orang asing, kamu menerima Aku...”

Ayat ini berbicara tentang pengajaran Yesus mengenai memberikan makanan kepada yang lapar, minuman kepada yang haus, dan pakaian kepada yang tunawisma. Pengajaran ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepekaan terhadap orang lain dan solidaritas terhadap sesama yang membutuhkan. Hal ini oleh Gereja Protestan Maluku, dalam penyusunan program-program gereja menganggarkan anggaran baik di jemaat, klasis dan sinode. Anggaran untuk bantuan kepada orang sakit, bantuan pendidikan untuk anak-anak berprestasi tapi kurang mampu, bantuan karitatif yang diberikan per bulan kepada janda, duda, anak yatim piatu dan orang miskin. Ini merupakan program rutin yang harus dianggarkan setiap tahun dalam anggaran belanja gereja. Bentuk solidaritas

juga terlihat antar umat beragama. Ketika malam Natal, dimana umat merayakan kebaktian malam Natal. Saudara-saudara muslim dan pemuda



Hindu (Pencalang) ikut berjaga di luar gereja. Umat Muslim menjaga agar kebaktian malam Natal umat Kristen dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan.



Sumber : Teras Maluku, 2017

Gambar 8.2 Umat Islam dan Hindu Menjaga Ibadah Malam Natal

Hal yang sama dilakukan oleh pemuda-pemudi Kristen ikut bersama-sama dengan umat Muslim melakukan takbiran bersama. Sebagaimana dikutip dari Berita RRI.Net:

“...Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri di Kota Ambon tidak hanya dilakukan aparat Kepolisian dan TNI, tapi juga melibatkan ratusan pemuda gereja. Mereka adalah pemuda gereja yang tergabung dalam Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM). Dari kemarin malam takbiran umat muslim itu terlihat sejuk. Saat pemuda Kristen dari jemaat Silo, Gereja Protestan Maluku ikut haru dalam kemeriahan malam takbiran, Jumat (21/4/2023) malam. Bersama umat muslim mereka melakukan konvoi malam takbiran di depan Gereja Silo, samping Tugu Trikora Kota Ambon. Lagu-lagu muslim dinyanyikan pemuda Kristen dengan diiringi musik ukulele dan trompet tepat di depan gereja..”

Maluku yang pernah dinodai dengan konflik antar agama, saat ini kembali lagi memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas sosial untuk membangun Maluku yang sejahtera.



8.5 Refleksi

Belajar bersama dari alam berarti mengadopsi prinsip-prinsip yang efektif dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan. Dengan meniru tindakan alam, manusia dapat menciptakan sistem yang lebih baik, efisien, dan berkelanjutan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan organisasi. Alam mengajarkan kita bahwa kerja sama, keseimbangan, kemampuan beradaptasi, efisiensi dan hidup berdampingan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan alam dan segala isinya untuk manusia menikmatinya. Dari alam, kita belajar bagaimana kerja sama, kolaborasi, sinergi akan menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dan harmoni. Sinergi diimplementasikan dalam bentuk partisipasi masyarakat dengan pemerintah desa, pemerintah kota, OPD bahkan lembaga sosial masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai dari sinergi merupakan bentuk dari solidaritas sosial yang oleh masyarakat Maluku adalah Masohi. Dimana Masohi merupakan kearifan lokal yang mengajarkan kita tentang bekerja sama, bergotong-royong, membantu sesama manusia. Ajaran Kristus juga mengajarkan hal yang sama tentang kepedulian dan solidaritas sosial kepada sesama. Ini harus diwujudkan, dipraktikkan dalam bentuk sinergi dan masohi.



BAB IX

INKLUSI: MEMPERERAT INTERAKSI SOSIAL MEMPERKECIL PERPECAHAN

9.1 Pengantar

Manusia sebagai makhluk sosial, hidup dan berinteraksi dengan orang lain merupakan kodratnya. Sejak lahir, manusia membawa identitas, nilai, dan norma melalui interaksi sosial yang membentuk perilaku dalam masyarakat. Interaksi ini tidak terbatas pada keluarga dan lingkungan sosial, namun meluas ke struktur sosial yang lebih besar, termasuk pengambilan keputusan pemerintah dan masyarakat.

Manusia sebagai bagian dari masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang memengaruhi kehidupan mereka, seperti partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran adalah suatu proses yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan dan monitoring anggaran. Dengan dibukanya ruang publik di mana masyarakat terlibat, maka masyarakat dapat memastikan bahwa anggaran yang disusun oleh pemerintah mencerminkan kebutuhan masyarakat yang digunakan secara efisien dan efektif.

Dalam konteks partisipasi anggaran, Inklusi menjadi penting karena melibatkan semua kelompok sosial, termasuk kelompok rentan untuk bersuara memberikan ide, gagasan, pikiran dalam proses ini. Dengan memastikan bahwa kebijakan anggaran mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok, proses inklusif mendorong partisipasi yang lebih besar dan mendorong interaksi sosial.



Inti dari inklusi dan kohesi sosial adalah kepedulian. Kepedulian terhadap orang lain memaksa seseorang untuk melampaui kebutuhan pribadinya dan mempertimbangkan kesejahteraan orang lain. Sikap peduli ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bermanfaat bagi semua orang, terutama mereka yang paling membutuhkan. Semakin banyak masyarakat yang mendukung kebijakan yang adil dan inklusif, semakin kuat kohesi sosialnya. Bab ini akan membahas inklusi, kohesi sosial dan kepedulian dengan menggunakan praktik yang dilakukan pada Gereja Protestan Maluku dan Desa Poka.

9.2 Mengenal Inklusi dalam Partisipasi Anggaran

Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi anggaran memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program, anggaran dan kebijakan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencapai inklusi.

Inklusi adalah suatu proses, metode atau pendekatan yang terbuka bagi semua orang. Selain itu, inklusi merupakan salah satu jenis kata sifat yang mengacu pada keadaan yang ada pada saat ini atau keadaan yang perlu dipenuhi. Pendekatan partisipasi atau inklusif adalah model yang membuka ruang, akses dan inklusi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengambilan kebijakan dan perubahan sosial. Pendekatan ini menekankan pada kewarganegaraan dan hak asasi manusia bahwa setiap warga negara dan individu mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati

pembangunan (Gufran dan Kodi, 2023). Dengan kata lain, setiap manusia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi



semua warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan.

Saat ini, fokus utama dari pemerintah dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia adalah desa inklusi. Desa inklusif adalah desa yang dibangun dengan partisipasi seluruh warga desa, dengan persetujuan masyarakat miskin, kelompok minoritas, minoritas, dan kelompok rentan. Kelompok tersebut antara lain adalah mereka yang memiliki dua hak atau lebih, antara lain penyandang disabilitas, transgender, perempuan kepala keluarga, dan kelompok minoritas (agama minoritas, etnis kecil). Seorang penyandang disabilitas bisa mempunyai dua hak sekaligus, misalnya menjadi perempuan dan menjadi anggota kelompok minoritas. Dalam perspektif *transgender*, seseorang memiliki banyak identitas (penyandang disabilitas, perempuan, kelompok minoritas, dan lain-lain) yang masing-masing identitasnya dialihkan, sehingga memperkuat diskriminasi, kekerasan, dan pengucilan dalam masyarakat.

Perlu diketahui bahwa, Desa Inklusif adalah desa yang membuka ruang dan melibatkan kelompok-kelompok yang selama ini dilupakan dalam pembangunan. Kelompok-kelompok ini ada pada kelompok dengan 5 paling, paling miskin, paling marginal, paling tereksklusif, paling minoritas dan paling terdiskriminasi. Karena masuk dalam kelompok paling, sering kali tidak dilibatkan dalam proses pembangunan dan tidak menikmati hasil pembangunan.

Keterlibatan kelompok dalam perencanaan dan penganggaran ini menunjukkan pembangunan desa mempromosikan keberagaman dan keterlibatan sosial di antara semua warganya, tanpa memandang latar belakang

Manfaatnya adalah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat,



peningkatan partisipasi sosial, peluang ekonomi yang lebih luas dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Selain desa, gereja dalam hal ini Gereja Protestan Maluku menjalankan misi pelayanan gereja yang berdasarkan ajaran Kristus. Kristus dalam kitab Injil 1 Korintus 12:12-27 yang berbicara mengenai banyak anggota tetapi satu tubuh berbunyi :

“...Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota...”

“... Andai kata kaki berkata: Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkan ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata :’ Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh’ jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jika seluruh tubuh adalah mata, di manakah pendengaran, jika seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi ALLAH telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikendaki-Nya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh.

“Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan: “Aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak berkata kepada kaki: Aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota yang tubuh menurut pandangan kita kurang terhormat, kita beri penghargaan khusus. Terhadap anggota-anggota kita yang elok, tidak perlu. ALLAH telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghargaan khusus supaya jangan ada perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita, jika satu anggota dihormati semua anggota bersukacita...”

“... Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya...”

Dalam ayat-ayat ini, Paulus menggunakan analogi tubuh untuk menggambarkan gereja, di mana setiap orang adalah bagian yang berharga dari keseluruhan tubuh Kristus. Meskipun berbeda dalam fungsi dan peran, semua anggota adalah penting dan harus dihormati serta diintegrasikan. Tidak ada satu pun yang lebih unggul atau kurang berarti semuanya diperlukan untuk membentuk

atuan.



GPM mengimplementasikan itu dengan mengikutsertakan warga gereja dengan keterwakilan warga gereja untuk ikut dalam proses penyusunan program dan anggaran gereja. Bukan sebatas dalam proses saja tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi dan monitoring. Penyusunan dan program anggaran juga untuk warga gereja yang masuk dalam kelompok lima paling. Bentuk kongkretnya, bedah rumah untuk warga gereja yang rumahnya tidak layak huni dengan biaya yang dikeluarkan antara 50-75 juta rupiah. Beasiswa bagi anak yang berprestasi tapi dari keluarga tidak mampu. Beasiswa diberikan setiap tahun dimulai dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Dengan rincian sebagai berikut: SD 12 orang x Rp700.000,00, SMP 12 orang x Rp900.000,00, SMA 12 orang x Rp1.100.000,00, Perguruan Tinggi 12 x Rp1.400.000,00.

GPM juga menerapkan sistim keuangan 70:30%, di mana dalam GPM tidak semua jemaat memiliki kemampuan keuangan yang sama. Sebelum tahun 2008, GPM belum mampu untuk membiayai gaji-gaji pendeta. Jadi setiap jemaat membiayai gaji pendeta secara terpisah. Jika jemaat yang kondisi keuangannya baik maka gaji pendeta pun baik dan dibayarkan setiap bulannya. Akan tetapi jika jemaat yang kondisi keuangannya air mata (susah), maka gaji pendeta pun tidak dapat dibayarkan. Untuk itu, pada sidang sinode tahun 2008, diputuskan secara bersama untuk mengatur ulang mekanisme sistim keuangan gereja dengan sistim 70% dan 30%. Di mana untuk 70% dana jemaat akan dikelola oleh jemaat, sedangkan untuk 30% disetor ke Sinode melalui klasis untuk membiayai kebutuhan gaji pendeta, yayasan pendidikan GPM, pensiun dan untuk membantu membiayai jemaat yang susah (subsidi). Sehingga sampai dengan hari ini gaji pendeta GPM semuanya sama dibayarkan setiap bulan tidak ada lagi pendeta k mendapatkan gaji. Dan untuk jemaat-jemaat yang tidak mampu, GPM



melakukan subsidi dari dana 30% untuk membantu jemaat-jemaat yang menghadapi kesulitan keuangan.

Fakta-fakta di atas menunjukkan gereja sangat inklusi dalam proses-proses bersama untuk kesejahteraan umat. Saat ini juga GPM menggalangkan GEDSI. Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial. GEDSI menjadi hal yang juga dilakukan oleh GPM dalam proses penyusunan program dan anggaran gereja dan juga untuk misi pelayanan.

9.3 Menghidupkan Kohesi Sosial Melalui Inklusi

Proses sosial merupakan interaksi dinamis hari demi hari yang bersifat informal antar anggota masyarakat. Individu maupun kelompok dapat secara bebas mengekspresikan aspirasinya secara dinamis dan kreatif. Kemudian arena ini dapat menjadi lebih eksis dan negosiasi dalam membuat perubahan sehingga terwujud tatanan sosial yang baru (Warsilah, 2015). Sebagai suatu proses sosial interaksi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kohesivitas sosial masyarakat. Kohesi sosial masyarakat dapat terjadi ketika masyarakat desa terlibat dalam proses remuk warga, musyawarah desa (musdes), musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) (Faizail dan Nain, 2018).

Faktor-faktor yang dapat membentuk kohesivitas adalah setiap anggota memiliki komitmen yang tinggi, interaksi yang didominasi kerja sama dan sama-sama mempunyai tujuan yang saling terkait dengan yang lainnya. Kohesi sosial merupakan perasaan "*we felling*" yang mempersatukan setiap anggota menjadi satu bagian (Myres, 2014). Rasa memiliki tersebut juga dapat membentuk kohesi sosial antar individu dalam komunitas.



eterlibatan masyarakat dalam penyusunan program dan anggaran Musdes dan Musrenbang menghasilkan program-program yang

berimplikasi terhadap kohesi sosial. Desa Poka yang memiliki masyarakat yang heterogen memiliki kohesi sosial yang tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan pada program-program kerja maka masyarakat akan terlibat bersama-sama dengan bekerja bakti bersama-sama untuk mempersiapkan program agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. Mengingat desa Poka terkena dampak dari kerusuhan sosial pada tahun 1999. Maka masyarakat selalu diberikan ruang agar tercipta interaksi antar individu dan kelompok sehingga timbul rasa percaya dan peduli antar sesama masyarakat. Ada program PKK dalam hal pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman-tanaman menumbuhkan kohesi sosial. Kegiatan tersebut menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat untuk hidup berbagi dengan masyarakat lain. Di mana hasil panen tersebut dibagikan kepada pengurus dan tetangga terdekat. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan:

“...dasa wisma berbicara tentang lahan, tanaman sampai dengan saat ini jika ada hasil panen kita akan dibagikan ibu...ini karena katong punya hubungan komunikasi yang baik...” (Manuskrip: 08)

Pernyataan di atas menunjukkan tercipta kohesi sosial di mana masyarakat terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga negara tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan. Dan manfaatnya adalah terjadinya kohesi sosial yang diakibatkan adanya interaksi antar individu maupun kelompok.

9.4 Kepedulian Jalan Menuju Keharmonisasian Sosial

Seiring perkembangan teknologi, globalisasi membawa perubahan kemajuan yang sangat pesat dalam seluruh aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, budaya, infrastruktur dan teknologi. Namun, disisi lain membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat seperti meningkatnya individualisme, materialisme di mana orang lebih cenderung memikirkan dirinya



sendiri, tidak peduli dengan kehidupan di sekitar dan gaya hidup hedonisme. Melemahnya ikatan sosial tradisional, seperti dengan kecanggihan teknologi, membuat orang lebih banyak berinteraksi secara online dibandingkan dengan bertatap muka, semua aktivitas dilakukan secara online sehingga merusak ikatan sosial yang menghilangkan nilai-nilai kebersamaan, interaksi sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, partisipasi anggaran menjadi semakin penting di mana masyarakat terlibat langsung proses pengambilan keputusan mengenai program dan anggaran desa, sehingga anggaran dan program yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah memberikan ruang publik untuk masyarakat berkumpul baik itu pertemuan informal ataupun formal akan menumbuhkan komunikasi dan interaksi dari masyarakat atau menumbuhkan kohesi sosial.

Partisipasi anggaran yang inklusif memainkan fungsinya dengan baik dalam memperkuat kohesi sosial dengan memastikan bahwa setiap suara, ide, pikiran terutama dari kelompok-kelompok rentan, didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini akan dapat mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan rasa peduli dan rasa kebersamaan.

Agama mana pun mengajarkan setiap umatnya untuk menolong, peduli terhadap sesama manusia. Ajaran Kristen mengajarkan KASIH yang terdapat dalam kitab 1 Korintus 13:4-7 yang berbunyi demikian :

"...KASIH itu sabar; KASIH itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu..."



Ayat ini memberikan landasan etis yang menjadi dasar untuk diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam sikap peduli dan empati terhadap orang lain. Dalam kaitannya dengan partisipasi anggaran menerapkan nilai-nilai KASIH dalam bentuk bersedia mendengar suara dari semua lapisan masyarakat termasuk mereka yang terpinggirkan. Mengutamakan kepentingan bersama dan memastikan bahwa keputusan anggaran berlandaskan keadilan dan kebenaran dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan semua lapisan masyarakat. Keputusan anggaran harus jujur dan adil tanpa mengambil sesuatu untuk kepentingan pribadi. Bekerja sama dengan sikap saling percaya, bertanggungjawab untuk kepentingan bersama. Nilai-nilai ini yang harus dibangkitkan kembali terutama dalam proses penyusunan anggaran. Sikap pemimpin dan semua lapisan masyarakat harus memiliki rasa peduli. Pemimpin peduli terhadap masyarakat apalagi untuk masyarakat yang terpinggirkan. Masyarakat juga harus peduli terhadap masyarakat yang terkucilkan, peduli dengan pemerintah.

Desa Poka bekerja sama dengan Dinas Tanggap Bencana setelah mengadakan sosialisasi desa Tanggap Bencana membuat jalan untuk masyarakat disabilitas dan menyediakan bantuan kursi roda terhadap kelompok disabilitas serta memberikan bantuan dana untuk UMKM di desa Poka yang salah satu penerima juga adalah masyarakat disabilitas.





Sumber : dokumen peneltian (2023)

Gambar 9.1 Kantor Desa Poka Yang Peduli Terhadap Kelompok Disabilitas

Gereja Protestan Maluku peduli juga terhadap orang-orang yang dikucilkan dari masyarakat. Di mana program dan anggaran gereja ada untuk orang-orang ATM (Aids-TBC-Malaria). Dalam bentuk program Kampanye Peduli HIV/AIDS, penyusunan buku saku HIV/AIDS, rekrutmen tenaga relawan kampaye HIV/AIDS dan Pelatihan *Training of Trainer fasilitator* HIV/AIDS dan juga Rumah Damai. Istilah yang digunakan gereja sebagai gedung tempat pendampingan bagi saudara yang dihidup dengan AIDS (SADHA). Dan dari program ini GPM menerima penghargaan dan apresiasi dari pemerintah melalui Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) di Makassar pada tahun 2023. Berita ini diterbitkan pada *website* milik Gereja Protestan Maluku.



9.5 Refleksi

Inklusivitas, kohesi sosial tidak hanya sekedar nilai-nilai abstrak, akan tetapi memiliki dampak dalam partisipasi anggaran. Inklusi memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi anggaran. Kohesi sosial yang tercipta melalui proses inklusi meningkatkan keterlibatan dan komitmen jemaat, menumbuhkan kepedulian terhadap anggaran yang disusun di mana anggaran sesuai dengan kebutuhan riil jemaat ataupun masyarakat.

Kepedulian sebagai nilai dasar dalam partisipasi anggaran mengarahkan perhatian pada kesejahteraan bersama. Ketika kepedulian terinternalisasi dalam proses penganggaran, alokasi dana tidak hanya berorientasi pada hasil finansial, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial seperti pengurangan ketimpangan, peningkatan kesejahteraan, dan penghapusan diskriminasi dalam pelayanan gereja. Melalui pendekatan ini, anggaran berfungsi sebagai alat strategis yang tidak hanya mendukung operasional gereja, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, partisipasi anggaran yang inklusif tidak hanya sekedar proses teknis, tetapi juga merupakan wujud nyata dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, yaitu KASIH, kepedulian, dan solidaritas. Penerapan nilai-nilai ini melalui partisipasi anggaran berpotensi menciptakan perubahan yang nyata di masyarakat, seperti penurunan ketimpangan sosial dan ekonomi, peningkatan stabilitas dan perdamaian, serta penguatan kesetaraan dan penghargaan terhadap setiap individu. Langkah kecil yang dimulai dari individu dan masyarakat ini dapat menghasilkan dampak besar yang mengarah pada terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan adil.



BAB X

HARAPAN MENCAPAI TUJUAN BERKELANJUTAN YANG BAHAGIA

10.1 Pengantar

Harapan adalah elemen fundamental dalam kehidupan manusia yang mendorong semangat dan tekad untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam perspektif kitab suci, khususnya Alkitab, harapan tidak hanya merupakan aspirasi individu, tetapi juga sebuah janji dari Tuhan untuk memberikan masa depan yang penuh damai sejahtera. Yeremia 29:11 menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera untuk umat-Nya, memberikan mereka hari depan yang penuh harapan. Harapan ini memberikan landasan spiritual yang kuat bagi umat beriman untuk menjalani hidup dengan keyakinan dan optimisme.

Dalam konteks praktis, terutama dalam partisipasi anggaran desa, makna harapan ini menjadi sangat relevan. Partisipasi anggaran desa adalah proses di mana masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran desa. Proses ini tidak hanya menciptakan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan kerja sama di antara masyarakat. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, partisipasi anggaran desa mencerminkan harapan kolektif untuk masa depan yang lebih baik, di mana setiap individu merasa dihargai dan kebutuhan mereka diperhatikan.

Harapan, baik dari sisi kitab suci maupun dalam partisipasi anggaran desa, merupakan pilar penting yang mengarahkan kita menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan berpegang pada janji Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan dalam pengelolaan

di desa, kita dapat mewujudkan komunitas yang lebih sejahtera dan
Bab ini akan membahas harapan besar yang diinginkan oleh bangsa



Indonesia yaitu dilihat dari indeks kebahagiaan dan pembangunan yang berkelanjutan.

10.2 Menguak Kebahagiaan dari Partisipasi Anggaran

Kebahagiaan adalah istilah yang luas. Kebahagiaan didefinisikan secara berbeda oleh individu dan kelompok, organisasi dan negara. Tingkat kebahagiaan juga berbeda-beda, kebahagiaan adalah kebahagiaan fisik dan kebahagiaan mendalam yang memengaruhi jiwa. Kebahagiaan adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh setiap individu dan masyarakat. Namun, apa sebenarnya yang membuat masyarakat merasa bahagia?. Selama ini, banyak yang mengaitkan kebahagiaan dengan faktor-faktor seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Namun, semakin berkembangnya pemahaman tentang konsep kebahagiaan kolektif, muncul perspektif baru yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam penganggaran.

Partisipasi anggaran merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan sumber daya publik. Melalui partisipasi ini, warga tidak hanya sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Partisipasi ini diyakini mampu meningkatkan rasa kepemilikan, transparansi, dan kepercayaan terhadap pemerintah, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kebahagiaan masyarakat. Data yang diperoleh di lapangan ternyata masyarakat merasa senang dan lebih dihargai jika dilibatkan dalam tahapan pengambilan keputusan mereka merasa dihargai sebagai anggota masyarakat, karena diikutsertakan dalam proses pembangunan (Tumbel, 2017).



Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi anggaran, hal ini berdampak positif pada kebahagiaan masyarakat. Partisipasi anggaran meningkatkan pemberdayaan, transparansi, keadilan sosial, keadilan hidup dan solidaritas, semua faktor yang berkontribusi langsung pada peningkatan Indeks Kebahagiaan (*Indeks of Happiness*). Indeks Kebahagiaan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan (Wikipedia). Indeks Kebahagiaan mencakup tiga dimensi, sub dimensi dan indikatornya:

A. Dimensi Kepuasan Hidup:

A.1 Indeks Sub dimensi Kepuasan Hidup Personal :

A.1.a Pendidikan dan Ketrampilan

A.1.b Pekerjaan/Usaha/Kegiatan Utama

A.1.c Pendapatan Rumah Tangga

A.1.d Kesehatan

A.1.e Rumah dan Fasilitas Rumah

A.2 Indeks Sub dimensi Kepuasan Hidup Sosial

A.2.a Keharmonisan Keluarga

A.2.b Ketersediaan Waktu Luang

A.2.c Hubungan Sosial di Lingkungan

A.2.d Keadaan Lingkungan

A.2.e Kondisi Keamanan

B. Indeks Dimensi Perasaan

B.1 Perasaan Senang/Riang/Gembira

B.2 Perasaan Tidak Khawatir/Cemas

B.3 Perasaan Tidak Tertekan

Indeks Dimensi Makna Hidup



- C.1 Kemandirian
- C.2 Penguasaan Lingkungan
- C.3 Pengembangan Diri
- C.4 Hubungan Positif dengan Orang Lain
- C.5 Tujuan Hidup
- C.6 Penerimaan Diri

Penelitian ini tidak menunjukkan bagaimana cara menghitung indeks kebahagiaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan keterlibatan masyarakat dalam partisipasi anggaran dapat berkontribusi langsung terhadap indeks kebahagiaan.

Ketika masyarakat diberdayakan melalui partisipasi anggaran, masyarakat lebih dihargai dan memiliki kontrol atas keputusan yang memengaruhi kehidupan. Pada saat musdes, masyarakat mengusulkan perbaikan jalan setapak, memperhatikan kelompok-kelompok rentan dan hal-hal ini langsung ditangani oleh Pemerintah desa. Hal tersebut, meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat karena merasa suara mereka didengar dan dihargai. Keterbukaan informasi mengenai anggaran dimana pemerintah desa secara terbuka dan transparan menginformasikan anggaran dan penggunaan anggaran maka masyarakat akan merasa puas dan percaya kepada pemerintah. Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program bersama seperti kerja bakti, program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan kepada UMKM, pemberdayaan kelompok perikanan dengan desa Poka sebagai kampung perikanan cerdas dimana semua program itu untuk kesejahteraan masyarakat maka berdampak dengan mempererat interaksi sosial masyarakat yang berdampak pada tan perasaan bahagia dan kepuasan hidup.



Menurut BPS, indeks kebahagiaan sebagai ukuran pembangunan yang bersifat subjektif, ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maluku tahun 2021 masuk peringkat ke tiga dengan skor indeks 76,28 dalam publikasinya BPS yang berjudul Statistika Indonesia 2024. Indonesia secara nasional mencapai angka 71,49 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Maluku memiliki indeks kebahagiaan yang lebih baik dibandingkan dengan sebagian besar provinsi lain di Indonesia yang diukur dari kepuasan hidup, afeksi dan eudaimonia, atau dengan kata lain masyarakat Maluku secara umum merasa sejahtera dan puas dengan kehidupan yang dijalani, meskipun Maluku menurut data BPS masuk pada urutan ke empat termiskin di Indonesia dengan memiliki persentase tingkat kemiskinan sebesar 18,45% dari total penduduk di Maluku. Mengutip pernyataan Mantan Gubernur Maluku Said Assagaf: “..Provinsi Seribu Pulau itu adalah orang-orang paling bahagia di seluruh Indonesia...” (Antara News, 2015).

10.3 Partisipasi Anggaran sebagai Pilar Utama Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan global yang diadopsi oleh PBB pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs (Millennium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 (Patiung, 2019; Kurniawan dan Artisa, 2023). SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh



pembangunan, baik itu pemerintah, *Civil Society Organization* (CSO), sektor akademisi dan sebagainya. Prinsip utama SDG's yaitu *Leave No One*

Behind tidak ada seorang pun yang tertinggal, semua maju bersama-sama dengan ikut terlibat dalam proses pembangunan dan menikmati kesejahteraan bersama-sama

Kesejahteraan yang dicapai bersama-sama mencakup 17 (tujuh belas) tujuan yang dikutip dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 antara lain sebagai berikut: 1. *No poverty* (tanpa kemiskinan), 2. *Zero Hunger* (tanpa Kelaparan), 3. *Good Health and Well-Being* (kehidupan sehat dan sejahtera), 4. *Quality Education* (pendidikan berkualitas), 5. *Gender Equality* (kesetaraan gender), 6. *Clean Water and Sanitation* (air bersih dan sanitasi layak), 7. *Affordable and Clean Energy* (energy bersih dan terjangkau), 8. *Decent Work and Economic Growth* (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), 9. *Industri, Innovation and Infrastructur* (industri, inovasi dan infrastruktur, 10. *Reduced inequalities* (berkurangnya kesenjangan), 11. *Sustainable Cities and Communities* (kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. *Responsible Consumption and Production* (konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, 13. *Climate Action* (penanganan perubahan iklim), 14. *Life Below Water* (ekosistem lautan), 15. *Life on Land* (Ekosistem daratan), 16. *Peace, Justice and Strong Institutions* (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh), 17. *Partnership For The Goals* (kemitraan untuk mencapai tujuan). Dan konsep SDGs menjadi prioritas seluruh masyarakat dunia untuk mewujudkannya (*Internastional NGO Forum on Indonesian Development*).

Untuk selanjutnya ke tujuh belas pembangunan berkelanjutan atau SDGs diatas dikelompokkan menjadi empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Pilar pembangunan sosial: terdiri dari tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4 dan tujuan 5;



2. Pilar pembangunan ekonomi: terdiri dari tujuan 7, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10 dan tujuan 17;
3. Pilar pembangunan lingkungan: terdiri dari tujuan 6, tujuan 11, tujuan 12, tujuan 13, tujuan 14 dan tujuan 15;
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola yaitu tujuan 16

Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran desa, yang dapat diarahkan untuk mendukung tujuan SDGs. Untuk itu pemerintah desa membuka ruang-ruang publik formal yaitu Musdes dan Musrenbang dimana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk program dan anggaran sangat penting dalam mencapai SDGs. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, anggaran publik dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat sehingga alokasi dana dapat mendukung pencapaian tujuan SDGs secara lebih efektif. Dalam konteks ini, partisipasi anggaran tidak hanya menjadi alat mendukung SDGs tetapi juga mencerminkan harapan bahwa melalui keterlibatan masyarakat, kebijakan dan alokasi anggaran dapat lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Menghubungkan SDGs dengan partisipasi anggaran di tingkat desa dan gereja, penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh masing-masing entitas untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain partisipasi masyarakat, pemerintah desa Poka dan GPM menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dibutuhkan kerjasama, kolaborasi dengan pihak lain-lain seperti dengan pemerintah kota, provinsi, pusat, lembaga keagamaan dan lain-lainnya, TNI-Polri, dan lembaga sosial masyarakat.



No	Tujuan SDGs	Program	
		Gereja	Desa Poka
1	Tanpa kemiskinan	Bantuan Karitatif yang diberikan setiap bulan kepada anak yatim, piatu, duda, janda yang tidak memiliki pekerjaan.	Memberikan pelatihan kapasitas bagi pelaku UMKM Pangan
2	Kehidupan Sehat Sejahtera	Posyandu EUNIKE dan Posyandu Siloam yang dilakukan sekali dalam sebulan untuk lansia, anak dan terbuka untuk umum. Pengecekan kesehatan untuk para pendeta. Tersedia biaya perawatan setiap tahun yang dianggarkan dalam batang tubuh anggaran gereja. Kegiatan untuk Penganggulagn ATM (Aids-TBC-Malaria)	Kampung KB, Wisuda imunisasi dasar lengkap bagi balita
3	Pendidikan Berkualitas	Bantuan Pendidikan kepada anak-anak yang berprestasi tetapi kurang mampu. Guru-guru relawan untuk membantu pendidikan di sekolah-sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Dr.Jb.Sitanala milik GPM	Program Jam Belajar Anak
4	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Bedah rumah	Pembuatan air minum
5	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Pelatihan Pembuatan Proposal Usaha, Pelatihan Pembukuan untuk UMKM, Pelatihan Pemasaran Melalui Media Sosial bagi UMKM	Pemberian bantuan kepada UMKM
6	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	-	Pembuatan jalan setapak, pembuatan jalan untuk kelompok disabilitas
7	Mengurangi ketidaksetaraan	-	Pemberian Bantuan untuk UMKM dimana penerima manfaat ada UMKM yang disabilitas
8	Kota Permukiman Yang Berkelanjutan	-	Pelatihan Daur Ulang Sampah Bekas
	Perubahan Iklim	Pelatihan Pembuatan Hidroponik	Pemanfaatan Halaman dengan penanaman tanaman, Pelatihan Pembuatan Hidroponik
	Sistem Lautan	--	Program GAROPA (Gerakan Bersih Pantai POka



12	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Kuat	Sosialisasi anti korupsi	Mengikuti Seleksi Desa Percontohan Anti Korupsi
13	Kemitraan Yang Mencapai Tujuan	GPM bekerjasama dengan pemerintah, LSM, agama dan kepercayaan lainnya	Pemerintah Kota, Provinsi, Pusat, Kepolisian, LSM

Sumber : Hasil penelitian (2024)



10.4 Refleksi

Rencana Tuhan bagi seluruh kehidupan manusia adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan (Yeremia 29:11). Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu (29:7). Ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan selalu merancang kesejahteraan umat-Nya, untuk itu sebagai umat kita juga harus berjuang, bekerja dan berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, sebab kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kesejahteraan kita juga.

Harapan masyarakat Indonesia adalah terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran, dan kebahagiaan dan harapan ini juga ingin diwujudkan oleh Pemerintah melalui dana desa yang diberikan kepada desa agar dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses partisipasi anggaran. Begitu juga Gereja Protestan Maluku dalam menjalankan misi pelayanannya membantu pemerintah untuk mencapai tujuan besar bangsa melalui indeks kebahagiaan dan pembangunan berkelanjutan.

Indeks kebahagiaan (*Indeks of Happiness*) yang mencerminkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran. Desa Poka dan GPM dapat memastikan bahwa alokasi sumber daya benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.



partisipasi anggaran yang inklusif memungkinkan program komunitas dan untuk lebih fokus pada upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan

kesehatan, kualitas pendidikan, perlindungan lingkungan, kemitraan yang semuanya merupakan bagian dari tujuan SDGs. Selain itu pencantuman nilai-nilai spiritual dan sosial dalam GPM dapat memperkuat integritas moral dalam pelaksanaan program-program tersebut, sehingga tidak hanya kehidupan materiil yang lebih baik, namun terbangunnya masyarakat yang baik, bahagia dan harmonis.



BAB XI

KASIH: MODEL PARTISIPASI ANGGARAN

11.1 Pengantar

Berdasarkan hasil deskripsi dan pemaknaan KASIH dalam wujud kontribusi, akuntabilitas, sinergi, inklusi dan harapan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini akan membahas Model Partisipasi anggaran KASIH yang berbeda dengan teori tangga partisipasi.

11.2 KASIH: Model Partisipasi Anggaran

Implementasi nilai-nilai KASIH dalam partisipasi anggaran desa dapat diwujudkan melalui kontribusi, akuntabilitas, sinergi, inklusi dan harapan yang tercermin dalam proses remuk RT, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Kontribusi: Kontribusi dalam partisipasi anggaran bukan hanya soal sumbangan materi, tetapi juga tentang keterlibatan aktif dari setiap anggota gereja untuk menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi kesejahteraan bersama.

2 Korintus 9:7 mengingatkan kita bahwa:

"...Setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita..."

Ayat ini mengajarkan bahwa memberi atau berkontribusi haruslah dilakukan dengan sukacita, tanpa paksaan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasan. Dalam partisipasi anggaran desa, kontribusi yang diberikan oleh



arga, baik dalam bentuk ide, waktu, atau tenaga, harus dilandasi oleh hati dan semangat gotong royong. Ini akan menumbuhkan rasa tanggung

jawab bersama untuk memajukan desa, bukan hanya berdasarkan kewajiban atau paksaan, tetapi atas dasar cinta dan kasih kepada sesama.

Lukas 6:35, Yesus berkata, "...Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik, dan pinjamilah tanpa mengharap balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Maha tinggi..."

Ayat ini menegaskan bahwa kita diajak untuk berbuat baik dengan tulus dan tanpa pamrih, termasuk dalam hal memberi kontribusi kepada sesama. Dalam partisipasi anggaran desa, ini berarti bahwa warga desa berkontribusi dengan kerelaan hati, bukan untuk mendapatkan keuntungan atau pujian, tetapi untuk kemajuan dan kesejahteraan desa. Pemerintah desa membuka ruang-ruang publik kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah atau perencanaan anggaran tanpa mengharapkan imbalan, tetapi dengan niat untuk memajukan kesejahteraan desa secara bersama-sama.

Akuntabilitas: Dalam partisipasi anggaran berarti setiap individu bertanggung jawab secara moral atas keputusan dan kontribusinya, tanpa kepentingan pribadi dan dengan semangat gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Kitab Injil Roma 14:12 dan Lukas 16 : 10-12 yang berbunyi demikian:

"..Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah..."

"Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. " Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan, sekecil apa pun, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Ayat ini lebih fokus pada prinsip kesetiaan dan tanggung jawab. Namun, prinsip ini dapat terkait dengan Kasih dalam konteks partisipasi anggaran desa, terutama dalam hubungan antar sesama. Makna Kasih dalam ajaran Kristen terkandung

penting seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kesetiaan. Semua nilai-ercermin dalam ayat ini. Ketika seseorang bertanggung jawab dalam



perkara kecil, hal ini menunjukkan komitmen dan perhatian terhadap kebaikan bersama. Ini merupakan implementasi dari Kasih yang tulus.

Dalam konteks partisipasi anggaran di Desa Poka, akuntabilitas berarti bahwa setiap warga yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus bertanggung jawab atas kontribusi dan keputusan mereka, baik itu berupa ide, waktu, tenaga, atau sumber daya. Mereka tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga menjaga kepercayaan dari seluruh masyarakat desa. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan warga desa harus dilakukan secara transparan, dengan mengedepankan keterbukaan dan komunikasi yang baik, sehingga semua pihak merasa dihargai dan bertanggung jawab bersama. Akuntabilitas ini memperkuat pertalian kebersamaan, menciptakan tata kelola yang lebih efisien, dan memastikan bahwa dana desa dialokasikan dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama, yakni meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup seluruh penduduk desa Poka.

Sinergi: Terciptanya sinergi melalui kerja sama yang saling mendukung dan memperkuat antar anggota, karena Kasih tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi mengutamakan kebaikan bersama. Dalam 1 Korintus 12:14-27 berbunyi:

“...Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota saja, melainkan banyak. Jika kaki berkata: karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk dalam tubuh, ia tidak karena itu tidak termasuk dalam tubuh. Kalau seluruh tubuh adalah mata, di manakah pendengaran? Kalau seluruhnya adalah pendengaran, di manakah penciuman?. Tetapi sekarang Allah telah menetapkan anggota-anggota dalam tubuh masing-masing seperti yang dikehendaki-Nya...”



menunjukkan bahwa setiap bagian tubuh memiliki fungsi dan peranannya yang melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Roma 12:4-5 berkata:

"...Sebab seperti tubuh kita ini terdiri dari banyak anggota, dan setiap bagian tubuh mendapat tugas yang khusus, demikian pula kita, meskipun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain..."

Ayat ini menekankan pentingnya kerja sama dan saling menopang dalam keberagaman untuk mencapai kebaikan bersama. Makna dari kedua ayat Alkitab tersebut, yaitu 1 Korintus 12:14-27 dan Roma 12:4-5, sangat erat kaitannya dengan konsep kasih. Keduanya menekankan pentingnya kesatuan, saling melengkapi, dan kerja sama antar anggota tubuh Kristus untuk mencapai tujuan bersama. Kasih dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada kepentingan individu, tetapi juga pada kebaikan bersama. Setiap bagian tubuh, baik itu individu atau kelompok dalam masyarakat, memiliki peran yang signifikan.

Dalam konteks partisipasi anggaran di Desa Poka, sinergi juga tercipta melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan dinas-dinas terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi pemerintah desa Poka dengan pemerintah Kota, Kementerian Perikanan dan kelautan melalui Badan Penyuluhan dan Perikanan yang menghasilkan desa Poka sebagai pilot project *Smart Fisheries Village* (SFV). Kolaborasi dengan Yayasan Sagu Salempeng dalam kegiatan-kegiatan mitigasi tanggap bencana, pelatihan hidroponik, pemberian modal usaha bagi usaha kecil menengah (UKM). Hal ini menunjukkan prinsip Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dan berupaya demi kebaikan bersama, dengan semua pihak bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat gotong royong untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan desa secara menyeluruh.



Inklusi: Dalam partisipasi anggaran kesetaraan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Tidak boleh membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan status lainnya semua harus diberikan kesempatan yang sama dan setara untuk berpartisipasi. Kitab Yakobus 2:2-4 berbunyi:

"..Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya: "Silakan tuan duduk di tempat yang baik ini!", sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata: "Berdirilah di sana!" atau: "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku!", bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat?..."

Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak membedakan orang berdasarkan status sosial. Dalam konteks inklusi, kita diajarkan untuk menerima dan menghargai setiap individu tanpa diskriminasi, memandang semua orang sebagai bagian dari komunitas yang sama di bawah kasih Tuhan. Kitab Injil Lukas 14:13-14 yang berbunyi demikian:

"...Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, timpang, dan buta, maka berbahagialah engkau, karena mereka tidak dapat membalasnya. Tetapi engkau akan dibalas pada kebangkitan orang-orang benar..."

Yesus mengajarkan dalam ayat ini tentang prinsip inklusi dengan mengundang orang-orang yang terpinggirkan untuk ikut serta dalam perjamuan. Ini menunjukkan bahwa Kasih tidak hanya mengundang orang yang bisa memberi balasan, tetapi juga memperhatikan orang-orang yang tidak dapat memberikan apa-apa sebagai bentuk inklusi.

Praktik inklusi di desa Poka dengan melibatkan setiap individu tanpa memandang latar belakang, status sosial atau kelompok tertentu. Memiliki peran penting dan hak yang setara untuk turut serta dalam keputusan yang aruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang terpinggirkan, seperti abilitas dan orang miskin, harus diberi ruang untuk menyampaikan suara



atau aspirasi mereka dan dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran. Dengan demikian, Kasih yang inklusif mengarah pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dalam pembangunan desa.

Selain itu, inklusi juga berperan penting dalam membangun kohesi sosial, karena dengan semua orang dilibatkan untuk ikut berpartisipasi terutama dalam pengambilan keputusan akan menumbuhkan rasa saling percaya, saling mendukung dan memiliki rasa tanggung jawab bersama.

Harapan merupakan perwujudan nilai Kasih, hal ini tercermin melalui komitmen untuk merancang dan mendukung program yang memiliki manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan komunitas. Kitab Nabi Yeremia 29:11 berbunyi demikian:

“..Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaKu mengenai kamu demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan melainkan masa depan yang penuh harapan...”

Ayat ini menekankan bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk membawa kesejahteraan dan harapan bagi umat-Nya. Hal ini menunjukkan harapan dalam pembangunan berkelanjutan yang membawa kesejahteraan bukan hanya generasi saat ini tetapi juga untuk generasi masa depan. Mazmur 33:5 berbunyi demikian: *“Ia senang pada keadilan dan hukum; bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa kasih setia dan keadilan Tuhan mencakup seluruh bumi, memberi dorongan untuk pembangunan yang adil dan penuh kasih yang menjaga kesejahteraan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Implementasi Harapan dalam partisipasi anggaran di desa Poka diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program-program jangka panjang dan mencakup pembangunan berkelanjutan diantaranya: Kampung keluarga berencana, program jam belajar

memberian bantuan bagi UMKM, program Garopa (Gerakan Bersih Pantai



Teori tangga partisipasi yang diperkenalkan oleh Arnstein (1969) merupakan model yang menjelaskan perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Model ini berfungsi sebagai kerangka untuk menilai sejauh mana masyarakat diberdayakan dalam berbagai program dan kebijakan, termasuk dalam konteks partisipasi anggaran.

Teori ini diumpamakan sebagai sebuah tangga yang menunjukkan semakin tingginya tingkat keterlibatan masyarakat. Teori ini memiliki delapan tingkatan, dimulai dari tingkat terbawah manipulasi dan terapi. Pada level ini masyarakat hanya dilibatkan secara formalitas dan tidak mempunyai kewenangan nyata dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, meskipun pada tingkat informasi, konsultasi dan *placation* menunjukkan bahwa masyarakat mendapat informasi dan mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, masukan, ide dan keputusan tetap berada di tangan pihak-pihak yang berwewenang. Berikutnya tingkatan yang lebih tinggi yaitu kemitraan, pelimpahan wewenang, dan kontrol ditangan warga, dimana warga tidak hanya dimintai pendapat dan informasinya saja, namun juga mempunyai pengaruh nyata bahkan kendali dalam pengambilan keputusan.

Model KASIH yang ditemukan dalam penelitian ini, menekankan pada aspek spiritual dan moralitas yang berdasar pada nilai-nilai religi, khususnya dalam wujud KASIH. Berbeda dari teori partisipasi anggaran yang lebih berfokus pada tingkat keterlibatan, keterbukaan dan transparansi, model KASIH menambahkan dimensi nilai-nilai religi yang kuat, yaitu bagaimana KASIH yang diwujudkan dalam kontribusi, akuntabilitas, sinergi, inklusi dan harapan digerakkan oleh kasih yang tulus, sukarela, tidak mementingkan diri sendiri, serta berorientasi pada

kerjaan bersama.

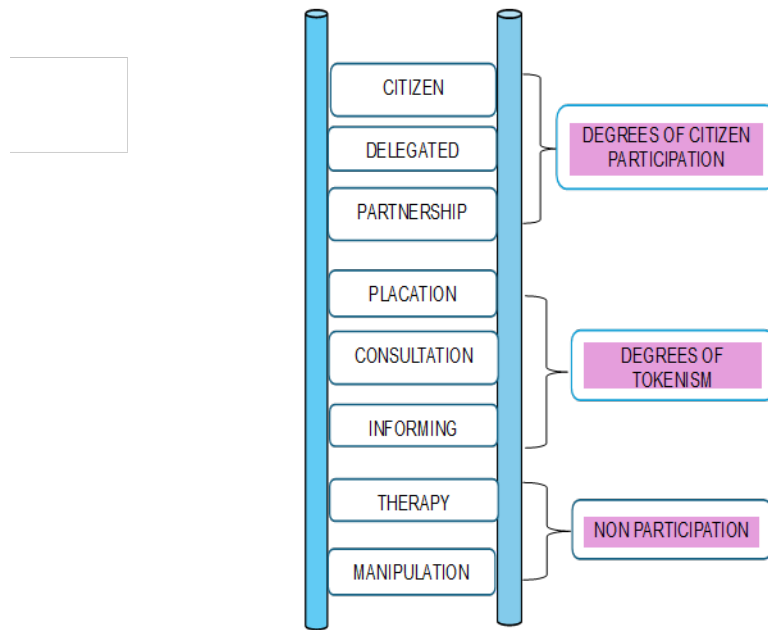


Model KASIH juga menjadi dasar dalam membangun relasi sosial masyarakat yang sehat dan harmonis. Ketika KASIH diimplementasikan akan menumbuhkan dan memperkuat kohesi sosial masyarakat, setiap individu yang bertindak akan lebih berempati, saling menghargai, saling menolong, bertanggungjawab dan bersedia bekerja bersama-sama secara sukarela untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Teori tangga partisipasi seperti yang telah dijelaskan di atas yang dimulai dari tangga non partisipasi hingga kontrol penuh ada di warga, lebih mengedepankan tahapan-tahapan formal dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, model KASIH tidak hanya berfokus pada peningkatan partisipasi, tetapi juga pada kualitas dan dorongan/niat dibalik partisipasi tersebut. Dengan menanamkan KASIH sebagai landasan utama, model ini menekankan bahwa setiap tindakan partisipasi dilakukan dengan komitmen terhadap Tuhan dan sesama, yang didorong nilai kerelaan dan ketulusan dalam berbagi untuk kebaikan bersama, bukan hanya dengan kepatuhan dan kontrol administrasi.

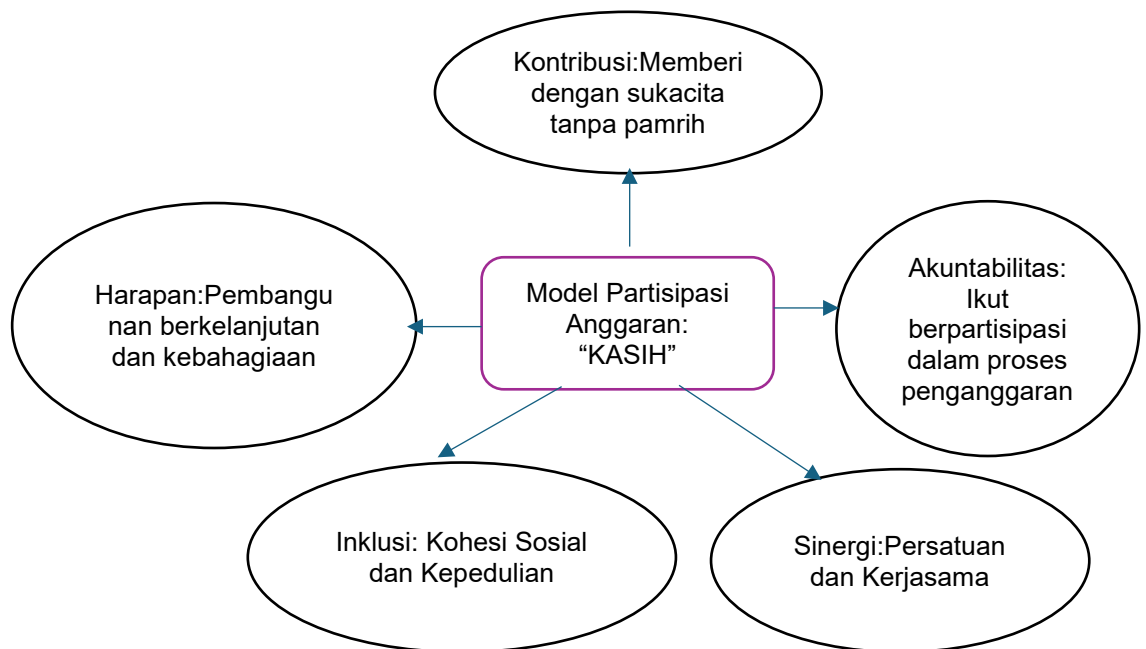
Hal ini dapat disimpulkan bahwa model KASIH berbeda dengan teori tangga partisipasi. Nilai-nilai religi yang memperkuat komitmen sosial dan spiritual serta menjadikan partisipasi sebagai bentuk ibadah yang mendalam, tidak hanya sebagai upaya memenuhi kewajiban partisipasi.





Sumber: Arnstein (1969)

Gambar 11.1 Teori Tangga Partisipasi



Sumber: Hasil Penelitian (2024)

Gambar 11.2 Model Partisipasi Anggaran "KASIH"



11.5 Refleksi

Model KASIH ketika diimplementasikan dalam partisipasi anggaran akan memperlihatkan betapa pentingnya nilai-nilai kasih dalam menciptakan keterlibatan masyarakat yang tulus dan bermakna bagi kesejahteraan bersama. Dasar KASIH, akan memotivasi individu dalam berkontribusi secara sukarela demi kepentingan bersama terlepas dari kepentingan pribadi. Hal ini menekankan bahwa partisipasi bukan sekadar kewajiban keuangan semata, tetapi sebuah komitmen moral dan spiritual yang melibatkan hati nurani setiap warga.

Implementasi KASIH juga memperkuat kohesi sosial, warga akan terhubung secara emosional dan memiliki tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam partisipasi anggaran. Dengan KASIH, kohesi sosial akan terjalin karena ada rasa saling menghargai, saling menolong, saling bekerja sama, ada kesetaraan dan semangat untuk bekerja sama yang menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan solid.

Model KASIH dengan menambahkan kedalaman nilai-nilai religi yang berbeda dengan teori tangga partisipasi. Dengan demikian, model KASIH memandang partisipasi tidak hanya dari tingkatan keaktifan tetapi juga dari kualitas keterlibatan yang penuh kasih terhadap sesama, menciptakan kohesi yang lebih mendalam serta masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.



BAB XII

PENUTUP

12.1 Kesimpulan

Model KASIH awalnya dikembangkan dalam konteks partisipasi anggaran Gereja Protestan Maluku (GPM). Nilai-nilai dari KASIH sebagai bentuk nilai-nilai spiritual dan menjadi dasar seluruh proses penganggaran. Akan tetapi, melalui analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa nilai-nilai yang sama juga ada dan relevan dalam konteks partisipasi anggaran di desa Poka. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip KASIH bersifat universal/umum dapat diimplementasikan pada berbagai bentuk komunitas, baik itu yang berbasis agama maupun komunitas umum seperti desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai KASIH yang terwujud dalam kontribusi, akuntabilitas, sinergi dan harapan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan partisipasi anggaran:

1. Kontribusi tidak hanya tentang pemberian dana, tetapi juga keterlibatan aktif individu yang secara sukarela dalam proses perencanaan anggaran demi melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Di GPM anggota jemaat berkontribusi dalam bentuk persembahan, persepuluhan, sumbangan, waktu, pikiran ide. Kontribusi ini mencerminkan rasa *sense of belong* dan *responsibility* jemaat terhadap visi dan misi GPM. Di desa, kontribusi ditemukan dalam partisipasi warga dalam kegiatan desa seperti musyawarah, gotong royong, atau menyumbangkan materi, tenaga dan ide. Baik GPM maupun desa, kontribusi mencerminkan keinginan jemaat/masyarakat yang secara sukarela mendukungnya untuk kesejahteraan bersama. Tindakan sukarela yang



dipandu dengan KASIH, membentuk dan memperkuat rasa kepercayaan antar anggota jemaat/masyarakat yang menciptakan rasa persatuan dan kesatuan.

2. Akuntabilitas dalam partisipasi anggaran menjelaskan komitmen moral dan tanggung jawab bersama dalam segala keterlibatan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran. Akuntabilitas tidak hanya fokus pada hasil akhir, namun juga pada proses. GPM akuntabilitas terwujud ketika setiap anggota jemaat berpartisipasi dengan tulus, sukarela dengan memprioritas kesejahteraan umat dalam persidangan jemaat, klasis dan sinode untuk merencanakan program dan anggaran gereja. Di desa Poka, akuntabilitas tercermin melalui keterlibatan aktif masyarakat tanpa ada diskriminasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan program dan anggaran desa.
3. Sinergi menggambarkan pentingnya kolaborasi yang mengutamakan kebaikan bersama sesuai dengan nilai kasih, dimana setiap elemen memiliki peran penting yang saling melengkapi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dicapai secara individu. GPM mewujudkan sinergi dalam bentuk kerja sama antar jemaat, klasis dan sinode dalam mendukung jemaat-jemaat yang kurang mampu. Dan juga membangun kerja sama antara pemerintah dan lintas agama. Desa Poka sinergi tercermin dengan melakukan kerja sama antara Pemerintah Kota, Provinsi, Dinas-dinas terkait dan Lembaga Sosial dalam program-program yang membutuhkan partisipasi aktif dari warga seperti GAROPA dan Smart Fisheries Village (SFV). Baik GPM maupun desa Poka mewujudkan sinergi dapat menciptakan kohesi sosial di antara jemaat dan masyarakat.



4. Inklusi merupakan prinsip penting yang memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi dan status lainnya, dapat terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran. GPM menerapkan inklusi dengan melibatkan seluruh anggota jemaat melalui keputusan jemaat dalam sidang untuk membahas program dan anggaran dan keputusan sidang yang dihasilkan berdasarkan keputusan bersama. Di desa Poka, partisipasi aktif semua kelompok yang ada dimasyarakat baik itu kelompok rentan, pemuda, perempuan, lembaga sosial masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah desa dan musrenbang. Inklusi di kedua konteks menunjukkan keterlibatan jemaat dan masyarakat tanpa melihat perbedaan status sosial dan bahwa manusia sama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka, keputusan anggaran harus mencerminkan keragaman dan kebutuhan masyarakat. Inklusi menciptakan rasa keadilan dan keterbukaan dalam proses penganggaran yang pada akhirnya memperkuat kebahagiaan jemaat dan masyarakat.
5. Harapan merupakan nilai yang memotivasi setiap individu yang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran untuk melihat lebih jauh dari kebutuhan saat ini, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama dan pembangunan yang berkelanjutan. Harapan yang diinternalisasi dalam partisipasi anggaran tidak hanya meningkatkan indeks kebahagiaan dan mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), tetapi juga memperkuat struktur sosial dan spiritual di GPM dan Desa Poka.



odel KASIH berbeda dari teori tangga partisipasi dalam membangun partisipasi anggaran yang lebih bermakna. Model KASIH, yang

menekankan kontribusi, akuntabilitas, sinergi, inklusi, dan harapan, memberi dasar moral untuk setiap tindakan dalam partisipasi anggaran, fokus pada kebaikan bersama. Sementara teori tangga partisipasi mengukur tingkat keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dengan menggabungkan kedua konsep ini, partisipasi anggaran tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai religi, yang mengajak setiap orang untuk aktif berkontribusi demi kesejahteraan bersama dalam suasana yang inklusif dan harmonis.

12.2 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan literatur khususnya partisipasi anggaran dan memberikan manfaat praktis bagi gereja, masyarakat desa. Adapun kontribusi penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini menghasilkan model KASIH sebagai paradigma baru untuk partisipasi anggaran. Model ini unik karena menginternalisasikan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam partisipasi anggaran baik itu di gereja maupun di desa. Menginternalisasikan nilai-nilai Kontribusi, Akuntabilitas, Sinergi, Inklusi dan Harapan yang berdasar pada KASIH. Sebagai paradigma baru, penelitian ini memperluas cakupan teori partisipasi anggaran dan memberikan landasan teoritis yang dapat diadopsi oleh berbagai komunitas yang ada.
2. Bagi Gereja: Penelitian ini memberikan arahan untuk meningkatkan keterlibatan umat dalam proses anggaran yang lebih transparan, akuntabel dan inklusif. Model KASIH dapat dilakukan oleh gereja-gereja untuk mengajak partisipasi jemaat dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi anggaran.



3. Bagi Desa, nilai-nilai KASIH dapat diimplementasikan oleh desa dalam merumuskan anggaran yang lebih inklusif dan akuntabel melalui partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kepemilikan, transparansi, dan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat desa
4. Penelitian ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan spiritual dalam proses pengelolaan anggaran. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan di tingkat lokal atau tingkat nasional untuk mendorong partisipasi anggaran yang lebih menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti yang tercermin dalam model KASIH. Hal ini dapat memengaruhi kebijakan yang lebih mendukung pemberdayaan dalam proses penganggaran.

12.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan kondisi tertentu sehingga terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya. Adapun keterbatasan penelitian antara lain:

1. Keterbatasan Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan epistemologi Kristen, yang berarti hasilnya sangat bergantung pada interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh. Karena sifatnya subjektif, terdapat kemungkinan bahwa interpretasi nilai-nilai religius dalam partisipasi anggaran dapat bervariasi tergantung pada konteks pengalaman individu yang diwawancarai.
2. Keterbatasan ruang lingkup. Penelitian ini difokuskan pada Gereja Protestan Maluku dan Masyarakat Desa Poka. Oleh karena itu, temuan dan kontribusi penelitian tidak dapat diterapkan secara langsung pada



konteks lain. Keterbatasan ruang lingkup ini perlu dipahami ketika menggeneralisasi hasil penelitian.

3. Keterbatasan Waktu. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dalam hal durasi pengumpulan data. Data yang dianalisis juga mencerminkan situasi pada saat penelitian dilakukan dan perubahan situasi yang terjadi setelah penelitian mungkin tidak tercermin.
4. Keterbatasan data. Data penelitian ini didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan tersedia. Data yang lebih luas atau beragam mungkin menghasilkan pemahaman yang lebih dalam.
5. Keterbatasan teori. Penelitian ini memperkenalkan konsep baru yaitu KASIH yang masih perlu diuji lebih lanjut dan dikembangkan.
6. Kemungkinan bias. Penelitian kualitatif dapat memiliki bias yang mungkin muncul dalam pemilihan sampel, analisis data dan interpretasi temuan.

12.4 Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada pembaca yang hendak menjadikan disertasi sebagai literatur penelitian selanjutnya:

1. Memperluas cakupan geografis: Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan geografisnya dengan mengkaji partisipasi anggaran di berbagai daerah, negara atau komunitas. Hal ini akan membantu dalam memahami perbedaan praktik partisipasi anggaran berdasarkan letak geografis yang berbeda.
2. Waktu Penelitian: Melakukan penelitian jangka panjang yang dapat memantau perubahan dalam praktik partisipasi anggaran seiring waktu.



Hal ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik partisipasi dan juga dampaknya

3. Metode penelitian: Penelitian ke depan dapat menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis eksperimen untuk dapat melihat perilaku dari peserta partisipasi anggaran.



